



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 – 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

(2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2011-2016 dilaksanakan sesuai RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 5

RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2011 – 2016.

Pasal 7

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2016 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juli 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala DPPKAD

ttd

ISTIANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 – 2016

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis, berada di jalur perekonomian utama dan kawasan pantai utara Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang secara geografis berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah barat Kabupaten Tegal, sebelah selatan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas, serta sebelah timur dengan Kabupaten Pekalongan. Wilayah Kabupaten Pemalang secara administratif terbagi menjadi 14 kecamatan, 211 desa dan 11 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 111.530 Ha.

Sejak terbentuknya daerah otonom Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang beserta segenap *stakeholder* pembangunan. Pembangunan daerah tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan prasarana dan sarana dasar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Agar terdapat kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh (20) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima (5) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Mekanisme penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, seperti diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelerasaan RPJMD dengan RPJMN 2010 – 2014 tanggal 31 Maret 2010, terutama dalam hal pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014 yang memerlukan dukungan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pemalang.

Pada tanggal 31 Oktober tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung, telah terpilih pasangan Bupati-Wakil Bupati periode 2011-2016 yang telah dilantik pada tanggal 24 Januari 2011. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang wajib menyusun RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2015. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD harus telah ditetapkan paling lambat enam (6) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD 2011–2016 harus realistis dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, mengacu arahan dan kebijakan pembangunan nasional dan arahan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta isu strategis pembangunan Kabupaten Pemalang. Penyusunan RPJMD harus pula memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011- 2031

sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2011 serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Agar penyusunan RPJMD dapat realistis perlu disusun tahapan-tahapan penyusunan RPJMD tahun 2011 – 2016. Tahap tersebut mulai dari tahap persiapan, penyusunan draf rancangan awal sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penyusunan dokumen RPJMD dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2006 – 2010. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah visi dan misi RPJMD tahun sebelumnya sudah dapat tercapai dan apakah pencapaian hasil pembangunan sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD. Setelah diketahui capaian visi dan misi dan hasil pembangunan selama kurun waktu lima (5) tahun, pada RPJMD berikutnya disusun langkah strategis agar RPJMD tersebut selaras dengan RPJMD sebelumnya dan selaras dengan Perda Nomor 2 tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005 – 2025. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 2006 - 2010.

RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 menjadi pedoman kerja bagi seluruh SKPD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pemalang 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3).

C. Hubungan RPJMD Kabupaten Pemalang Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Pemalang merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RPJMD

Kabupaten Pemalang Tahun 2011–2016 disusun mengacu pada RPJP Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025 dengan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013 dan RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014. RPJMD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD tahunan dan Renstra SKPD.

Agar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang Tahun 2011–2016 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang, maka dalam menyusun RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011–2016 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan/sektor, penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011–2016 memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan (RIPP), dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, selain itu RPJMD memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan serta menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

E. Sistematika

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I **Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan.
- BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**, menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- BAB III **Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah**, menguraikan tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan juga kerangka pendanaan yang dibutuhkan.
- BAB IV **Analisis Isu-Isu Strategis**, menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis.
- BAB V **Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**, menggambarkan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih dan uraian ringkas.
- BAB VI **Strategi dan Arah Kebijakan**, menggambarkan tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan arahan program pembangunan nasional dan provinsi.
- Bab VII **Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**, menguraikan tentang kebijakan umum pembangunan jangka menengah dan perincian program-program pembangunan.
- Bab VIII **Indikasi Rencana Program dan Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan**, menguraikan tentang indikator capaian kinerja program dan pendanaan indikatif.
- Bab IX **Penetapan Indikator Kinerja Daerah**, menguraikan tentang indikator capaian dan kinerja dari masing-masing program pembangunan daerah.
- Bab X **Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**, menggambarkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan ini menjadi pedoman bagi segenap SKPD dan pemangku kepentingan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Pemalang sebesar 111.530 Ha, sebagian besar wilayah merupakan tanah kering seluas 72.836 Ha (65,30%) dan lainnya tanah persawahan seluas 38.694 Ha (34,7%). Adapun Batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa.
Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan.
Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
Sebelah Barat : Kabupaten Tegal.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pemalang terletak pada 109° 17' 30"– 109° 40' 30" Bujur Timur (BT) dan 8°52' 30" – 7°20' 11" Lintang Selatan (LS)

c. Topografi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Pemalang memiliki keunikan wilayah, yang dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kategori, yaitu sebagai berikut :

- 1) Daerah dataran pantai: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter diatas permukaan air laut (DPL); meliputi 17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai.
- 2) Daerah dataran rendah: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 meter DPL yang meliputi 94 desa dan 4 kelurahan di bagian selatan dari wilayah pantai.
- 3) Daerah dataran tinggi: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 16 - 212 meter DPL yang meliputi 35 desa, terletak di bagian tengah dan selatan.
- 4) Daerah pegunungan: terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Daerah dengan ketinggian antara 213 - 924 meter diatas permukaan laut, meliputi 55 desa yang terletak dibagian selatan.
 - b) Daerah berketinggian 925 meter diatas permukaan laut yang terletak di bagian selatan. Daerah ini meliputi 10 desa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.

d. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Pemalang terbagi atas tiga bagian antara lain sebagai berikut :

- a. Tanah alluvial : terutama terdapat di dataran rendah
- b. Tanah regosol : terdiri dari batu-batuan pasir dan intermedier didaerah bukit sampai gunung.
- c. Tanah latosol : terdiri dari batu bekuan pasir dan intermedier di daerah perbukitan sampai gunung.

e. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Pemalang terbagi atas :

1) Air Permukaan

Kabupaten Pemalang dialiri sungai yang memegang peranan penting yaitu Sungai Waluh yang terletak kurang lebih 4 km dari pusat kota dan sungai comal yang terletak kurang lebih 14 km dari pusat kota.

2) Mata air

Kabupaten Pemalang memiliki potensi berupa mata air antara lain :

- a) Mata air Gung Agung yang terletak di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang, dengan debit air kurang lebih 10 liter/detik, terletak pada ketinggian kurang lebih 70 meter diatas permukaan air laut.

- b) Mata air Telaga Gede yang terletak di Desa Sikasur Kecamatan Belik.
- c) Mata air Asem yang terletak di Desa Bulakan, dengan debit air kurang lebih 160 meter/detik;
- d) Mata air yang lain.

3) Air Tanah

Kabupaten Pemalang terbagi menjadi dua wilayah air tanah sebagai berikut :

a) Daerah dataran rendah

Tanah terdiri dari endapan-endapan lepas yang mempunyai sifat lulus air. Pada daerah ini kandungan air tanahnya cukup besar hanya saja karena dekat pantai maka terjadi intrusi air laut.

b) Daerah Perbukitan tua dan Perbukitan muda

Daerah perbukitan tua: ditempati batu-batuan dari formasi *mioson* dan *floosen* yang mempunyai sifat kelulusan air yang sangat kecil, terutama serpih dan Nepal. Adapun yang berukuran kasar seperti pasir mempunyai sifat kelulusan air, namun karena kelerengan yang cukup terjal maka air tanahnya belum terbentuk. Daerah perbukitan muda: ditempati batuan tafaan hasil gunung berapi, litologinya bersifat lulus air, tetapi morfologinya berupa perbukitan dengan lereng yang cukup terjal dimungkinkan air tanahnya baru mulai terbentuk. Pada satuan tafaan litologinya bersifat lulus air, maka kemungkinan sudah mengandung air tanah.

Kabupaten Pemalang memiliki beberapa bagian wilayah hutan, terdiri dari hutan lindung dengan luas 1.858,60 ha, hutan suaka alam dan wisata luas 24,10 ha, hutan produksi tetap sebesar 26.757,60 ha, hutan produksi terbatas sebesar 3.980,70 ha, hutan bakau dengan luas 1.672,50 ha, dan hutan rakyat seluas 22.874,78 ha. Luas hutan dibandingkan dengan luas wilayah sebesar 49,57%. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang cukup baik terkait dengan kemampuan wilayah untuk menyimpan air tanah (*catchment area*).

f. Klimatologi

Temperatur Kabupaten Pemalang tidak banyak mengalami perubahan pada musim kemarau maupun penghujan, berkisar antara 30^o C dengan rata-rata curah hujan selama 1 tahun sebesar 302 mm. Curah hujan tertinggi berada pada Bulan Januari yaitu 739 mm, sedangkan curah hujan terendah berada di Bulan Juli, yaitu sebesar 47 mm.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Kabupaten Pemalang terbagi atas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman, dan Kawasan Peruntukan Lainnya.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi area dengan luas 27.543 Ha terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas seluas 10.617, dan Kawasan hutan produksi seluas 16.926 Ha.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pengembangan pertanian tanaman pangan terdiri atas lahan sawah irigasi seluas 30.299 Ha, dan luas sawah non irigasi seluas 7.316 Ha. Sedangkan pertanian lahan basah 38.617 Ha, kawasan pertanian lahan kering 23.813 Ha dan kawasan peruntukan lahan pertanian berkelanjutan sebesar 30.299,41 Ha. Pengembangan pertanian hortikultura seluas 9.329 Ha, pengembangan perkebunan seluas 15.713 Ha terbagi atas pengembangan komoditas perkebunan rakyat seluas 13.850 Ha dan perkebunan yang diusahakan perkebunan negara (PTPN) dan perkebunan swasta seluas 1.863 Ha. Rencana pengembangan peternakan meliputi ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Pengembangan ternak besar dan kecil

dalam RTRW Kabupaten Pemalang diarahkan pada wilayah yang mempunyai sumberdaya tanaman makanan ternak, sedangkan pengembangan ternak unggas tersebar diseluruh Kabupaten.

3) Kawasan Peruntukan Perikanan

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar, dan pengolahan perikanan. Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan melalui :

- a) Kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-6 mil dari pantai
- b) Kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 6-12 mil dari garis pantai
- c) Kawasan penangkapan ikan skala besar dengan area tangkapan ikan lebih dari 12 mil dari garis pantai.

Rencana pengembangan budidaya perikanan tambak berada di Kecamatan Pemalang seluas 50 Ha, Kecamatan Taman seluas 55 Ha, Kecamatan Petarukan seluas 89 Ha, Kecamatan Ulujami seluas 1.534 Ha. Rencana pengembangan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di 12 Kecamatan yaitu Randudongkal, Moga, Bantarbolang, Petarukan, Ampelgading, Taman, Comal, Pemalang, Ulujami, Belik, Bodeh, dan Watukumpul. Rencana pengolahan komoditas perikanan ditetapkan di kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.

4) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi bahan tambang di Kabupaten meliputi pasir batu, dan tanah urug, tanah liat, batu gamping, batu sabak, kaolin, trass, diorite, andesit, marmer, oker, kalsit, dan panas bumi. Potensi pengembangan sirtu dan tanah urug berada di Kecamatan Pemalang (56 Ha), Kecamatan Bantarbolang 120 Ha, Kecamatan Bodeh (56 Ha), Kecamatan Ampelgading (50 Ha), Kecamatan Randudongkal (80 Ha), Kecamatan Watukumpul (13 Ha). Potensi bagan tambang lempung/tanah liat berada di Kecamatan Randudongkal (251 Ha), Kecamatan Bantarbolang (154 Ha), Kecamatan Watukumpul (351 Ha), Kecamatan Belik (162 Ha). Potensi bahan tambang batu gamping berada di Kecamatan Bantarbolang 150 Ha, dan Kecamatan Bodeh seluas 40 Ha. Potensi bahan tambang batu sabak terdapat di Kecamatan Belik sebesar 10 Ha. Potensi Kaolin berada di Kecamatan Watukumpul 63 ha, dan Kecamatan Moga 463 Ha. Potensi tambang trass berada di Kecamatan Belik seluas 17 Ha, dan Kecamatan Pulosari seluas 25,2 Ha. Potensi tambang diorite berada di Kecamatan Belik, dan Kecamatan Pulosari. Potensi bahan tambang andesit berada di Kecamatan Pulosari seluas 1.850 Ha, Kecamatan Belik seluas 83 Ha, Kecamatan Randudongkal 145 Ha. Potensi bahan tambang marmer berada di Kecamatan Bantarbolang seluas 0,02 Ha. Potensi bahan tambang oker di Kecamatan Warungpring seluas 90 Ha. Potensi bahan tambang kalsit seluas 0,02 Ha. Potensi bahan panas bumi di Kecamatan Pulosari seluas 4 Ha.

5) Kawasan Peruntukan Industri

Rencana kawasan industri di Kabupaten Pemalang seluas 40 ha dan pengembangan kawasan seluas 664 Ha. Rencana peruntukan industri sedang dikembangkan di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Comal. Rencana pengembangan industri sedang di Kecamatan Ampelgading, Ulujami, Petarukan, Belik, Randudongkal dan Kecamatan Moga.

6) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi Pengembangan Pariwisata Alam Berupa Kawasan Wisata Pantai Widuri, Kawasan Joko Tingkir, Kawasan Wisata Pantai Blendung, Kawasan Wisata Goa

Gunung Gajah, Kawasan Wisata Telaga Silating, Kawasan Wisata Wanawisata, Agrowisata PTP Semugih, Kawasan Wisata Telaga Rengganis, Bukit Banowati dan Jalur Pendakian Gunung Slamet. Pengembangan pariwisata budaya meliputi gelar upacara prosesi, upacara tradisi menjamas pusaka peninggalan Syeh Pandajati, Baritan, Krangkeng, Sintren, Jaran Kepang, Kuntulan, dan atraksi budaya lainnya. Rencana pengembangan pariwisata buatan meliputi kawasan wisata gardu pandang Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari dan berbagai wisata buatan yang tersebar.

7) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan masing-masing. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan.

8) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lahan lainnya berupa ruang terbuka hijau. Kabupaten Pemalang memiliki Rencana Ruang Terbuka Hijau Wilayah berupa DAS sebesar 30% dengan luas 33.459 Ha. Sementara itu ruang terbuka hijau kawasan perkotaan seluas 6.692 Ha.

b. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Pemalang terbagi atas :

1) Kawasan Hutan lindung

Rencana pengembangan kawasan hutan lindung merupakan Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Pemalang kurang lebih 5.082 Ha yang tersebar di 5 kecamatan antara lain Kecamatan Bantarbolang (53 Ha), Kecamatan Belik (1.095 Ha), Kecamatan Moga (195 Ha), Kecamatan Pulosari (2.036 Ha), Kecamatan Watukumpul (1.704 Ha).

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Luas Kawasan resapan air kurang lebih 6.609 Ha. Rencana pengembangan tersebar di Kecamatan Bantarbolang (480 Ha), Kecamatan Belik (2.669 Ha), Kecamatan Bodeh (200 Ha), Kecamatan Moga (327 Ha), Kecamatan Pulosari (180 Ha), Kecamatan Randudongkal (70 Ha), dan Kecamatan Watukumpul (2.514 Ha).

3) Kawasan Perlindungan Setempat

Rencana pengembangan kawasan Perlindungan setempat, terbagai atas :

a) Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pemalang meliputi Kecamatan Pemalang (12 Ha), Kecamatan Taman (13 Ha), Kecamatan Petarukan (19 Ha), dan Kecamatan Ulujami (29 Ha).

b) Sempadan sungai dan saluran irigasi

Kawasan sempadan sungai Kabupaten Pemalang meliputi Sungai Waluh beserta 15 anak sungainya, Sungai Rambut dengan 13 anak sungai dan Sungai Comal beserta 30 anak sungai. Sedangkan kawasan sempadan saluran irigasi meliputi 91 Daerah Irigasi yang terdapat di Kabupaten Pemalang.

c) Kawasan sekitar mata air

Kawasan sekitar mata air berada di Kecamatan Randudongkal sebanyak 16 sumber air, Kecamatan Belik sebanyak 9 sumber air, Kecamatan Moga sebanyak 23 sumber air, Kecamatan Warungpring sebanyak 15 sumber air, Kecamatan Pulosari sebanyak 7 sumber air, dan Kecamatan Bantar Bolang sebanyak 3 sumber air.

4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Rencana pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya terbagi atas :

a) Cagar alam

Cagar alam di Kabupaten Pemalang meliputi cagar alam Vak 53 di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 29,1 Ha; cagar alam Bantarbolang di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang dengan luas 24,5 Ha; Cagar alam Moga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga dengan luas 3,5 Ha, dan Cagar alam Curug Bengkawah di Desa Sikasur Kecamatan Belik seluas 1,5 Ha.

b) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Pemalang meliputi Situs Lawangrejo, Batu Bajul Putih, situs Tambaringin, Situs Sukmoninggal, Sukmajati, Sukmananggung, Situs Candi Lunggi, Punden Berundak, Gua Jepang, Kawasan Candi Batur, Batusari, dan Simodin.

c) Kawasan muara sungai (*estuary*)

Kawasan muara sungai berada di Kecamatan Pemalang dengan luas kurang lebih 8 Ha, Kecamatan Taman dengan luas kurang lebih 9 Ha, Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 10 Ha, dan Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 12 Ha.

d) Kawasan pantai berhutan bakau

Pengembangan pantai berhutan bakau berada di Kecamatan Pemalang 5 Ha, Kecamatan Petarukan 49 Ha, dan Kecamatan Ulujami dengan luas 379 Ha.

3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pemalang meliputi :

a. Kawasan rawan tanah longsor, terdapat di wilayah sebagai berikut:

- Kecamatan Watukumpul
- Kecamatan Belik
- Kecamatan Pulosari
- Kecamatan Moga
- Kecamatan Randudongkal
- sepanjang alur DAS Comal.

b. Kawasan rawan banjir, terdapat di wilayah sebagai berikut:

- Kecamatan Comal
- Kecamatan Pemalang
- Kecamatan Patarukan
- Kecamatan Taman
- Kecamatan Ulujami

c. Kawasan rawan letusan gunung berapi, terdapat di wilayah sebagai berikut :

- Kecamatan Pulosari
- Kecamatan Belik.

d. Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi, terdapat di wilayah sebagai berikut :

- Desa Lawangrejo, Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Widuri, dan Desa Danasari di Kecamatan Pemalang.
- Desa Asemdayong di Kecamatan Taman
- Desa Nyamplungsari, Desa Klareyan, dan Desa Kendalrejo di Kecamatan Petarukan

e. Kawasan rawan kekeringan, terdapat di wilayah sebagai berikut :

- Kawasan disekitar lereng Gunung Slamet meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Pulosari dan sebagian wilayah Kecamatan Belik
- Kawasan rawan kekeringan irigasi di lahan pertanian lahan basah sekitar jalan pantura.

f. Kawasan rawan angin topan, terdapat di wilayah sebagai berikut :

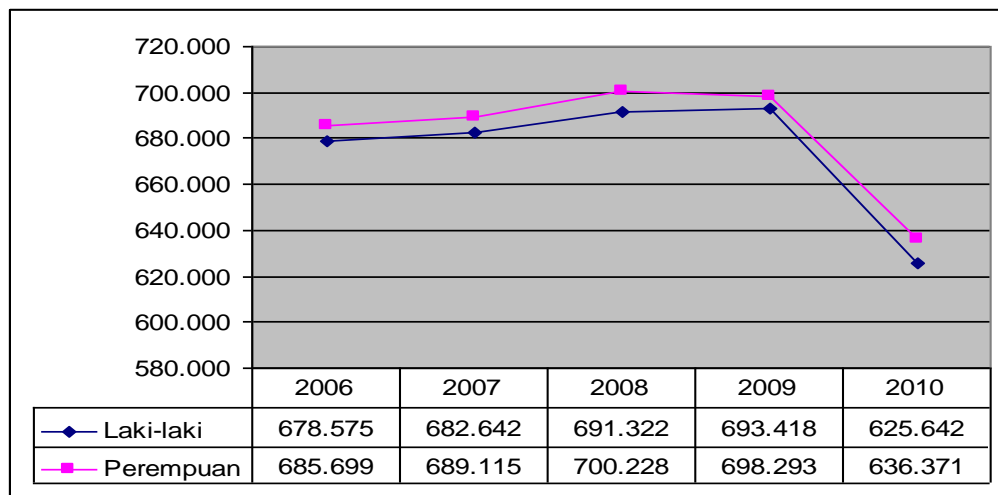
- Kecamatan Pulosari
- Kecamatan Belik
- Kecamatan Watukumpul
- Kecamatan Bodeh
- Kecamatan Moga

- Kecamatan Warungpring
- Kecamatan Randudongkal
- Kecamatan Ampelgading

4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi merupakan potensi pembangunan di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang sebanyak 1.262.013 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 625.642 jiwa (49,57%) dan perempuan sebanyak 636.371 jiwa (50,43%), lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya publikasi jumlah penduduk berdasarkan rekapitulasi hasil sampling. Pertumbuhan rata-rata penduduk selama lima tahun terakhir (2005–2009) rata-rata sebesar 0,11%, termasuk kategori pertumbuhan penduduk yang rendah. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di Jawa Tengah sebesar 0,92%. Diharapkan di tahun-tahun mendatang pertumbuhan penduduk akan mencapai pertumbuhan penduduk nol (*zero population growth*).

Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010



Sumber: Profil Kabupaten Pemalang

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang tahun 2010 sebesar 1.132 jiwa per km², lebih tinggi dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk di Jawa Tengah sebesar 995 jiwa per km². Pada umumnya di wilayah pusat-pusat aktivitas perekonomian daerah, seperti Kecamatan Pemalang, Petarukan, Ulujami, Taman dan Randudongkal jumlah penduduk lebih besar dibandingkan dengan wilayah *hinterland*. Kepadatan penduduk di wilayah perkotaan rata-rata sebesar 1.733 jiwa per Km² dan di wilayah perdesaan sebanyak 1.062 jiwa per km². Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010

| Tahun | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²) |
|-------|---------------------------------|------------------------|---|
| 2006 | 1.115,30 | 1.364.274 | 1.223 |
| 2007 | 1.115,30 | 1.371.757 | 1.230 |
| 2008 | 1.115,30 | 1.391.550 | 1.248 |
| 2009 | 1.115,30 | 1.391.711 | 1.248 |
| 2010 | 1.115,30 | 1.262.013 | 1.132 |

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang (2006-2010)

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Besarnya PDRB suatu daerah dapat menggambarkan kondisi perekonomian daerah pada umumnya, baik berdasarkan atas dasar berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000 (perhitungan telah dikurangi dengan besarnya inflasi setiap tahun). Selama periode 2006-2010 gambaran ekonomi Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan perkembangan yang bersifat positif. Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2005 sebesar Rp 5,178 trilyun meningkat menjadi sebesar Rp 8,066 trilyun pada tahun 2010. Besarnya PDRB Kabupaten Pemalang secara rinci dari tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

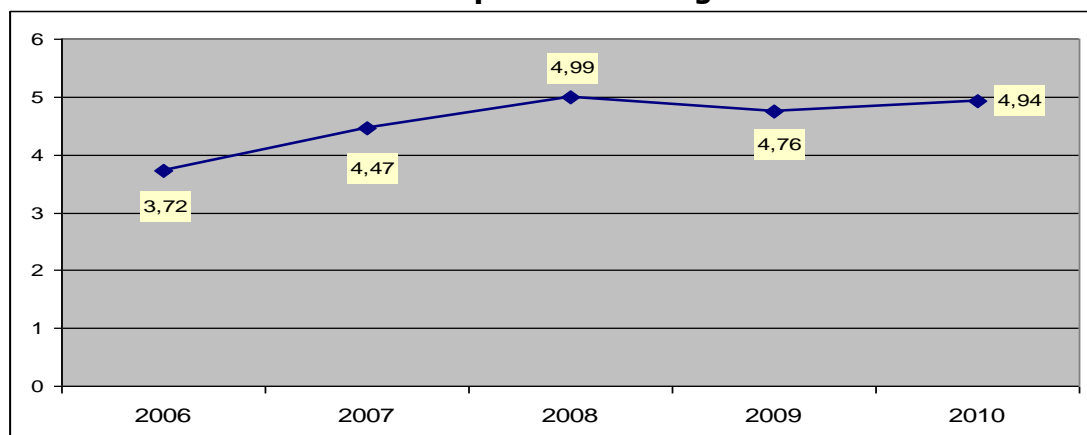
Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010

| Tahun | Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (juta Rp) | Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rp) |
|-------|---|------------------------------------|
| 2006 | 2.865.095,20 | 5.178.579,01 |
| 2007 | 2.993.296,76 | 5.776.983,88 |
| 2008 | 3.142.808,70 | 6.575.979,10 |
| 2009 | 3.293.056,25 | 7.170.678,83 |
| 2010 | 3.455.736,95 | 8.066.313,66 |

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang berkisar antara 3,72% hingga 4,94% dari tahun 2006-2010, termasuk pertumbuhan ekonomi yang moderat. Grafik pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2006 sebagai berikut :

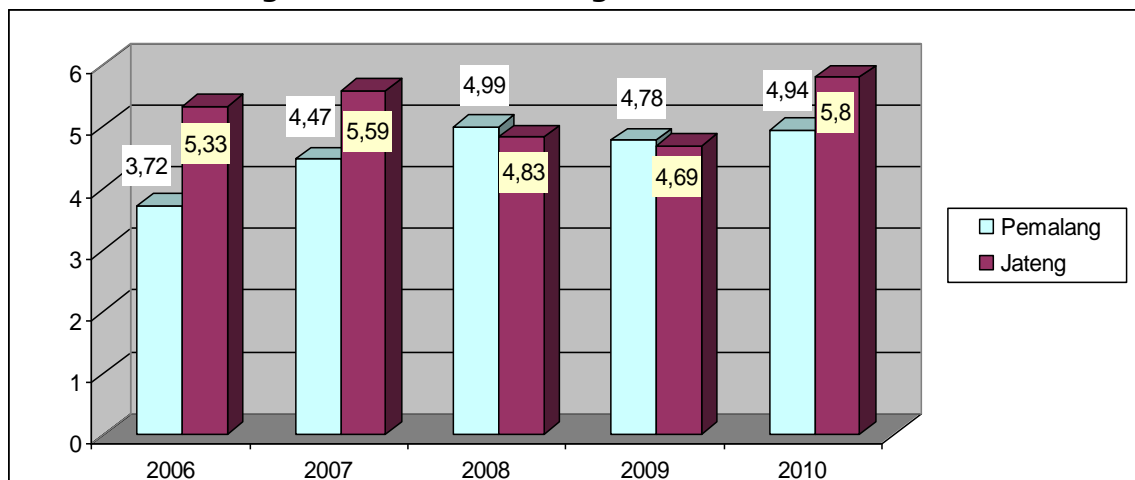
Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Apabila diperbandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,8% sedangkan Kabupaten Pemalang sebesar 4,94%. Secara rinci perbandingan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2006 – 2010 sebagai berikut :

Grafik 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang
dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2010



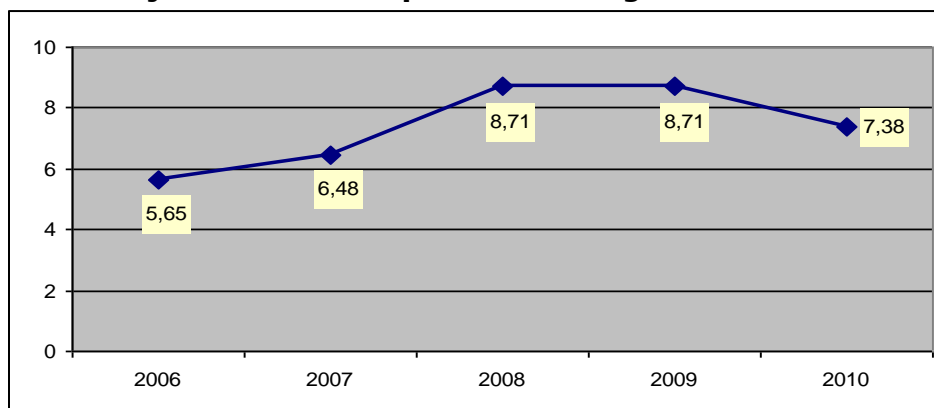
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang dari tahun 2006–2010 maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi selama waktu perencanaan akan berkisar antara 4,5 – 5,50%, termasuk pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini terutama didukung oleh meningkatnya iklim usaha yang semakin kondusif dan berkebangnya pertumbuhan sektor riil, stabilitas politik nasional semakin baik, menurunnya suku bunga kredit dan menguatnya nilai Rupiah terhadap valuta asing. Disisi lain, berlakunya kebijakan pasar bebas ASEAN (C-AFTA) dapat menjadi pendorong bagi meningkatnya sektor perdagangan skala kecil dan menengah, industri UMKM dan agroindustri di Kabupaten Pemalang.

b. Laju Inflasi

Besaran inflasi dan deflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian makro, apabila tingkat inflasi tinggi akan mempengaruhi daya beli konsumen. Sebaliknya jika nilai inflasi rendah atau bahkan terjadi deflasi maka akan dapat menimbulkan kondisi yang stagnan dalam perkembangan ekonomi dan bisa juga menyebabkan resesi ekonomi. Tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang dari tahun 2006 sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.4
Laju Inflasi di Kabupaten Pemalang 2006-2010



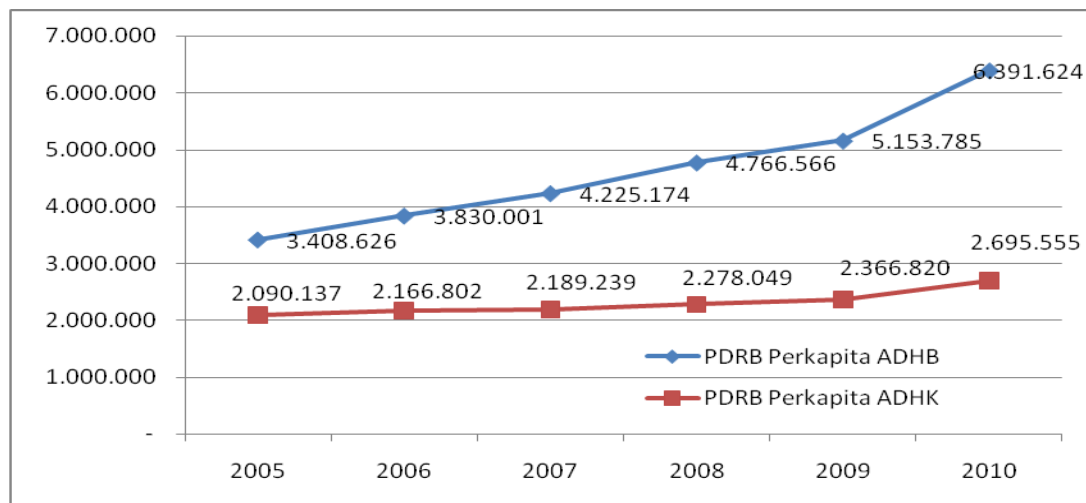
Sumber : BPS Kabupaten Pemalang (2006-2010)

c. PDRB per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Besarnya PDRB per kapita Kabupaten Pemalang dari tahun 2005 – 2010 (atas dasar harga berlaku) meningkat dari Rp 3.410.081,00 menjadi sebesar Rp. 6.391.624,00 pada tahun 2010, atau meningkat sebesar Rp. 2.981.543

selama lima tahun. Besarnya PDRB per kapita (atas dasar harga konstan 2000) tahun 2005 sebesar Rp 2.090.137,29 meningkat menjadi sebesar Rp 2.366.820,13 pada tahun 2009, atau meningkat sebesar 605.417,1 selama lima tahun. Pertumbuhan PDRB per kapita dari tahun 2005–2010 menunjukkan kondisi yang fluktuatif antara 3,67 - 3,9% untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000, dan cenderung menurun antara 12,36% - 8,12% untuk PDRB per kapita atas dasar berlaku. Perincian perkembangan RPDB per kapita Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Grafik 2.5
PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Berlaku Tahun 2005 – 2010



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang (2005-2009)

Rata-rata pengeluaran kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu empat tahun (2007-2010) menunjukkan peningkatan, yaitu dari sebesar Rp 636.910,00 per kapita per bulan pada tahun 2007, menjadi sebesar Rp.668.996,38 pada tahun 2008 dan tahun 2009, dan menjadi sebesar Rp 731.229,79 per kapita per bulan pada tahun 2010.

d. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan

Salah satu masalah yang penting dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan garis kemiskinan (*poverty line*) dari BPS ditetapkan tahun 2009 sebesar Rp 198.295,00 per kapita/bulan, dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita/bulan di bawah nilai tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang pada tahun 2005 berdasarkan indek garis kemiskinan sebesar Rp 128.309,00 per kapita/ bulan sebanyak 300.200 jiwa atau 22.59% dan tahun 2009 dengan garis kemiskinan sebesar Rp 198.295 per kapita/ bulan menurun menjadi sebesar 303.727 jiwa (22,17%) dari jumlah penduduk sebesar 1.391.284 jiwa. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Pemalang pada peringkat ke-17 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Proporsi penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dari tahun 2005–2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2009

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang) | Persentase Penduduk Miskin (%) | |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Pemalang | Jawa Tengah |
| 2005 | 128.309 | 300,2 | 22,59 | 20,49 |
| 2006 | 171.119 | 338,20 | 25,30 | 22,19 |
| 2007 | 160.105 | 307,10 | 22,79 | 20,43 |
| 2008 | 185.526 | 325,15 | 23,92 | 19,23 |
| 2009 | 198.295 | 303,72 | 22,17 | 17,72 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Pemalang (2006-2009).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dari tahun 2005 – 2009 berfluktuasi antara 22,17 – 25,30%, lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah (2009) sebesar 17,72%. Kondisi Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan kabupaten/kota disekitarnya dan Jawa Tengah dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten/Kota sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009

| No. | Wilayah | Persentase Penduduk Miskin (%) | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Kabupaten Brebes | 27,79 | 30,36 | 27,93 | 25,98 | 24,39 |
| 2 | Kabupaten Tegal | 19,60 | 20,71 | 18,50 | 15,78 | 13,98 |
| 3 | Kabupaten Pekalongan | 27,79 | 30,36 | 27,93 | 25,98 | 24,39 |
| 4 | Kabupaten Pemalang | 22,59 | 25,30 | 22,79 | 23,92 | 22,17 |
| 5 | Kota Tegal | 8,96 | 10,40 | 9,36 | 11,28 | 9,88 |
| 6 | Kota Pekalongan | 6,37 | 7,38 | 6,62 | 10,29 | 8,56 |
| Jawa Tengah | | 20,49 | 22,19 | 20,43 | 18,99 | 17,48 |

Sumber : Diolah dari data BPS (series).

Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tegal (13,98%), Kota Tegal (9,88%) dan Kota Pekalongan (8,56%), namun lebih rendah dari Kabupaten Brebes (24,39%) dan Kabupaten Pekalongan (24,39%).

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator agregat dari capaian peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan Kabupaten Pemalang. IPM Kabupaten Pemalang tahun 2009 sebesar 69,02 meningkat dari tahun 2008 sebesar 68,38. Kondisi tersebut masih lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah sebesar 72,10 dan menduduki peringkat 34 dari 35 kabupaten/kota. Peringkat tersebut tetap bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2008. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang tahun 2009 cenderung meningkat dalam empat tahun terakhir, dari sebesar 67,40 pada tahun 2006 menjadi sebesar 69,02 pada tahun 2009, atau meningkat 1,62 poin selama empat tahun, rata-rata setiap tahun meningkat 0,40 poin.

Jika dibandingkan Kabupaten disekitarnya, IPM Kabupaten Pemalang lebih tinggi dari Kabupaten Brebes, namun masih dibawah kabupaten/kota yang lain dan dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (72,90). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pemalang Dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2006 – 2009

| Wilayah | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | Ranking ke-di Jawa Tengah | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| 1. Kabupaten Brebes | 65,90 | 66,57 | 67,08 | 67,69 | 35 | 35 |
| 2. Kabupaten Tegal | 67,80 | 68,83 | 69,54 | 70,08 | 30 | 29 |
| 3. Kabupaten Pekalongan | 69,40 | 69,69 | 70,31 | 70,83 | 23 | 23 |
| 4. Kabupaten Pemalang | 67,40 | 67,89 | 68,38 | 69,02 | 34 | 34 |
| 5. Kota Tegal | 72,40 | 72,72 | 73,20 | 73,63 | 8 | 8 |
| 6. Kota Pekalongan | 72,50 | 73,10 | 73,49 | 74,01 | 5 | 5 |
| Jawa Tengah | 70,30 | 70,92 | 71,60 | 72,90 | - | - |

Sumber : IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 – 2009.

f. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat terkait erat dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tingkat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG). Di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2004 – 2008 angka IPG menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya IPG tahun 2004 sebesar 56,8 meningkat menjadi 61,8 pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 5,0 selama lima tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dari aspek kesetaraan gender mengalami peningkatan, terutama meningkatnya pendidikan, angka melek huruf. Walaupun demikian, pencapaian tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. IPG Kabupaten Pemalang menduduki ranking 32 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rendahnya IPG di Kabupaten Pemalang menunjukkan masih adanya kesenjangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci kondisi IPG di Kabupaten pemalang dibandingkan kabupaten/kota disekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Perbandingan Angka IPG Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008

| No. | Wilayah | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Kabupaten Brebes | 46,9 | 48,0 | 50,2 | 52,8 | 53,6 |
| 2 | Kabupaten Tegal | 52,8 | 53,7 | 56,8 | 57,9 | 58,5 |
| 3 | Kabupaten Pekalongan | 50,3 | 51,8 | 52,6 | 55,4 | 55,8 |
| 4 | Kabupaten Pemalang | 56,8 | 58,3 | 60,5 | 61,4 | 61,8 |
| 5 | Kota Tegal | 56,9 | 58,2 | 59,3 | 61,1 | 61,7 |
| 6 | Kota Pekalongan | 57,4 | 57,9 | 59,6 | 61,5 | 62,4 |
| | Jawa Tengah | 59,8 | 60,8 | 63,7 | 64,3 | 64,6 |

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2006-2007, BPS-Kepmen PP

Tabel diatas menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Pemalang tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Brebes (53,6), Kabupaten Tegal (58,5) dan Kabupaten Pekalongan (55,8) namun lebih rendah dari Kota Tegal (61,7) dan Kota Pekalongan (62,4).

g. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk mengetahui keberdayaan perempuan, dengan tolok ukur meliputi banyaknya jumlah angkatan kerja perempuan, tenaga kerja perempuan yang bekerja dalam bidang teknis dan manajemen dan keterwakilan perempuan di legislatif. Selama kurun waktu 2004-2008 IDG Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun termasuk kategori moderat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang relatif cukup baik. Pada tahun 2004 IDG Kabupaten Pemalang sebesar 54,6 meningkat menjadi 56,2 pada tahun 2007. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, Kabupaten Pemalang menduduki peringkat keempat, namun masih berada dibawah Provinsi Jawa Tengah (59,7). IDG Kabupaten Pemalang pada tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pekalongan (53,7) dan Kota Tegal (54,1) namun masih lebih rendah daripada Kabupaten Brebes (61,7), Kabupaten Tegal (58,3) dan Kota Pekalongan (62,7) dan rata-rata Jawa Tengah (59,7). Secara rinci perbandingan IDG Kabupaten Pemalang dengan kabupaten/kota di sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Perbandingan Angka IDG Kabupaten Pemalang dengan kabupaten/kota sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008

| No. | Wilayah | IDG (th) | | | | |
|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Kabupaten Brebes | 57,7 | 58,3 | 61,2 | 61,5 | 61,7 |
| 2 | Kabupaten Tegal | 56,4 | 56,6 | 56,9 | 58,0 | 58,3 |
| 3 | Kabupaten Pekalongan | 52,3 | 50,8 | 51,8 | 53,7 | 53,7 |
| 4 | Kabupaten Pemalang | 54,6 | 54,0 | 55,5 | 56,2 | 56,9 |
| 5 | Kota Tegal | 53,6 | 52,7 | 53,1 | 54,1 | 54,1 |
| 6 | Kota Pekalongan | 61,2 | 60,9 | 61,8 | 61,8 | 62,7 |
| | Jawa Tengah | 56,5 | 56,9 | 59,3 | 59,7 | 59,7 |

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2006-2007, BPS-Kepmen PP

Perlu dukungan kebijakan peningkatan IPG dan IDG di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang, hal ini sangat strategis dalam rangka peningkatan kualitas SDM kaum perempuan yang jumlahnya lebih dari 50% penduduk Kabupaten Pemalang dan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain dalam peningkatan kesetaraan dan kesetaraan gender, terutama di Kabupaten Pemalang selalu berada di ranking bawah (antara 31 – 33 dari 35 kabupaten/kota) di Jawa Tengah selama ini.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Ada beberapa unsur dalam menggambarkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Pemalang, diantaranya yaitu capaian komposit IPM, APK, APM, AKI, Angka kematian bayi, angka kematian balita, tingkat kepemilikan lahan, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk usia kerja yang bekerja.

Jika dilihat dari komponen pembentuk IPM, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pemalang tahun 2007 - 2009 mengalami peningkatan, dari 66,97 tahun menjadi 67,46 tahun, hal ini menunjukkan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Pemalang meningkat. Rata-rata kenaikan UHH bertambah sebesar 0,50 tahun. Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2007 sebesar 87,34% meningkat menjadi 87,75% ditahun 2009 atau meningkat sebesar 0,41. Sementara untuk rata-rata lama sekolah yakni 6,1 tahun ditahun 2007 menjadi sebesar 6,49 tahun atau secara rata-rata penduduk Kabupaten Pemalang usia 15 tahun keatas berpendidikan setingkat kelas satu SMP (kelas 7). Secara umum daya beli penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2009 tidak mengalami peningkatan berarti, bila dilihat dari sisi pengeluaran per kapita, yakni dari Rp 628.000,00 menjadi Rp 634.260,00. Daya beli masyarakat/penduduk disuatu wilayah, angka ideal setiap tahun mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi. Data capaian indikator pembentuk IPM selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Perbandingan Pembentuk IPM Kabupaten Pemalang dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2007 – 2009

| No. | Wilayah | Angka Harapan Hidup (Th) | | | Angka Melek Huruf (%) | | | Rata-rata lama sekolah (th) | | | Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp) | | |
|-----|--------------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------------------|------|------|--|---------|---------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Kab. Brebes | 66,75 | 67,08 | 67,37 | 84,85 | 84,85 | 85,21 | 5,50 | 5,50 | 5,62 | 625,37 | 629,64 | 633,23 |
| 2. | Kabupaten Tegal | 67,86 | 68,19 | 68,49 | 88,46 | 89,09 | 89,21 | 6,20 | 6,24 | 6,42 | 629,67 | 634,24 | 637,09 |
| 3. | Kab. Pekalongan | 68,13 | 68,45 | 68,37 | 89,39 | 89,94 | 90,60 | 6,50 | 6,50 | 6,66 | 633,17 | 637,47 | 638,79 |
| 4. | Kab. Pemalang | 66,97 | 67,24 | 67,46 | 87,34 | 87,34 | 87,75 | 6,10 | 6,10 | 6,49 | 628,00 | 632,39 | 634,26 |
| 5. | Kota Tegal | 68,14 | 68,37 | 68,56 | 94,87 | 94,87 | 94,88 | 8,06 | 8,06 | 8,25 | 641,73 | 646,30 | 648,66 |
| 6. | Kota Pekalongan | 69,80 | 70,01 | 70,16 | 95,37 | 95,37 | 95,48 | 8,52 | 8,52 | 8,66 | 628,79 | 632,38 | 636,28 |
| | Jawa Tengah | 70,90 | 71,10 | 71,25 | 88,62 | 89,24 | 89,46 | 6,80 | 6,86 | 7,07 | 628.530 | 633.590 | 636.390 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2007 – 2009)

Perkembangan capaian bidang kesehatan antara lain dilihat dari angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Capaian ketiga unsur tersebut di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9
Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kab. Pemalang Tahun 2006-2010

| No | Indikator | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010*) |
|----|-----------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|
| 1 | Angka kematian ibu | Per 100.000 KH | 159 | 153 | 109 | 197 | 193 |
| 2 | Angka kematian bayi | Per 1000 KH | 9,38 | 7,37 | 8,38 | 11,24 | 12,27 |
| 3 | Angka kematian balita | Per 1000 KH | 10,8 | 8,5 | 9 | 12,3 | 12,5 |

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan proporsi angkatan kerja terhadap angkatan kerja yaitu kelompok penduduk yang berusia > 15 tahun yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang

tahun 2009 yang berusia > 15 tahun sebanyak 1.000.214 orang, terdiri dari angkatan kerja sebanyak 647.167 orang (64,47%) dan bukan angkatan kerja sebanyak 353.047 orang (35,53%). Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang sebesar 7,87% pada tahun 2005 terus meningkat menjadi 12,26% pada tahun 2009, termasuk cukup tinggi. Permasalahan lain dalam ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2009 adalah banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian 192.773 orang dan bekerja di sektor perdagangan sebesar 137.969 orang, terutama perdagangan kecil dan menengah.

Gambaran jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pemalang tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Angkatan Kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Pemalang
Tahun 2005 - 2009

| Tahun | Jumlah Angkatan Kerja (orang) | TPAK (%) | TPT (%) |
|-------|-------------------------------|----------|---------|
| 2005 | 907.339 | 66,44 | 7,87 |
| 2006 | 912.470 | 65,34 | 8,56 |
| 2007 | 981.289 | 64,55 | 8,53 |
| 2008 | 935.168 | 61,59 | 9,97 |
| 2009 | 647.167 | 64,74 | 12,26 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2005-2009)

Jika dibandingkan kabupaten/kota sekitarnya terkait dengan TPT tahun 2007 – 2009 diketahui sebagai berikut :

Tabel 2.11
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang
Dengan Kabupaten/Kota sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007 – 2009

| No | Wilayah | TPT (%) | | |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Kabupaten Brebes | 9,01 | 7,92 | 9,42 |
| 2 | Kabupaten Tegal | 9,38 | 9,56 | 9,24 |
| 3 | Kabupaten Pekalongan | 7,93 | 7,38 | 4,18 |
| 4 | Kabupaten Pemalang | 8,53 | 9,97 | 12,26 |
| 5 | Kota Tegal | 14,15 | 13,32 | 15,74 |
| 6 | Kota Pekalongan | 9,64 | 9,75 | 8,61 |
| Jawa Tengah | | 7,70 | 7,35 | 7,33 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2007-2009)

Kondisi TPT Kabupaten Pemalang lebih baik dari Kota Tegal (15,74%), namun tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi daripada Kabupaten Brebes (9,42%), Kabupaten Tegal (9,24%), Kabupaten Pekalongan (4,18) dan Kota Pekalongan (8,61%).

C. Aspek Pelayanan Umum

1. Pelayanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pemalang tidak lepas dari pembangunan pendidikan tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bagian dari pembangunan pendidikan tingkat nasional dan provinsi, pembangunan pendidikan di Kabupaten Pemalang harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah yaitu RPJMN tahun 2009 – 2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dalam RPJMN tantangan pendidikan yang harus dihadapi sampai dengan tahun 2014 adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang

rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan. Arah kebijakan dalam RPJMN adalah meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pendidikan.

Renstra Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan Ketersediaan pelayanan pendidikan merata seluruh nusantara; pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan dunia usaha dan dunia industri; pelayanan pendidikan yang setara bagi warga Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya ekonomi, geografi dan gender; dan pelayanan pendidikan yang menjamin kepastian bagi warga Negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dunia usaha dan dunia industri. Kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan 5 K yaitu (ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian).

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Indikator capaian pembangunan pendidikan tahun 2014 khusus untuk PAUD dan pendidikan dasar adalah sebagai berikut: pada tahun 2014 APK PAUD Jawa Tengah sebesar 50% dan APM SD sebesar 99%; pendidikan kecakapan hidup targetnya adalah pemuda dan masyarakat putus sekolah mengikuti pendidikan kecakapan hidup mencapai 70%, dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 100% penduduk Jawa Tengah melek huruf; APK PAUD dan APM SD sama seperti target dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah; Mutu pendidikan ditargetkan pada tahun 2014 angka lulus UASBN SD mencapai 99,75%; pendidikan kecakapan hidup ditargetkan sebesar 70% pemuda dan masyarakat putus sekolah mengikuti pendidikan kecakapan hidup.

Secara umum tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori rendah (setara dengan lulus sekolah dasar). Hal ini ditunjukkan dengan besarnya jumlah penduduk yang berpendidikan Sekolah Dasar (31,27%). Jumlah penduduk yang Belum Sekolah, Tidak sekolah, Tidak Tamat SD dan Belum Tamat SD juga masih sangat banyak. Lebih rinci, gambaran tentang tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
di Kabupaten Pemalang Tahun 2010

| No | Tingkat Pendidikan | Banyaknya Penduduk (jiwa) | Persentase (%) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Belum Sekolah | 166.905 | 12,34 |
| 2. | Tidak sekolah | 218.546 | 16,16 |
| 2. | Tidak Tamat SD | 129.160 | 9,55 |
| 3. | Belum tamat SD | 197.813 | 14,63 |
| 4. | Tamat SD | 422.926 | 31,27 |
| 5. | SLTP | 110.450 | 8,17 |
| 6. | SLTA | 86.929 | 6,43 |
| 7. | Perguruan Tinggi/ Akademi | 19.710 | 1,46 |
| Jumlah | | 1.352.440 | 100,00 |

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang (2010)

1) Gambaran Pelayanan PAUD

a) Ketersediaan

Jumlah TK di Kabupaten Pemalang pada tahun 2006 – 2010 cenderung meningkat walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Jumlah TK pada tahun 2005 sebesar 277 unit, pada tahun 2010 meningkat menjadi 307 unit. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut jumlah TK

meningkat rata-rata 3 unit per tahun. Jumlah murid TK pada tahun 2006 – 2010 fluktuatif. Jumlah murid TK mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 72,25% dari tahun sebelumnya. Jumlah guru TK pada tahun 2009 sebesar 1.096 orang dan jumlah guru TK pada tahun 2008 sebesar 640 orang. Jumlah murid TK pada tahun 2006 – 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah murid TK pada tahun 2006 sebesar 12.610 orang meningkat menjadi 15.998 pada tahun 2010. Rincian pertumbuhan jumlah TK, murid TK, guru TK terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Pertumbuhan Jumlah TK, Murid TK dan Guru TK
Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010

| Tahun | Jumlah TK (unit) | r (%) | Jumlah Murid (orang) | r (%) | Jumlah Guru (orang) | r (%) |
|-------|------------------|-------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| 2006 | 277 | -4,48 | 12.610 | -13,91 | 653 | 2,03 |
| 2007 | 289 | 4,33 | 13.194 | 4,63 | 783 | 19,91 |
| 2008 | 290 | 0,35 | 14.647 | 11,01 | 640 | -18,26 |
| 2009 | 301 | 3,79 | 14.245 | -2,74 | 1.096 | 71,25 |
| 2010 | 307 | 1,99 | 15.998 | 12,31 | 881 | -19,62 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Rasio guru terhadap murid TK selama kurun waktu 2005 – 2010 fluktuatif. Rasio guru terhadap murid pada tahun 2006 sebesar 1 : 19 orang dan pada tahun 2010 sebesar 1 : 18. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru TK semakin baik dan cukup memadai. Rasio guru terhadap murid tingkat TK terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid TK Tahun 2005 – 2010

| Tahun | Rasio Guru thd Murid (1 dibanding :) |
|-------|--|
| 2006 | 19 |
| 2007 | 17 |
| 2008 | 23 |
| 2009 | 13 |
| 2010 | 18 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2006-2010)

b) Kualitas

Persentase PAUD sesuai standar pada tahun 2010 sebesar 24,34%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebesar 22,11%. Jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2010 sebesar 29,12% lebih tinggi daripada tahun 2009 sebesar 27,47%.

2) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar

a) Ketersediaan

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan dasar di kabupaten Pemalang relatif memadai. Jumlah SD di Kabupaten Pemalang sebanyak 779 unit pada tahun 2010. kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2005. Jumlah SD pada tahun 2005 sebesar 771 unit. Jumlah murid SD/MI selama kurun waktu 2005 – 2010 fluktuatif. Jumlah Murid SD/MI tahun 2010 sebesar 191.670 orang dan jumlah guru sebesar 5.441 orang. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 167.238 orang dan jumlah guru sebesar 6.832 orang. Pertumbuhan jumlah sekolah, murid dan guru SD/MI terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15
Pertumbuhan Jumlah SD/MI, Murid SD/MI dan Guru SD/MI
Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010

| Tahun | SD | r | Jumlah Murid | r | Jumlah Guru | r |
|-------|-----|--------|--------------|---------|-------------|---------|
| 2005 | 771 | | 169.354 | | 5.546 | |
| 2006 | 771 | 0,00% | 169.958 | 0,36% | 5.873 | 5,90% |
| 2007 | 807 | 4,67% | 179.995 | 5,91% | 6.172 | 5,09% |
| 2008 | 807 | 0,00% | 155577 | -13,57% | 6.172 | 0,00% |
| 2009 | 783 | -2,97% | 167.238 | 7,50% | 6.832 | 10,69% |
| 2010 | 779 | -0,51% | 161.970 | -3,15% | 5.411 | -20,80% |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

Jumlah SMP/MTs di Kabupaten Pemalang sebanyak 116 unit pada tahun 2010, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebanyak 105 unit. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah SMP/MTs di Kabupaten Pemalang cukup tinggi. Jumlah murid dan guru selama kurun waktu 2005 – 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010 jumlah murid SMP/MTs sebanyak 62.008 orang dan jumlah guru sebanyak 3.235 orang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 61.698 orang dan jumlah guru sebanyak 2.921 orang. Secara lebih detail perkembangan jumlah sekolah, murid dan guru SMP/MTs terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.16
Pertumbuhan Jumlah SMP/MTs, Murid SMP/MTs dan Guru SMP/MTs
Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010

| Tahun | SMP | r | Jumlah Murid | R | Jumlah Guru | r |
|-------|-----|--------|--------------|-------|-------------|--------|
| 2005 | 89 | | 44.389 | | 2.227 | |
| 2006 | 89 | 0,00% | 45.035 | 1,46% | 2.389 | 7,27% |
| 2007 | 89 | 0,00% | 45.374 | 0,75% | 2.333 | -2,34% |
| 2008 | 89 | 0,00% | 47.383 | 4,43% | 2.333 | 0,00% |
| 2009 | 105 | 17,98% | 48.488 | 2,33% | 2.324 | -0,39% |
| 2010 | 102 | -2,86% | 52.208 | 7,67% | 2.819 | 21,30% |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

Secara kuantitatif jumlah guru relatif memadai, baik pada jenjang pendidikan SD/MI, yaitu seorang guru membina 25 - 30 orang murid, maupun pada jenjang SMP/MTs. Namun demikian apabila dilihat persebaran guru, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang terlihat beberapa wilayah yang mengalami kekurangan guru, sebaliknya pada beberapa wilayah terjadi kelebihan guru. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010

| Tahun | SD/MI (1 dibanding : | SMP/MTs (1 dibanding ..) |
|-------|----------------------------|--------------------------|
| 2005 | 31 | 20 |
| 2006 | 30 | 22 |
| 2007 | 25 | 20 |
| 2008 | 31 | 20 |
| 2009 | 25 | 22 |
| 2010 | 26 | 21 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

b) Keterjangkauan

Angka partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator keterjangkauan. Semakin tinggi APK maka semakin tinggi pula tingkat keterjangkauan pelayanan pendidikan di mata masyarakat. Selama kurun waktu 2005 – 2010 APK SD/MI di kabupaten Pemalang cenderung meningkat. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, APK juga cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan SD dan SMP cukup besar. Secara detail gambaran perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pemalang
Tahun 2005 – 2010

| Tahun | SD | r (%) | SMP | r (%) |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| 2005 | 104,85 | | 73,42 | |
| 2006 | 105,28 | 0,43 | 74,84 | 1,42 |
| 2007 | 122,06 | 16,78 | 77,49 | 2,65 |
| 2008 | 114,84 | -7,22 | 92,58 | 15,09 |
| 2009 | 121,01 | 6,17 | 96,02 | 3,44 |
| 2010 | 120,77 | -0,24 | 102,80 | 6,78 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini berarti bahwa pelayanan pendidikan dasar semakin terjangkau oleh masyarakat. Perkembangan Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan dasar secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pemalang
Tahun 2005 – 2010 (%)

| Tahun | SD | r (%) | SMP | r (%) |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2005 | 89,64 | | 55,02 | |
| 2006 | 93,67 | 4,03 | 57,48 | 2,46 |
| 2007 | 101,68 | 8,01 | 58,56 | 1,08 |
| 2008 | 95,98 | -5,70 | 68,03 | 9,47 |
| 2009 | 97,27 | 1,29 | 77,57 | 9,54 |
| 2010 | 107,14 | 9,87 | 75,28 | -2,29 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

Angka putus sekolah untuk jenjang SD pada tahun 2009 sebesar 0,03% dari jumlah murid, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka putus sekolah sebesar 0,78%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target angka putus sekolah tingkat nasional dan provinsi pada tahun 2014 sebesar 0,12% untuk jenjang SD dan 0,22% untuk jenjang SMP.

c) Kualitas

Guru layak mengajar untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2007 sebesar 68,09% dan pada tahun 2008 naik menjadi 75,94%. Dengan demikian kualifikasi guru layak mengajar meningkat menjadi lebih baik. Pada jenjang SMP/MTs persentase guru layak mengajar pada tahun 2007 sebesar 81,53% pada tahun 2008 meningkat menjadi 87,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas guru SD maupun SMP masih belum optimal.

Angka kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)

untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2005 – 2010 fluktuatif berkisar antara 90,40% – 99,79%. Pada jenjang SMP/MTs angka kelulusan lebih baik dibandingkan dengan SD/MI, yaitu 99,98% pada tahun 2009 atau hampir mencapai 100%. Perkembangan angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20
Angka Kelulusan UASBN SD/MI dan UN SMP/MTs
Kabupaten Pemalang 2005 – 2010

| Tahun | SD / MI (%) | SMP / MTs (%) |
|-------|---------------|-----------------|
| 2005 | 97,78 | 95,47 |
| 2006 | 93,59 | 98,94 |
| 2007 | 93,59 | 91,94 |
| 2008 | 99,72 | 91,94 |
| 2009 | 99,79 | 99,42 |
| 2010 | 90,40 | 99,64 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

3) Gambaran Pelayanan Pendidikan Menengah

a) Ketersediaan

Selama kurun waktu 2005 – 2010 jumlah sekolah SMA/MA/SMK di Kabupaten Pemalang cenderung konstan yaitu sebanyak 27 unit. Jumlah murid SMA/MA/SMK selama kurun waktu yang sama fluktuatif, sedangkan jumlah guru cenderung meningkat. Perkembangan jumlah sekolah, murid dan guru SMA/MA/SMK terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Pertumbuhan Jumlah, Murid dan Guru SMA/MA/SMK
Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2009 (Orang)

| Tahun | SMA | r (%) | Jumlah Murid | r (%) | Jumlah Guru | r (%) |
|-------|-----|--------|--------------|--------|-------------|-------|
| 2005 | 27 | | 18.087 | | 961 | |
| 2006 | 27 | 62,96 | 15.082 | -16,61 | 911 | -5,20 |
| 2007 | 27 | 2,27 | 15.786 | 4,67 | 948 | 4,06 |
| 2008 | 27 | -40,00 | 18.087 | 14,58 | 961 | 1,37 |
| 2009 | 27 | 0,00 | 18.192 | 0,58 | 1.022 | 6,35 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

Rasio guru terhadap murid selama kurun waktu 2005 – 2010 fluktuatif. Walaupun demikian ketersediaan guru SMA/SMK/MA di Kabupaten Pemalang mencukupi. Secara rinci rasio guru terhadap murid terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid SMA/MA/SMK
Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010

| Tahun | Rasio Guru thd Murid (1 dibanding :) |
|-------|--------------------------------------|
| 2005 | 20 |
| 2006 | 17 |
| 2007 | 17 |
| 2008 | 20 |
| 2009 | 20 |
| 2010 | 17 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

b) Keterjangkauan

Salah satu indikator keterjangkauan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA. APK SMA/SMK/MA selama kurun waktu 2005 – 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010 APK SMA/SMK/MA sebesar 55,22%, meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 48,81%. Angka tersebut menunjukkan bahwa keterjangkauan masyarakat untuk sekolah di SMA/SMK/MA masih rendah. Belum ada separoh dari penduduk usia 16 – 18 yang menikmati pendidikan SMA/SMK/MA. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan. APM SMA/SMK/MA pada tahun 2010 sebesar 45,70%, meningkat dibandingkan tahun 2009. Walaupun demikian, nilai APM SMA/SMK/MA termasuk kategori rendah, karena masih di bawah 50%.

Perkembangan APK dan APM SMA/SMK/MA secara rinci terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Perkembangan APK SMA/SMK/MA Kab. Pemalang Tahun 2005–2010

| Tahun | APK (%) | APM (%) |
|-------|-----------|-----------|
| 2005 | 30,56 | 23,19 |
| 2006 | 30,73 | 24,79 |
| 2007 | 37,70 | 27,37 |
| 2008 | 42,86 | 31,11 |
| 2009 | 48,81 | 38,40 |
| 2010 | 55,22 | 45,70 |

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pemalang (2005-2010)

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Pemalang tahun 2010 relatif rendah yaitu 0,63% dibandingkan dengan seluruh murid SMA/SMK/MA. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan menyekolahkan anak di tingkat SMA cukup baik.

c) Kualitas

Kualitas pelayanan pendidikan menengah dilihat dari kualitas guru atau pendidik. Kualitas guru salah satunya dilihat dari aspek kelayakan mengajar. Sebagaimana ketentuan dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pendidik adalah berpendidikan S1 atau D IV. Jumlah guru layak mengajar pada SMA/SMK/MA pada tahun 2007 sebesar 79,02% meningkat dibandingkan tahun 2006 yaitu sebesar 75,53%.

b. Kesehatan

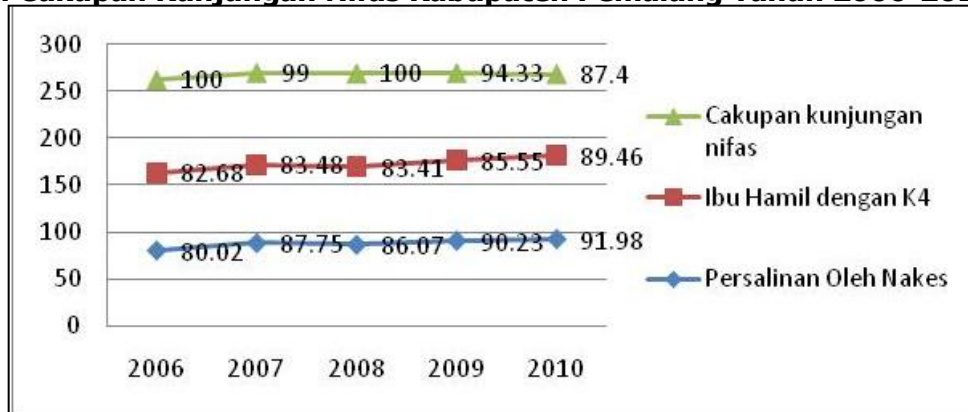
Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dari tahun 2007–2009. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2007 Usia Harapan Hidup Masyarakat Pemalang sebesar 66,97 tahun meningkat menjadi 67,24 tahun pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2009 meningkat menjadi 67,46.

Penanganan kesehatan rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat miskin selama ini dilaksanakan melalui alokasi jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Alokasi jumlah penduduk yang memperoleh Jamkesmas ditentukan oleh keputusan Kementerian Kesehatan, sedangkan bagi masyarakat miskin yang tidak tertangani melalui Jamkesmas ditampung melalui keputusan Bupati Pemalang dalam program Jamkesda yang alokasi anggarannya melekat pada SKPD Dinas Kesehatan dan RSUD Daerah Dr. M. Ashari.

Angka kematian ibu (AKI) dari tahun 2006 – 2010 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2006 AKI Kabupaten Pemalang sebesar 159 per 100.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2010 menjadi 193 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari tahun 2006–2010 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 80,02% meningkat menjadi 91,98% pada

tahun 2010. Kondisi ini belum sesuai dengan target SPM Kesehatan. Sementara itu cakupan ibu hamil dengan K4 dan cakupan kunjungan pada saat nifas relatif mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2009 namun pada tahun 2010 mengalami penurunan. Cakupan ibu hamil dengan K4 pada tahun 2006 sebesar 82,68% meningkat pada tahun 2010 menjadi 89,46%. Cakupan kunjungan ibu nifas pada tahun 2010 sebesar 87,40% menurun dibandingkan tahun 2006 yaitu 100%.

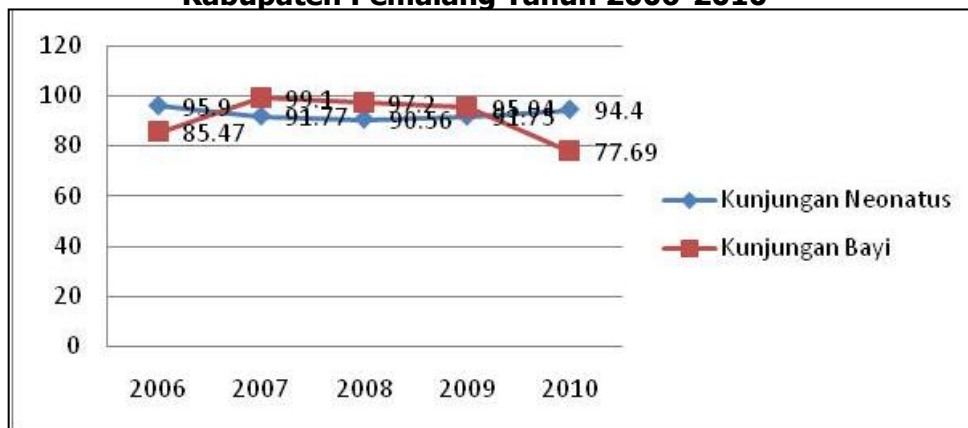
Grafik 2.6
Cakupan kunjungan ibu Hamil K4, Cakupan Persalinan oleh Nakes dan Cakupan Kunjungan Nifas Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Kondisi kesehatan bayi di Kabupaten Pemalang masih belum baik. Hal ini dapat dilihat dari angka kematian bayi dan balita dari tahun 2006 – 2010 cenderung mengalami peningkatan. AKB di Kabupaten Pemalang pada tahun 2006 sebesar 9,38 per 1.000 meningkat pada tahun 2010 menjadi 12,27 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu cakupan kunjungan bayi dari tahun 2006 – 2010 mengalami penurunan pada tahun 2005 cakupan kunjungan bayi sebesar 85,47% turun pada tahun 2010 menjadi 77,69%. Cakupan kunjungan neonates mengalami penurunan, pada tahun 2006 sebesar 95,9% turun pada tahun 2010 menjadi 94,4% pada tahun 2010.

Grafik 2.7
Cakupan Kunjungan Bayi dan Kunjungan Neonatus Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Kondisi gizi pada balita dari tahun 2006-2010 cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya persentase gizi buruk dan gizi kurang. Pada tahun 2006 persentase gizi buruk sebesar 2% menurun hingga 0,04% pada tahun 2010. Pada tahun 2006 persentase balita dengan gizi kurang sebesar 16% menurun menjadi 6% pada tahun 2009. Namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai, karena persentase balita dengan berat badan dibawah garis (BGM) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 persentase Balita dengan BGM sebesar 0,95%, meningkat pada tahun 2009 menjadi 1,33%. Kondisi Balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari tahun 2006 – 2010 mengalami penurunan. Pada tahun 2006 Balita gizi buruk yang mendapat

perawatan sebesar 59,06% turun pada tahun 2010 menjadi 32,4%. Kondisi ini jauh dibawah target SPM (100%).

Penyakit menular di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan terutama kasus TB Paru, DBD, Kusta dan Diare. Perkiraan kasus baru TB paru di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 sebesar 1.315/100.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 57% dan persentase kasus TB yang dapat disembuhkan dengan strategi DOTS sebesar 89%. Angka kejadian TB Paru pada tahun 2015 akan turun sesuai dengan target Jawa Tengah (88 per 100.000 penduduk), jika angka penemuan kasus baru lebih dari 70% dan kesembuhan >85%

Prevalensi kasus HIV di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 sebesar 0,04% dari total penduduk. Dalam rangka mengendalikan penyebaran HIV/AIDS perlu upaya penemuan dini kasus ini di masyarakat mengingat kasus ini seperti fenomena gunung es. Jumlah penderita HIV AIDs Pemalang dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 sebesar 30 orang, dengan rincian 13 kasus AIDs dan 17 HIV. Kabupaten Pemalang merupakan Kabupaten yang penderita HIV AIDs relatif rendah dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain. Namun demikian, kondisi ini perlu diwaspadai, karena Kabupaten Pemalang merupakan daerah transit di jalan Pantura dan memiliki titik-titik rawan yaitu daerah yang merupakan pangkalan truk sebagai daerah transaksi seks, dan ada kecenderungan meningkat.

Angka penemuan kasus malaria di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 sebesar 0,005 per 1.000 penduduk. Kabupaten Pemalang bukan merupakan daerah endemis malaria. Angka kesakitan DBD di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 sebesar 11,8 / 100.000 penduduk dan angka kematian DBD sebesar 4,49 %.

Jumlah kasus penyakit menular yang meningkat terutama DBD, TB Paru dan Diare disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sehat. Berdasarkan data dinas kesehatan ternyata cakupan pengguna jamban keluarga pada tahun 2010 hanya sebesar 77,72%, cakupan rumah sehat hanya 66,36% dan cakupan rumah tangga yang memiliki SPAL hanya 66,98%.

Perubahan pola dan gaya hidup masyarakat pada umumnya membawa dampak terhadap perkembangan penyakit. Di Kabupaten Pemalang kasus penyakit tidak menular mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kasus Diabetes Mellitus dari tahun 2005–2009 mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun sebesar 125%. Pada tahun 2005 jumlah kasus DM sebanyak 3.757 penderita meningkat menjadi 6.182 penderita pada tahun 2010. Kasus stroke cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2005 sebesar 430 penderita menurun menjadi 423 penderita pada tahun 2010. Kasus hipertensi pada tahun 2005 sebesar 9.906 penderita meningkat pada tahun 2010 menjadi 25.829 penderita.

Masih banyaknya permasalahan kesehatan ini harus mendapat dukungan sumberdaya kesehatan yang layak. Sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Perkembangan Sarana dan Prasana Kabupaten Pemalang
Tahun 2005 – 2010 (unit)

| No | Sarana dan Prasarana Kesehatan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Rumah Sakit Umum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rumah Sakit Swasta | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Rumah bersalin | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 |
| 4 | Balai pengobatan | 21 | 20 | 20 | 22 | 17 |
| 5 | Puskesmas | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6 | Puskesmas Pembantu | 57 | 59 | 59 | 64 | 65 |
| 7 | Puskesmas Keliling | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Kondisi tenaga kesehatan berdasarkan rasio jumlah penduduk, Kabupaten Pemalang masih kekurangan tenaga kesehatan. Berikut ini rasio tenaga kesehatan per

1.395.232 penduduk dan kebutuhan tenaga kesehatan setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2010

| No | Tenaga Kesehatan | Jumlah | Target Indikator Indonesia Sehat 2010 | Kebutuhan tenaga kesehatan/ 1.395.232 penduduk | kekurangan |
|----|------------------|--------|---------------------------------------|--|------------|
| 1 | Dokter spesialis | 26 | 6 | 58 | 32 |
| 2 | Dokter Umum | 104 | 40 | 454 | 350 |
| 3 | Dokter Gigi | 11 | 20 | 133 | 122 |
| 4 | Apoteker | 100 | 40 | 458 | 358 |
| 5 | Tenaga Gizi | 46 | 22 | 522 | 215 |
| 6 | Perawat | 510 | 117,5 | 1122 | 612 |
| 7 | Bidan | 431 | 100 | 964 | 533 |
| 8 | Tenaga Kesmas | 36 | 40 | 522 | 486 |
| 9 | Tenaga Sanitasi | 39 | 40 | 519 | 480 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (2010)

c. Pekerjaan Umum

1) Jalan dan Jembatan

Secara geografis Kabupaten Pemalang memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur pantura barat provinsi Jawa Tengah. Jalur pantura tersebut menghubungkan antara Semarang - Jakarta yang melewati Kabupaten Pemalang. Posisi yang sangat strategis tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Pemalang, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan transportasi perlu mendapatkan perhatian serius.

Jalur pantura yang melewati wilayah Kabupaten Pemalang merupakan jalan nasional dan provinsi dengan panjang jalan nasional 32,43 km dan jalan provinsi sepanjang 99,52 km sedangkan panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat ibukota Kabupaten Pemalang dengan seluruh wilayah kecamatan sepanjang 651,97 km. Dari 651,97 km panjang jalan kabupaten, sebanyak 91,65% permukaan jalan berupa aspal, 1,84% permukaan jalan berupa batu kerikil dan 2,24% permukaan jalan berupa tanah. Gambaran secara rinci perkembangan jalan kabupaten berdasarkan jenis permukaan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2007 - 2010

| No | Jenis Permukaan | Satuan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a | Aspal | Km | 614,37 | 614,37 | 597,54 | 614,07 |
| b | Kerikil | Km | 37,60 | 37,60 | 12,02 | 12,52 |
| c | Tanah | Km | - | - | 14,61 | 14,71 |
| d | Tidak Terinci | Km | - | - | 27,80 | 10,67 |
| e | Jumlah | Km | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2007-2010)

Tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan jalan berdasarkan jenis permukaan baik aspal maupun kerikil pada tahun 2007 dan 2008 relatif konstan, sedangkan pada tahun 2010 mengalami perubahan, disebabkan beberapa jalan kabupaten mengalami peningkatan kelas jalan yang sebelumnya kelas jalan II meningkat menjadi kelas IIIB, dari kelas IIIB meningkat menjadi kelas IIIC.

Dintinjau dari kelas jalan dapat diketahui bahwa sebagian besar kelas jalan kabupaten yaitu kelas jalan IIIC yaitu sepanjang 531,1 km, selanjutnya kelas IIIB

sepanjang 88,44 km dan Kelas II sepanjang 32,43 km. Rincian perkembangan kelas jalan kabupaten selama tahun 2007 – 2010 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Di Kabupaten Pemalang
Tahun 2007-2010

| No | Kelas Jalan | Satuan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a | Kelas I | Km | - | - | - | - |
| b | Kelas II | Km | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| c | Kelas III | Km | - | - | - | - |
| d | Kelas III A | Km | - | - | - | - |
| e | Kelas III B | Km | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 |
| f | Kelas III C | Km | 531,10 | 531,10 | 531,10 | 531,10 |
| | Jumlah | Km | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2007-2010)

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atau lebih dari 70% kelas jalan di Kabupaten Pemalang yaitu kelas IIIC, hal ini mencerminkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana jalan cukup besar. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi jalan di Kabupaten Pemalang dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan
Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2010

| No | Kondisi Jalan | Satuan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a | Baik | Km | 248,50 | 330,46 | 321,18 | 284,23 |
| b | Sedang | Km | 263,47 | 128,35 | 102,64 | 110,65 |
| c | Rusak | Km | 75,90 | 108,59 | 129,28 | 138,79 |
| d | Rusak Berat | Km | 64,10 | 84,57 | 98,87 | 118,97 |
| | Jumlah | Km | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2007-2010)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 persentase kondisi jalan yang rusak dan rusak berat mencapai 21,47% dari 651,97 km atau mencapai 140 km, pada tahun 2008 kondisi jalan yang rusak dan rusak berat mengalami peningkatan, dari total panjang jalan 651,97 km terdapat 29,63% atau meningkat sekitar 8,15%. Selanjutnya pada tahun 2010 tingkat kerusakan jalan mencapai 34,99% atau meningkat 5,37% dibandingkan kondisi kerusakan jalan pada tahun 2009.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kondisi jalan belum terwujud secara optimal. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya angka kecelakaan pengguna jalan serta berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Pemalang. Hal ini mengingat sarana dan prasarana jalan yang baik dapat menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pemalang serta dapat membuka akses dalam kegiatan sektor perdagangan maupun transportasi.

Jaringan jalan di Kabupaten Pemalang berdasarkan fungsi jalan meliputi sebagai berikut :

- a) Jalan Arteri Primer, adalah sepanjang jalan pantura yang melewati Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami. Berkaitan dengan fungsi jalan arteri, Pemanfaatan jalan ini untuk mengangkut hasil produksi lokal Kabupaten Pemalang ke daerah sebelah barat seperti Tegal, Slawi, Cirebon dan sebagainya dan ke daerah sebelah timur seperti, Pekalongan, Batang, Kendal dan Semarang.

- b) Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga yang melalui wilayah Kecamatan Pemalang, Bantarbolang, Randudongkal, dan Belik, serta ruas jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal yang melalui wilayah Kecamatan Randudongkal, Moga, Pulosari dan ruas jalan yang melalui wilayah Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Warungpring. Pemanfaatan jalan kolektor ini antara lain adalah untuk pemasaran hasil produksi Kabupaten Pemalang ke daerah bagian selatan. Berdasarkan skenario pengembangan perlu direncanakan pembangunan jalan kolektor lain dari pusat baru (bagian selatan) ke Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Tegal.
- c) Jalan lokal primer adalah jalan dengan fungsi penghubung kota-kota dalam wilayah Kabupaten Pemalang yang melayani transportasi dalam wilayah kabupaten. Ruas jalan lokal primer yang terdapat di Kabupaten Pemalang yaitu jalan yang melalui wilayah Kecamatan Comal, Bodeh, Watukumpul dan Belik.

Pada ruas-ruas jalan arteri khususnya di Kota Pemalang yang berfungsi menghubungkan kota atau jalur regional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota. Himpitan fungsi yang demikian sedikit banyak menyebabkan jalan-jalan tersebut dipadati oleh pergerakan regional maupun lokal, pada akhirnya kecepatan menjadi rendah. Sedangkan untuk menghubungkan Kota Semarang dan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan jalan Nasional dengan panjang 32,43 Km dalam kondisi yang baik. Gambaran tentang kondisi dan panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.29

Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kab. Pemalang Tahun 2006-2010

| No | Kewenangan | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Nasional | Km | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| 2 | Propinsi | Km | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 |
| 3 | Kabupaten | Km | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2006-2010)

2) Persampahan

Sampah merupakan permasalahan yang terjadi hampir di semua kota, termasuk Kabupaten Pemalang. Volume sampah terangkut di Kabupaten Pemalang tahun 2007 sebanyak 245 m³/hari pada tahun 2008 volume sampah terangkut menurun menjadi 220 m³/hari dan 2009 volume sampah terangkut sebanyak 185 m³/hari, dan pada tahun 2010 volume sampah terangkut menjadi 215 m³/hari.

Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Pemalang menggunakan dua sistem yaitu sistem pengolahan sampah on-site (pengolahan pada lokasi) atau cara tradisional (dibakar atau ditimbun), dan sistem pengolahan sampah off-site (pengolahan secara terstruktur). Selama ini pengelolaan sampah yang tidak terangkut lebih banyak dilakukan dengan sistem *on-site*.

Selanjutnya berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pasal 44 maka Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tempat pengelolaan sampah dengan sistim pembuangan terbuka (open dumping) akan diarahkan dan diupayakan pada sistim pengolahan tertutup (sanitary landfill).

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Jumlah truk pengangkut sampah pada tahun 2007 sebanyak 12 unit, tahun 2010 menurun menjadi 11 unit. Truk container tahun 2007-2010 tidak ada peningkatan yaitu sebanyak 6 unit, gerobak sampah tahun 2007-2010 sebanyak 46 unit, fasilitas TPS sebanyak 45 unit tahun 2007 meningkat menjadi 64 unit tahun 2010, fasilitas TPA sebanyak 1 unit. Secara lengkap gambaran sarana dan prasarana pengolahan sampah disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah
di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2010

| No | Jenis sarana prasarana | Sat | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Truk sampah (unit) | Unit | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Truk Container (unit) | Unit | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Truk Tinja (unit) | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Container (unit) | Unit | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 5 | Gerobak sampah (unit) | Unit | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Becak Sampah | Unit | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 7 | TPS (Unit) | Unit | 45 | 60 | 60 | 64 |
| 8 | TPS Terpadu | Unit | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | TPA (Unit) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Transfer Depo (Unit) | Unit | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | Alat Berat Eskavator & Buldozer | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah | Unit | 73 | 159 | 160 | 160 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2007-2010)

Kegiatan industri, perdagangan maupun rumah tangga memberikan kontribusi terhadap jenis dan volume sampah di Kabupaten Pemalang, persentase terbesar jenis sampah yaitu sampah organik mencapai 40% pada tahun 2010, sampah plastik mencapai 10%, sampah kayu 5%, sampah kertas 10%, sampah gelas/kaca sebesar 5%, sampah kayu sebesar 5%, sampah kain sebesar 3% dan sampah jenis logam/metal mencapai 5%. Data terkait dengan persentase komposisi sampah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2007–2010 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Persentase Komposisi Sampah Di Kab. Pemalang Tahun 2007-2010 (%)

| No | Jenis Sampah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------|------|------|------|------|
| 1 | Kertas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Kayu | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | Kain | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Karet/kulit | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Plastik | 15 | 25 | 27 | 20 |
| 6 | Metal/logam | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Gelas/kaca | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Organik | 40 | 40 | 43 | 40 |
| 9 | Lain-lain | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2007-2010)

3) Drainase

Panjang drainase sekunder di Kabupaten Pemalang tahun 2010 untuk jenis drainase sekunder tertutup sepanjang 15.000 m, drainase sekunder terbuka sepanjang 9.400 m, dan drainase lingkungan terbuka sepanjang 13.000 m. Tahun 2007-2010 panjang drainase di Kabupaten Pemalang tidak menunjukkan peningkatan, selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Panjang drainase Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2010 (meter)

| No | Drainase | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Drainase Sekunder Tertutup | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | Drainase Sekunder Terbuka | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3 | Drainase Lingkungan Terbuka | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2007-2010)

4) Sumber Daya Air (SDA)

Kabupaten Pemalang mempunyai ketersediaan air cukup memadai, namun tidak tersedia secara merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus, 80 % air tersedia pada musim hujan dan 20 % air tersedia pada musim kemarau. Selain itu beberapa DAS yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan fungsi daerah tangkapan dan resapan air.

Perkembangan fisik wilayah telah memberikan dampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian, secara regional kebutuhan air menuntut adanya pengelolaan sumber daya air yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Wilayah Kabupaten Pemalang memiliki 4 (empat) sungai yang masuk dalam kategori sungai strategis nasional sepanjang 266.375 km, yaitu :

- Bagian timur : Sragi Lama (Pebatasan Kabupaten Pekalongan)
- Bagian tengah : Sungai Comal
- Bagian barat : Sungai Waluh
- Bagian barat : Sungai Rambut (Perbatasan Kabupaten Tegal)

Sementara itu sungai yang dikelola kabupaten 144 buah, dengan total panjang 755,455 km, terbagi atas Anak Sungai Comal sebanyak 70 buah dengan panjang 467,70 km, Anak Sungai Waluh sebanyak 23 buah dengan panjang 95,0 km, Anak Sungai Rambut (perbatasan Kabupaten Pemalang dan Tegal) sebanyak 13 buah, dengan panjang 55,00 km, Anak Sungai Sragi Lama (Perbatasan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan) sebanyak 23 buah, dengan panjang 79,10 km, sungai wilayah Kota Pemalang sebanyak 15 buah, dengan panjang 58,65 km. Secara umum potensi air irigasi di bagian utara sedang, di bagian timur cukup, di bagian selatan sedang-cukup, di bagian barat sedang, dan di bagian tengah cukup.

Untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan persawahan Kabupaten Pemalang memiliki 10 (sepuluh) Daerah Irigasi/DI besar yaitu Daerah Irigasi Kaliwadas, Comal, Sungapan, Mejagong, Lanjiladang, Kejene, Nambo, Rowokajar, Kedungbelis dan Welut Putih. Jumlah saluran induk sebanyak 10 (sepuluh) saluran induk, selanjutnya jumlah saluran sekunder yang terdapat di delapan daerah irigasi besar tersebut sebanyak ± 318 saluran sekunder dengan total luas sawah yang dialiri seluas 27.268,498 Ha.

Keberadaan sumberdaya air penting untuk dikelola dengan baik agar terus menerus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang seimbang melalui pengelolaan terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem prasarana pengairan di Kabupaten Pemalang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, untuk permukiman (air bersih) dan industri.

Prasarana pengairan di Kabupaten Pemalang digunakan untuk irigasi dan penyediaan air bersih. Prasarana pengairan tersebut meliputi : daman, saluran irigasi, dan embung. Masing-masing memiliki peran tersendiri, seperti : daman (chek dam), dan saluran irigasi digunakan untuk mengairi sawah. Sedangkan embung yang tersebar di Kabupaten Pemalang sebagian besar digunakan untuk penyedia (supply) air bersih yang dikelola oleh PDAM dan sebagian lainnya untuk pengairan irigasi.

Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, sumberdaya air penting untuk dikelola sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dari sumber air ke lokasi persawahan dibutuhkan saluran irigasi primer dan sekunder. Panjang saluran irigasi primer Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 memiliki panjang 35.458 m dengan kondisi baik sepanjang 10.458 m, rusak ringan sepanjang 16.300 m dan rusak berat sepanjang 8.700 m. Selanjutnya gambaran kondisi dan panjang saluran irigasi primer dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.33
Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Primer Tahun 2008-2010 (meter)

| No | Keterangan | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------|-------|-------|--------|
| 1. | Baik | 1.400 | 1.476 | 10.458 |
| 2. | Rusak ringan | 1.692 | 1.823 | 16.300 |
| 3. | Rusak berat | 3.920 | 3.713 | 8.700 |
| | Jumlah | 7.012 | 7.012 | 35.458 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2008-2010)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan produksi hasil pertanian mendapat kendala yang cukup berat. Hal ini dapat dilihat kerusakan saluran irigasi primer tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini terbukti tingkat kerusakan mencapai 80% dari total panjang saluran irigasi primer, demikian juga kondisi saluran irigasi sekunder sebagian besar dalam kondisi rusak, namun tahun 2010 terjadi peningkatan kondisi drainase baik menjadi 190.892 m. Gambaran kondisi dan panjang saluran irigasi sekunder dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Sekunder Tahun 2006-2010 (meter)

| No | Kondisi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Baik | 6.500 | 7.100 | 8.050 | 9.007 | 190.892 |
| 2 | Rusak ringan | 11.343 | 11.343 | 11.343 | 11.066 | 53.950 |
| 3 | Rusak berat | 25.050 | 24.200 | 23.500 | 22.820 | 37.943 |
| | Jumlah | 42.893 | 42.843 | 42.893 | 42.893 | 282.785 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Disamping saluran irigasi primer dan sekunder mengalami kerusakan, saluran irigasi tersier juga mengalami kondisi yang sama dengan tingkat kerusakan mencapai 60%. Dengan rusaknya saluran irigasi tersebut memberikan dampak yang besar terhadap sulitnya kebutuhan air untuk mengairi lahan pertanian. Kerusakan saluran tersebut disebabkan oleh beberapa factor antara lain faktor alam yang banjir yang menyebabkan beberapa saluran irigasi baik yang permanen maupun setengah permanen mengalami longsor atau jebol akibat derasnya arus air akibat banjir, faktor lain yang menyebabkan saluran irigasi mengalami kerusakan antara lain masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab kelompok tani untuk melakukan pemeliharaan secara rutin saluran irigasi tersebut. Gambaran tentang kondisi dan panjang saluran irigasi tersier dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Tersier Tahun 2006-2010 (km)

| No | Kondisi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Baik | 421 | 431 | 395 | 360 | 380 |
| 2 | Rusak ringan | 286 | 280 | 270 | 268 | 268 |
| 3 | Rusak berat | 226 | 222 | 268 | 305 | 285 |
| | Jumlah | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Pembangunan dam diharapkan dapat mengurangi tingkat sedimentasi dan mencegah terjadinya banjir. Jumlah dam di Kabupaten Pemalang dengan kondisi rusak berat lebih dari 50% pada tahun 2006-2009, pada tahun 2010 terjadi penurunan dam yang mengalami kerusakan menjadi 31%. Tingginya kerusakan dam disebabkan oleh beberapa faktor antara lain usia bangunan, penambangan pasir secara liar disekitar dam serta daya dukung lingkungan disekitar dam sangat rendah. Rendahnya daya dukung lingkungan seperti tanaman keras maupun talud

mengakibatkan beberapa bantaran sungai disekitar dam mengalami longsor. Rincian kondisi dan jumlah dam yang rusak dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.36
Persentase Kondisi Dam Di Kab. Pemalang Tahun 2006-2010 (%)

| No | Kondisi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Baik | 30,00 | 36,00 | 40,00 | 49,00 | 51,00 |
| 2 | Rusak ringan | - | - | - | - | 12,00 |
| 3 | Rusak berat | 70,00 | 64,00 | 60,00 | 51,00 | 37,00 |
| | Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Potensi lain terkait dengan sumberdaya air di Kabupaten Pemalang yaitu embung. Jumlah embung di Kabupaten Pemalang tahun 2010 sebanyak 36 unit dengan kondisi 55,55% mengalami kerusakan ringan dan 27,77% mengalami kerusakan berat. Rusaknya potensi embung yang cukup besar sangat berdampak terhadap penyediaan air baku untuk pertanian maupun untuk keperluan yang lain.

Tabel 2.37
Jumlah dan Kondisi Embung Di Kab. Pemalang Tahun 2006-2010 (buah)

| No | Kondisi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Baik | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Rusak ringan | 30 | 26 | 26 | 26 | 20 |
| 3 | Rusak berat | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| | Jumlah | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2006-2010)

5) Air Bersih dan Air Limbah

Persentase Proporsi rumah tangga dengan akses saran air minum di perkotaan tahun 2006 sebesar 63,72%, meningkat menjadi 74,42% tahun 2010. Sedangkan itu untuk proporsi rumah tangga dengan akses sarana air minum di pedesaan tahun 2006 sebesar 60,08%, meningkat menjadi 69,84% tahun 2010.

Sementara itu sistem air limbah di Kabupaten Pemalang hingga saat ini masih ditangani secara individu oleh tiap-tiap rumah tangga dan masing-masing industri (Industri rumah tangga). Air limbah rumah tangga langsung dibuang kesaluran pembuangan/selokan. Untuk industri, sebagian kecil memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), air sebelum dibuang keperairan umum diolah didalam unit ini dulu.

Prosentase proporsi rumah tangga dengan akses sarana sanitasi dasar air limbah rumah tangga di perkotaan tahun 2006 sebesar 49,43%, meningkat menjadi 64,96% tahun 2010, sedangkan untuk wilayah pedesaan tahun 2006 sebesar 43,63%, meningkat menjadi 52,58% tahun 2010. Sementara itu sarana air limbah rumah tangga berupa IPLT di Kabupaten Pemalang tahun 2006-2010 sebanyak 1 unit. Pengguna IPLT tahun 2006 sebanyak 150.040 KK (600.162 jiwa), tahun 2007 meningkat menjadi 155.571 KK (622.282 jiwa), tahun 2008 sebanyak 178.830 kk (715.318 jiwa), pada tahun 2009 dan 2010 sebanyak 252.138 kk (715.318 jiwa). Selain IPLT juga terdapat MCK Plus pada tahun 2009 sebanyak 4 unit dengan 320 kk pengguna atau 1280 jiwa pada tahun 2009, tahun 2010 terjadi peningkatan MCK komunal yaitu sebanyak 6 unit dengan pengguna MCK sebanyak 491 kk (1.964 jiwa).

d. Perumahan

Perumahan menurut Undang-Undang No 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Berdasarkan kondisi fisiknya bangunan rumah dibedakan menjadi 3 yaitu rumah permanen, semi permanen, dan non permanen. Jumlah rumah permanen di Kabupaten Pemalang tahun 2006 sebesar 173.138 unit. Jumlah rumah permanen di

Kabupaten Pemalang tahun 2007 sebesar 180.970 unit dan mengalami pertumbuhan di tahun 2010 menjadi 182.080 unit. Sementara itu untuk rumah non permanen tahun 2006 sebesar 116.559 unit, meningkat menjadi 139.269 unit tahun 2010. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 2.38
Rumah Berdasarkan Kondisi Fisik Bangunan
Di Kabupaten Pemalang tahun 2006-2010 (Unit)

| No. | Indikator | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Rumah Permanen | 173.138 | 180.970 | 180.970 | 181.858 | 182.080 |
| 2. | Jumlah Rumah Non Permanen | 116.559 | 128.215 | 137.715 | 138.825 | 139.269 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Status kepemilikan rumah milik sendiri di Kabupaten Pemalang tahun 2006-2010 mengalami perubahan yang cukup baik tahun 2006 sebanyak 245.267 unit menjadi 261.489 unit tahun 2010. Sedangkan untuk status kepemilikan rumah sewa tahun 2006-2010 juga mengalami perubahan yaitu sebanyak 1.500 unit rumah sewa tahun 2006 meningkat menjadi 1.755 unit rumah sewa. Untuk penyediaan rumah Perumnas di Kabupaten Pemalang tahun 2009-2010 sebanyak 2.009 unit. Sedangkan penyediaan rumah melalui KPR/BTN tahun 2010 sebanyak 3.429 unit. Kebutuhan rumah di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan. Tahun 2006 kebutuhan rumah sebesar 76.830 unit, tahun 2010 kebutuhan rumah meningkat menjadi 118.089 unit. Sementara itu untuk jumlah penghuni yang tinggal pada kawasan permukiman kumuh mengalami penurunan. Tahun 2006 penduduk yang tinggal di kawasan permukiman kumuh sebanyak 1.293 jiwa, tahun 2010 menurun menjadi 850 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.39
Status Kepemilikan Rumah, Penyediaan Rumah, Kebutuhan Rumah
Tahun 2006-2010

| No | Indikator | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Status Kepemilikan rumah | | | | | |
| | a. Rumah milik sendiri (unit) | 243.767 | 244.267 | 246.267 | 273.149 | 274.000 |
| | b. Rumah sewa (unit) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.327 | 2.327 |
| 2. | Penyediaan Rumah (unit) | | | | | |
| | a. Perumnas (unit) | 781 | 781 | 781 | 2.009 | 2.009 |
| | b. KPR/BTN (unit) | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 3.429 | 3.429 |
| 3. | Kebutuhan Rumah | | | | | |
| | Jumlah rumah tangga | 326.007 | 346.636 | 391.905 | 395.386 | 395.386 |
| | Jumlah Penduduk (jiwa) | 1.364.274 | 1.371.236 | 1.387.453 | 1.391.711 | 1.405.488 |
| | Jumlah rumah didirikan oleh pengembang (unit) | 3.910 | 3.910 | 4.109 | 4.336 | 4.813 |
| | Jumlah rumah didirikan secara swadaya masyarakat (unit) | 246.677 | 247.767 | 247.767 | 274.649 | 275.759 |
| | Jumlah Kebutuhan Rumah (unit) | 76.830 | 96.459 | 141.728 | 118.089 | 118.089 |
| 4 | Jumlah rumah layak huni | 82.803 | 225.705 | 242.200 | 206.546 | 269.933 |
| 5 | Jumlah penduduk yang tinggal dipermukiman kumuh | 1.293 | 1.163 | 1.123 | 1.083 | 850 |

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Dari banyaknya jumlah rumah yang ada, persentase rumah yang layak huni baru tahun 2010 mencapai 96%. Lingkungan yang masuk kategori lingkungan permukiman kumuh tahun 2010 sebesar 9,19% menurun dari kondisi tahun 2006 yang mencapai 29,25%.

Perkembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai penambahan jumlah kawasan/kompleks perumahan menjadi 25 buah, yaitu kawasan perumahan Pelutan Indah, perumahan cangklik baru, perumahan Sugihwaras, perumahan PEPABRI Sugihwaras, perumahan Perumnas Bojongbata, perumahan Songgo indah, perumahan Kaligelang Permai,

perumahan Banjardawa Permai, perumahan Taman Asri I dan II, perumahan Widuri Asri, perumahan Widuri Graha Pesona I dan II, perumahan Taman Lestari I dan II, perumahan Taman Mandiri, perumahan Taman Rejo, perumahan Petarukan Permai, perumahan Puri Asri Comal, perumahan Taman Anggur Refaonda Bojongbata, perumahan Taman Agung, perumahan Pondok Sampir Damai Mulyoharjo, perumahan Green Asri Comal, perumahan Puri Praja Kencana, perumahan Vila De Blandong, perumahan Grand Comal (Ex pabrik spirtus), perumahan Trans Quality Bojongbata, dan perumahan Guci Permai Moga.

Di Kabupaten Pemalang jumlah rumah yang telah ber-IMB tahun 2006 sebanyak 3.029 unit, tahun 2007 meningkat menjadi 3.463 unit, tahun 2008 meningkat menjadi 3.809 unit, tahun 2009 meningkat menjadi 4.459 unit dan tahun 2010 mencapai 5.338 unit. Komposisi antara rumah yang ber-IMB antara rumah pada perumahan maupun rumah swadaya seimbang, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Jumlah Rumah Ber-IMB di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010

| No | Jenis Rumah | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Perumahan | 1.499 | 1.499 | 1.698 | 1.925 | 2.402 |
| 2 | Umum/swadaya | 1.530 | 1.964 | 2.111 | 2.534 | 2.936 |
| | Jumlah | 3.029 | 3.463 | 3.809 | 4.459 | 5.338 |

e. Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diterbitkan dengan Perda Kabupaten Pemalang No. 17 tahun 2003. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanahkan perlunya peninjauan kembali 1 kali dalam 5 tahun (pasal 25). Upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Pemalang telah melakukan revisi RTRW Kabupaten Pemalang.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Pemalang belum berjalan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031. Pembangunan di wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, belum mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Peningkatan perekonomian jangka pendek yang dilakukan menyebabkan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan memperbesar resiko terjadinya bencana alam serta konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Di Kabupaten Pemalang pada tahun 2009 terjadi alih fungsi ruang publik yang berubah keperuntukannya. Tahun 2006 ruang public yang berubah keperuntukannya sebesar 286 ha, tahun 2009 meningkat menjadi 360 ha. Untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan meminimalisasi terjadinya konflik maka diperlukan penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang. Luas ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang sampai tahun 2009 seluas 933 hektar.

f. Perencanaan Pembangunan

Pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan sejak berlakunya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 32 tahun 2004 juncto UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahun) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk kegiatan tahunan serta penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2010 bersamaan dengan ditetapkannya RPJMN 2010 – 2014, dikeluarkan surat

edaran bersama tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada tanggal 31 Maret 2010 tentang pentingnya Penyeleraaan RPJMD dengan RPJMN 2010 – 2014, terutama pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang telah tercantum dalam program-program RPJMN 2010 – 2014 yang memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pemalang.

Penyelarasan tersebut merupakan pendekatan keterpaduan antara RPJMN 2010–2014, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 dengan RPJMD kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan dan masalah mendesak. Selain itu, perlu diperhatikan arahan Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, terdiri dari 14 program prioritas pembangunan dan percepatan penyelesaian masalah mendesak di daerah. Arahan kebijakan dalam Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional Berkeadilan, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pemalang memberikan andil bagi pencapaian Tujuan Pendidikan untuk Semua (PUS), Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s) tahun 2015.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pemalang tahun 2010, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Pemalang 2011 – 2015 sesuai dengan masa jabatan bupati terpilih. Penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang, baik RPJP-D (jangka 20 tahun) dan RPJMD (jangka waktu 5 tahun) akan semakin sulit, mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang dinamis, terutama kebijakan nasional, perubahan regional berlakunya pasar bebas Asean – China (C-AFTA) tahun 2010 menjadikan perubahan sosial, ekonomi dan politik sulit diprediksi.

Masalah lain dalam penyusunan rencana pembangunan adalah adanya ketidak lengkapan data, informasi yang akurat dan lengkap, serta pilah gender. Data dasar pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Meskipun dalam kondisi terbatas, namun Bappeda Kabupaten Pemalang, telah memiliki data pendukung perencanaan daerah, berupa Sistem Informasi Profil Daerah, PDRB Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang Dalam Angka, Dokumen Evaluasi Kegiatan yang telah disusun oleh Bappeda dan berbagai dokumen yang dapat menggambarkan profil masing-masing urusan kewenangan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2007.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang telah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, yaitu dengan melibatkan stakeholder pembangunan daerah, baik SKPD, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi. Pelibatan stakeholder tersebut dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Langkah tersebut sesuai dengan PP. No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang wilayah, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender, melibatkan partisipasi stakeholder pembangunan daerah, agar dokumen perencanaan tersebut menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pemalang menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang teknis, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten Pemalang sesuai dengan amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, Pengelolaan Kawasan Pantai sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Pengurangan Resiko Bencana, Perencanaan Tenaga

Kerja Daerah (amanat UU Nomor 13 tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan) dan lain-lain.

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan, baik oleh internal SKPD pengawas maupun DPRD Kabupaten Pemalang. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bappeda melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga digunakan untuk bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pemalang kepada DPRD.

g. Perhubungan

Prasarana perhubungan darat merupakan salah satu prasarana yang sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pemalang. Prasarana perhubungan darat di Kabupaten Pemalang memudahkan penduduk melakukan mobilitas ke tempat lain. Di Kabupaten Pemalang pada tahun 2009 terdapat 1 buah terminal tipe A, dan 4 buah terminal tipe C. Terminal tipe A di Kabupaten Pemalang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi. Fasilitas terminal ini terletak di Kecamatan Pemalang. Terminal tipe C Kabupaten Pemalang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan, meliputi terminal Belik, Moga, Randudongkal, dan Comal

Pelayanan pergerakan antar daerah di Kabupaten Pemalang dilayani oleh Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan kendaraan umum berupa angkutan pedesaan, serta angkutan tidak bermotor (Becak dan Dokar). Jumlah Bus AKAP tahun 2006-2009 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2006 jumlah Bus AKAP sebanyak 100 unit dan tidak mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2008. Namun tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 129 unit. Sementara itu untuk perkembangan bus AKDP tahun 2006 terdapat 155 bus, dan tidak mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 193 unit. Pelayanan angkutan penumpang di Kabupaten Pemalang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Angkutan penumpang ini juga perlu dilakukan pengelolaan terminal yang baik, guna meningkatkan aksesibilitas naik turunnya penumpang dan dalam meningkatkan integrasi antar terminal dan angkutan perhubungan lainnya.

Tabel 2.41
Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Di Kab. Pemalang
Tahun 2006-2010 (Unit)

| Indikator | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transportasi Darat | | | | | |
| 1). Terminal | | | | | |
| - Tipe A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Tipe C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2). Bus AKAP | 100 | 100 | 100 | 129 | - |
| 3). Bus AKDP | 155 | 155 | 155 | 193 | - |

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Selain angkutan umum Kabupaten Pemalang juga dilintasi oleh kendaraan angkutan barang. Angkutan ini berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Saat ini masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut sehingga menambah beban pada jalan. Selain itu angkutan barang juga sering berhenti disembarang tempat, sehingga berpotensi menghambat lalu lintas jalan.

Untuk jumlah kendaraan yang telah melakukan wajib uji di Kabupaten Pemalang tahun 2007-2008 cenderung mengalami peningkatan kecuali mobil non bis umum yang mengalami penurunan. Jumlah Bis Umum yang telah melakukan wajib uji tahun 2007 sebanyak 1.417 unit, tahun 2008 meningkat menjadi 1.462 unit. Mobil non bis umum yang telah melakukan wajib uji tahun 2007 sebanyak 112 unit,

menurun menjadi 107 unit tahun 2008. Truk umum tahun 2007 sebanyak 54 unit yang telah melakukan wajib uji, meningkat menjadi 71 unit tahun 2008. Truk non umum yang telah melakukan wajib uji tahun 2007 sebanyak 1.707 unit, kemudian meningkat menjadi 1.963 unit pada tahun 2008.

h. Lingkungan Hidup

Produksi sampah di Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2010 sebanyak 215 m³/hari, dengan volume sampah terangkut sebanyak 39.862.060 kg/tahun. Volume sampah ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya (2006-2009).

Dilihat dari komposisinya, jenis sampah yang paling dominan adalah sampah organik (40%), dan lainnya berupa sampah plastik (15%), kertas (10%), kain (10%), kayu (5%), karet/kulit (5%), metal/logam (5%), gelas/kaca (5%), dan lain-lain (5%). Komposisi sampah plastik telah mencapai 15%, menunjukkan bahwa penggunaan plastik sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang perlu dikendalikan, karena sifatnya tidak dapat diuraikan. Untuk mendukung pengelolaan sampah, sarana dan prasarana yang tersedia antara lain Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Pengongsoran Kecamatan Pemalang seluas 10 ha; Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebanyak 59 unit; truk sampah sebanyak 60 unit, dan gerobak sampah sebanyak 46 unit. Saat ini usia TPA Pegongsoran telah melampaui akhir batas operasi, yaitu pada tahun 2008.

Tabel 2.42
Data Timbulan Sampah 2006 – 2010

| No. | Uraian | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | Produksi sampah (m ³ /hari) | 746 | 765 | 765 | 812 | 215 |
| 2. | Sampah diangkut ke TPA (m ³ /hari) | 575 | 630 | 630 | 610 | 161,25 |
| 3. | Prosentase sampah terangkut (%) | 76,77 | 82,35 | 82,35 | 75,12 | 75 |

Sumber : Kantor KLH, 2010

Pencemaran air pada tahun 2010 di Kabupaten Pemalang sudah cukup mengkhawatirkan. Beberapa sungai teridentifikasi telah tercemar (diatas baku mutu air kelas II sesuai PP No. 82 Tahun 2001), yaitu :

- 1) Sungai Sragi: BOD (di titik tengah), COD (di titik tengah dan hilir), Nitrit, Besi, Florida (di titik Hulu), Clorin (di titik Hulu).
- 2) Sungai Medono: COD, Crom (di titik tengah), Nitrit (di titik tengah dan hilir), Besi, Florida, Clorin bebas.
- 3) Sungai Srengseng : Nitrat, Nitrit, Crom (di titik hulu dan tengah), Besi, BOD (di titik hilir), Sulfat.
- 4) Sungai Waluh: BOD (di titik hilir), COD (di titik hilir), Nitrit, Besi, Sulfat, Khlorin bebas.
- 5) Sungai Comal: BOD (di titik hilir), Khrom, Nitrit (di titik tengah), Besi, Khlorin bebas.
- 6) Sungai Desa Randudongkal RT 56: BOD (di titik hilir), Khrom, Nitrit (di titik tengah), Besi, Klorin bebas.

Adapun data pencemaran air yang terjadi pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- 1) Sungai Comal, pada parameter kualitas air BOD, COD, total fosfat, Fenol, H₂S dan TDS.
- 2) Sungai Medono, pada parameter kualitas air BOD, COD, total fosfat, tembaga, belerang, fenol, nitrit, seng dan TDS.
- 3) Sungai Srengseng, pada parameter kualitas air BOD, COD, total fosfat, tembaga, belerang, fenol, nitrit, seng dan TDS.
- 4) Sungai Baros, pada parameter kualitas air BOD, COD, total fosfat, tembaga, belerang, fenol, nitrit, seng dan TDS.
- 5) Sungai Elon, pada parameter kualitas air BOD, COD, total fosfat, tembaga, belerang, fenol, nitrit, kadmiun dan TDS.

- 6) Sungai Waluh, pada parameter kualitas air BOD, COD, total fosfat, belerang, fenol dan TDS.
- 7) Sungai Jati, pada parameter kualitas air BOD, COD, total fosfat, belerang, fenol, pH dan TDS.

Pencemaran air sungai tersebut diatas disebabkan antara lain oleh aktivitas industri/ UMKM. Sampai dengan tahun 2010 jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air sebanyak 3 industri besar dan 63 industri kecil. Upaya penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan selama ini dilakukan dengan menindaklanjuti laporan masyarakat. Pada tahun 2010 laporan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan dari masyarakat sebanyak 1 kasus, dan telah ditindaklanjuti (100%). Dalam rangka pemulihan pencemaran air pada sumber air, sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan upaya pemulihan sumber air melalui program penyelamatan sumber mata air. Tahap yang dilakukan baru pada tahap identifikasi sumber air yang tercemar dan upaya pencegahan pencemaran air, yaitu program Kali Bersih di Sungai Bacin dan Sungai Srengseng.

Kualitas udara ambien di Kabupaten Pemalang tercatat pada tahun 2006 menghasilkan uji kualitas udara di beberapa titik, konsentrasi debu (partikulat) pada udara berkisar antara 91.632 – 191,17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Pada sebanyak 6 titik konsentrasi debu telah melebihi baku mutu udara sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang baku mutu udara (230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), yaitu di PT. Candi Mekar, Terminal Bus Pemalang, Pasar Pagi, Rumah Sakit Santa Maria, Perumahan Bojongbata, dan sekitar Pabrik Gula Sumberharjo. Sementara itu konsentrasi SO₂ di semua titik sampling berkisar antara 6,2445 – 36,681 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ atau masih dibawah baku mutu kualitas udara sebesar 632 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Untuk parameter NO₂, CO, Ox dan HC di semua titik sampling juga masih memenuhi standar baku mutu udara.

Pada tahun 2010 juga telah dilakukan monitoring kualitas udara ambien di wilayah Kabupaten Pemalang, kondisinya baik di kawasan perumahan, kawasan industri maupun kawasan padat kendaraan bermotor masih tetap memenuhi standar baku mutu udara, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.43
Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambient di Kabupaten Pemalang
Tahun 2010 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| No | Parameter | Kawasan Perumahan | Kawasan Industri | Kawasan Padat Kendaraan Bermotor |
|----|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. | NO ₂ | 22,9 | 30,9 | 29,6 |
| 2. | SO ₂ | 27 | 31,3 | 26,7 |
| 3. | CO | 4.557 | 9.154 | 10.298 |
| 4. | HC | 30,4 | 34,3 | 27,9 |
| 5. | TSP | 78,5 | 130,1 | 140 |

Sumber : Kantor KLH, 2010

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting dalam upaya pencegahan pencemaran udara di Kabupaten Pemalang. Luas RTH permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas hanya 4,82% dari luas wilayah Kabupaten Pemalang. Terdapat taman kota seluas 39.594,085 m² dan hutan kota seluas 14,07 ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kabupaten Pemalang masih sangat kurang, jika dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang yang mencapai 1.262.013 jiwa (2010).

Di Kabupaten Pemalang terdapat sebanyak 8 kawasan penyangga atau kawasan yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian sumberdaya air. Delapan kawasan tersebut berada di wilayah Kecamatan Belik, Pulosari, Watukumpul, Warungpring, Moga, Randudongkal, Bantarbolang dan Bodeh. Saat ini kawasan penyangga ini mengalami perubahan fungsi lahan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam menjamin ketersediaan sumberdaya air bagi penduduk. Luas lahan

kritis di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari seluas 13.229,30 ha pada tahun 2006 menjadi 16.673,40 ha pada tahun 2007, dan menurun pada tahun 2008 menjadi 13.368,71 ha. Masih banyaknya lahan kritis ini dapat mempengaruhi daya serap tanah terhadap air hujan, sehingga mempengaruhi kuantitas sumberdaya air.

Hutan lindung di Kabupaten Pemalang tersebar di Kecamatan Taman, Pulosari, Watukumpul, Belik, Moga, Bodeh, Randudongkal dan Warungpring dengan luas keseluruhan kurang lebih sebesar 2.325 Ha. Jumlah mata air yang terdapat di kawasan hutan lindung sebanyak 11 buah, dengan debit berkisar antara 10 – 1.300 liter/detik. Mata air yang memiliki debit terbesar adalah Mata air Telogo Gede di Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan debit air mencapai 1.300 liter/detik. Dari keseluruhan mata air yang ada di kawasan hutan lindung, mata air yang dilindungi dari pencemaran dan penurunan debit air baru mencapai 73%. Perlindungan sumber mata air sementara ini lebih diprioritaskan pada mata air yang memiliki debit air besar. Data mata air di kawasan hutan lindung Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Mata Air di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pemalang

| No | Nama Mata Air | Lokasi Mata Air | Debit (liter/detik) |
|-----|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | Mata air Telogo Gede | Desa Sikasur Kec. Belik | 1.300 |
| 2. | Mata air Asem | Desa Bulakan Kec. Belik | 160 |
| 3. | Mata air Sicipluk | Kec. Pulosari | 10 |
| 4. | Mata air Kemiri | Desa Sikasur Kec. Belik | 30 |
| 5. | Mata air La Gembung | Desa Sikasur Kec. Belik | 200 |
| 6. | Mata air Bulakan | Desa Gambuhan Kec. Pulosari | 60 |
| 7. | Mata air Setu | Desa Kuta Kec. Pulosari | 50 |
| 8. | Mata air Cipanas | Desa Karang Sari Kec. Pulosari | 25 |
| 9. | Mata air Kondang | Kec. Pulosari | 40 |
| 10. | Mata air Loning | Desa Karang Sari Kec. Pulosari | 30 |

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Jumlah mata air diluar hutan lindung Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 sebanyak 320 buah. Mata air tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Watukumpul (38 buah), Belik (125 buah), Pulosari (40 buah), Warungpring (41 buah), Moga (63 buah), Randudongkal (17 buah), Bantarbolang (26 buah), Kecamatan Pemalang (5 buah), dan Bodeh (3 buah) dengan debit antara 10 – 1.000 liter/detik. Tiga mata air yang memiliki debit terbesar semuanya berada di Desa Moga Kecamatan Moga, yaitu Mata Air Suci (1.000 liter/detik), Mata Air Jambe (850 liter/detik), dan Mata Air Benoa (750 liter/detik). Mata air di luar hutan lindung belum seluruhnya dilakukan perlindungan dari pencemaran dan penurunan debit air, baru sebanyak 40%.

i. Pertanahan

Bidang pertanahan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah dan memiliki fungsi ekonomis dan sosial. Karena mengandung fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas. Bukti kepemilikan tanah tersebut antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

Jumlah petak tanah yang bersertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang untuk jenis sertifikat hak milik (HM) pada tahun 2006 sampai dengan 2007 mengalami kenaikan, pada tahun 2006 sebanyak 141.052 sertifikat HM yang diterbitkan dan pada tahun 2007 sebanyak 142.231 sertifikat HM yang diterbitkan. Selanjutnya mulai tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan jumlah sertifikat HM yang diterbitkan, hal ini terbukti pada tahun 2008 jumlah sertifikat HM yang diterbitkan sebanyak 19.364 sertifikat HM dan pada tahun 2009 menurun drastis jumlah sertifikat yang diterbitkan yaitu sebanyak 1.090 sertifikat HM.

Untuk jenis sertifikat Hak Pakai (HP) selama 2006-2008 secara umum meningkat tiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup besar. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah sertifikat HP yaitu sebanyak 1.248 sertifikat, sedangkan penurunan cukup besar terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 22 sertifikat HP. Secara rinci jumlah sertifikat yang diterbitkan selama lima tahun di Kabupaten Pemalang dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Jumlah Petak Yang Bersertifikat di Kab. Pemalang Tahun 2006 - 2010

| No | Jenis Sertifikat Tanah | Petak | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----|------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|
| 1 | Hak milik | buah | 141.052 | 142.231 | 19.364 | 1.090 |
| 2 | Hak Pakai | buah | 1.142 | 1.166 | 1.248 | 22 |
| 3 | Hak Guna Bangunan | buah | 63 | 63 | 40 | - |

Sumber Data : Profil Daerah Kabupaten Pemalang 2009

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis setifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah jenis sertifikat Hak Milik (HM), hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat status kepemilikan tanah semakin meningkat, dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tersebut diharapkan dapat berimplikasi terhadap menurunnya konflik atau sengketa atas kepemilikan tanah di Kabupaten Pemalang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pertanahan, pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai kewenangan, hal ini sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan. Dalam pasal 2 ayat (2) kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan adalah 1) pemberian ijin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; d). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 4) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 5) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 6) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 7) pemberian ijin membuka tanah dan 8) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan kewenangan tersebut, maka peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting dan strategis dalam meningkatkan status tanah yang mempunyai kekuatan hukum serta mengantisipasi munculnya permasalahan-permasalahan atau konflik dibidang pertanahan.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan memiliki peranan yang sangat penting, sebab penduduk juga bertindak sebagai sumberdaya yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang berdasarkan data 2010 sebanyak 1.262.013 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 625.642 jiwa (49,57%) dan perempuan sebanyak 636.371 jiwa (50,43%)..

Tingkat kepadatan penduduk selama lima tahun rata-rata 1.132 jiwa/km², angka tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk masih relative rendah, kemudian angka migrasi masuk selama lima tahun terakhir sebanyak 2.915 orang/tahun dan angka migrasi keluar selama lima tahun rata-rata 1.325 orang/tahun.

Proporsi persebaran penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 adalah 30,16% tinggal di kawasan perkotaan yaitu di wilayah kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ulujami dan Randudongkal sedangkan selebihnya tinggal di kawasan pedesaan yaitu sebesar 69,84%. Persebaran tersebut mengindikasikan bahwa terjadi transformasi tempat tinggal dan peningkatan mobilitas serta dinamisasi tempat tinggal yang berarti secara makro menunjukkan peningkatan perkembangan wilayah di Kabupaten Pemalang.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk memberikan dampak yang cukup besar antara lain peningkatan pelayanan diberbagai bidang pembangunan baik kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Berdasarkan data pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama lima tahun dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Jumlah Kepala Keluarga, Penduduk Wajib KTP, Kepemilikan KTP, Pemohon Akta Kelahiran dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2005 - 2009

| No | Uraian | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Kepala Keluarga [KK] | 319.235 | 328.007 | 346.636 | 391.905 | 395.386 |
| 2 | Penduduk Wajib KTP | 841.392 | 848.521 | 880.891 | 885.924 | 927.050 |
| 3 | Kepemilikan KTP | 703.325 | 710.582 | 723.612 | 756.673 | 806.449 |
| 4 | Kepemilikan Akta Kelahiran | 558.624 | 581.092 | 631.228 | 731.310 | 782.631 |

Sumber Data : Data Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelayanan KTP dan akte kelahiran sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai target maksimal. Hal ini dikarenakan masih menghadapi kendala-kendala antara lain belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana kependudukan dan cacatan sipil serta tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil belum sesuai harapan. Oleh karena itu peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai yang sangat strategis. Hal ini mengingat penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, tuntutan dan harapan masyarakat akan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil semakin besar, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah strategi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan kemampuan aparat serta dukungan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal, cepat dan akurat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 bahwa Kabupaten Pemalang dijadikan salah satu Pilot Project penerapan KTP Elektronik (e-KTP) dari 197 Kabupaten / Kota se Indonesia, serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional sebagai arahan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan menjawab perkembangan global tentang kesetaraan dan keadilan gender. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan nilai terendah 40 dan tertinggi 80. Hasil perhitungan IPG merupakan hasil nilai komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terpilah laki-laki dan perempuan meliputi tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup (tahun), angka melek huruf (%), angka lama sekolah (tahun), dan tingkat pendapatan (Rp). Sementara Indeks pemberdayaan Perempuan (IDG) diketahui dari hasil perhitungan besarnya persentase (%) perempuan di parlemen lokal (DPRD), persentase perempuan pekerja profesional, persentase perempuan dalam angkatan kerja, dan upah pekerja perempuan dalam sektor non pertanian (Rp) per bulan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat terkait erat dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dapat diketahui dari tingkat pencapaian kesetaraan dan

keadilan gender diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2004 – 2008 angka IPG menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya IPG tahun 2004 sebesar 56,8 meningkat menjadi 61,8 pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 5,0 selama lima tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dari aspek kesetaraan gender mengalami peningkatan, terutama meningkatnya pendidikan, angka melek huruf. Walaupun peningkatan tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 64,6. IPG Kabupaten Pemalang menduduki ranking 32 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rendahnya IPG di Kabupaten Pemalang menunjukkan masih adanya kesenjangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan hasil pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang dapat diketahui dari nilai IPG dari tahun 2004 – 2008 sebagai berikut :

Tabel 2.47
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang Tahun 2004 - 2008

| No | Uraian | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Angka Harapan Hidup (tahun) <ul style="list-style-type: none">• Laki-laki• Perempuan | 64,1 68,0 | 64,6 68,3 | 64,7 68,8 | 65,1 69,0 | 65,4 69,3 |
| 2 | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) <ul style="list-style-type: none">• Laki-laki• Perempuan | 6,1 5,1 | 6,2 5,3 | 6,5 5,6 | 6,7 5,8 | 6,8 5,9 |
| 3 | Angka Melek Huruf (%) <ul style="list-style-type: none">• Laki-laki• Perempuan | 91,3 78,9 | 91,6 82,2 | 92,1 82,4 | 92,6 82,5 | 93,1 82,9 |
| 4 | Persentase (%) perempuan dalam Angkatan Kerja | 37,9 | 37,2 | 39,4 | 39,6 | 40,5 |
| | Nilai IPG | 56,8 | 58,3 | 60,5 | 61,4 | Tad |

Sumber : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2004-2008). Keterangan : data tahun 2008 dan 2009 belum tersedia

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki, terutama pada rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, yaitu tahun 2007 antara 6,7 (7 tahun) berbanding 5,8 (6 tahun), terutama pendidikan perempuan di wilayah perdesa. Demikian pula dengan besarnya buta aksara di kalangan perempuan yang diketahui dari besarnya angka melek huruf laki-laki tahun 2007 sebesar 92,6% dan perempuan 82,5%, maka jumlah perempuan di Kabupaten Pemalang yang buta huruf sebesar 17,5% terutama penduduk di wilayah perdesaan dan wilayah terpencil. Jumlah perempuan kelompok usia produktif yang termasuk angkatan kerja termasuk rendah (2007) sebesar 39,6%. Dengan demikian maka diketahui sebesar 60,4% perempuan kelompok usia produktif (15 – 54 tahun) sebagai ibu rumah tangga dan pekerja domestik atau bekerja di sektor informal.

Tabel 2.48
Indeks Pemberdayaan Gender IDG Kabupaten Pemalang
Tahun 2004 - 2008

| No | Uraian | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Perempuan di Parlemen (%) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 2 | Perempuan Pekerja Profesional (%) | 38,7 | 44,1 | 44,8 | 46,6 | 47,28 |
| 3 | Perempuan dalam Angkatan Kerja (%) | 37,9 | 37,2 | 39,4 | 39,6 | 40,50 |
| 4 | Upah Pekerja Perempuan Non Pertanian (ribu Rp) | 371,7 | 438,8 | 516,4 | 709,6 | 726,0 |
| | Nilai IDG | 57,5 | 57,9 | 59,9 | 60,4 | Tad |

Sumber : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2004-2008). Keterangan : data tahun 2008 belum tersedia

IDG menggambarkan partisipasi dan prestasi perempuan di parlemen, persentase perempuan pekerja profesional, persentase perempuan dalam angkatan kerja, dan upah pekerja perempuan dalam sektor non pertanian. Besarnya nilai IDG di Kabupaten Pemalang tahun 2004 – 2007 meningkat cukup baik, yaitu tahun 2004 sebesar 57,5 meningkat menjadi 60,4 tahun 2007, atau meningkat sebesar 2,9 dalam waktu tiga tahun. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan IDG adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen (11,1%) atau lima orang perempuan yang menjadi anggota DPRD pada periode 2004 – 2009 dan angkatan kerja perempuan (2007) sebesar 39,6%, hal ini disebabkan tingkat pendidikan dan ketarampilan perempuan masih rendah dan persentase perempuan yang bekerja secara profesional. Masih lebih banyak kaum perempuan yang bekerja di sektor domestik, menganggur atau menjadi ibu rumah tangga (sebesar 60,4%) merupakan potensi sumberdaya manusia yang perlu diberdayakan di masa-masa mendatang.

Di Kabupaten Pemalang sudah terdapat pos pelayanan terpadu bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Jayandu Widuri sejak tahun 2008. Kejadian KDRT dari tahun 2006–2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 jumlah anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 8 orang, meningkat menjadi 40 orang pada tahun 2010. Perencanaan responsif gender dimulai pada tahun 2012 untuk 11 SKPD minimal satu kegiatan. Kondisi ini masih belum sesuai amanat Permendagri 15 tahun 2008.

I. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Keluarga Berencana

Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) dari tahun 2006 – 2010 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 1,83%. Pada tahun 2006 jumlah PUS sebanyak 239.189 pasangan meningkat pada tahun 2010 menjadi 261.936 pasangan. PUS yang telah mengikuti Keluarga Berencana secara aktif dari tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PUS yang memiliki istri dibawah usia 20 tahun sebesar 2,55%.

Pada tahun 2006 persentase Keluarga Berencana yang aktif sebesar 74,5% meningkat pada tahun 2010 menjadi 81,37%. Alat kontrasepsi yang digunakan peserta keluarga berencana aktif paling banyak adalah suntik. Pada tahun 2010 pengguna alkon (alat kontrasepsi) suntik sebesar 58,16%. PUS Kabupaten Pemalang sangat sedikit yang memilih alat kontrasepsi jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengguna alkon IUD, Implan, MOW dan MOP.

Partisipasi aktif laki-laki dalam program KB masih sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi MOP (Modus Operasi Pria) dan Kondom. Persentase pengguna alkon MOP pada peserta KB aktif sebesar tahun 2006 sebesar 5,16% menurun pada tahun 2010 menjadi 4,11%, sedangkan persentase pengguna alkon kondom pada tahun 2006 sebesar 0,23% meningkat pada tahun 2010 menjadi 0,47%.

Jumlah pasangan usia subur yang ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi jumlah anak, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi (unmetneed) pada tahun 2010 sebesar 14,95%. Kondisi jauh lebih besar dari target SPM Keluarga Berencana yaitu sebesar 7% pada tahun 2015. Sementara itu DO KB pada tahun 2010 sebanyak 16,22%.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada program KB, perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Kabupaten Pemalang telah memiliki petugas penyuluh KB dan petugas Pembina KB di tingkat desa. Sampai dengan tahun 2010 Petugas Lapangan KB (PLKB) baru sebanyak 74 orang, sedangkan petugas Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 232 orang, sedangkan Sub PPKBD sebanyak 1.275 orang. Berdasarkan SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55 /HK-010/B5/2010, ratio PLKB dengan desa belum tercapai. SPM mengamanatkan bahwa ratio PLKB dengan kelurahan/desa adalah 2, artinya

setiap kelurahan/desa memiliki PLKB 2 orang. Kabupaten Pemalang memiliki kelurahan/desa sebanyak 222 kelurahan/desa, sehingga dibutuhkan PLKB sebanyak 444 orang. Jadi PLKB di Kabupaten Pemalang masih kurang sebanyak 370 orang.

b) Keluarga Sejahtera

Indikator keberhasilan pembangunan sub urusan keluarga sejahtera adalah berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Pada tahun 2006 – 2010 keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera sebesar 56,52%. PUS yang telah bergabung dalam program UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sebanyak 50,59%.

Dalam rangka penurunan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I telah dilakukan berbagai program diantaranya adalah melakukan penguatan kelompok-kelompok dalam ketahanan keluarga yaitu kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Sampai dengan tahun 2010 jumlah kelompok BKB sebanyak 293 ke kelompok, BKR sebanyak 243 kelompok, BKL sebanyak 240 kelompok. Sedangkan dalam rangka meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi telah dibentuk Pusat Informasi dan Konseling untuk kesehatan reproduksi remaja. Sampai dengan tahun 2010 PIK KRR sebanyak 17 unit.

m. Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2005-2009, berdasarkan jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada rata-rata menunjukkan peningkatan dan penurunan pada setiap jenis PMKS. Indikator masalah sosial yang menunjukkan adanya penurunan/berkurang terdapat pada Anak Korban tindak Kekerasan (20,24%), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (17,25%), Anak Jalanan (16,76%), Lanjut Usia Terlantar (5,47%), Keluarga Fakir Miskin (7,31%), Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (0,39%), Keluarga Rentan (5,30%). Indikator masalah sosial yang menunjukkan peningkatan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan adalah Jumlah Penyandang Cacat, Jumlah anak Terlantar, Jumlah anak Nakal, Anak Balita Terlantar, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan dan Korban Penyalagunaan Narkotika dan Zat Adiptif (Napza).

Berdasarkan jumlah penyandang masalah-masalah sosial di Kabupaten Pemalang yang sudah ditangani tahun 2009 dengan menggunakan dana APBD I adalah, Penyandang Cacat (60 orang), anak Terlantar (40 orang), anak Nakal (70 orang), dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (30 orang). Sementara itu yang menggunakan dana APBD adalah Lanjut Usia Terlantar (250 orang), dan yang menggunakan dana APBN adalah Korban Penyalagunaan Narkotika dan Zat Adiptif (Napza) sebanyak 20 orang dan Keluarga Fakir Miskin sebanyak 240 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Pemalang yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010

| No | Jenis PMKS | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Rata-rata |
|----|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | Jumlah Penyandang Cacat | orang | 6.143 | 6.129 | 7.972 | 6.241 | 6.338 | 6,374 |
| 2 | Jumlah anak Terlantar | orang | 5.916 | 4.746 | 5.565 | 5.565 | 6.432 | 5,635 |
| 3 | Jumlah anak Nakal | orang | 119 | 121 | 103 | 113 | 97 | 111 |
| 4 | Anak Balita Terlantar | orang | 1.697 | 3.898 | 1.600 | 1.600 | 2.517 | 2,144 |
| 5 | Anak Korban tindak Kekerasan | orang | 46 | 38 | 13 | 13 | 7 | 27 |
| 6 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | orang | 8.917 | 6.415 | 4.482 | 4.140 | 5.947 | 6,518 |
| 7 | Anak Jalanan | orang | 333 | 382 | 106 | 106 | 120 | 236 |
| 8 | Wanita Korban Tindak Kekerasan | orang | 26 | 36 | 28 | 28 | 41 | 31 |
| 9 | Lanjut Usia Terlantar | orang | 6.516 | 4.991 | 4.382 | 4.384 | 6.743 | 5,458 |
| 10 | Tuna Susila | orang | 66 | 66 | 103 | 103 | 81 | 80 |
| 11 | Pengemis | orang | 316 | 124 | 263 | 263 | 228 | 218 |
| 12 | Gelandangan | orang | 181 | 28 | 25 | 25 | 15 | 49 |
| 13 | Korban Penyalagunaan Narkotika dan Zat Adiptif | orang | 5 | 10 | 219 | 219 | 111 | 95 |
| 14 | Keluarga Fakir Miskin | KK | 106.273 | 112.862 | 72.862 | 72.874 | 59.203 | 88,391 |
| 15 | Kel. Berumah Tidak Layak Huni | KK | 22.956 | 17.638 | 18.428 | 20.133 | 18.606 | 19,840 |
| 16 | Keluarga Rentan | KK | 1.043 | 886 | 442 | 562 | 581 | 735 |
| | Jumlah | | 158.702 | 162.559 | 160.377 | 118.601 | 109.077 | 137,949 |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2010

Upaya penanganan permasalahan PMKS di Kabupaten Pemalang masih belum optimal, antara lain disebabkan belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial/yayasan, embrional maupun desa, karang taruna, wanita pemimpin pendayagunaan sosial, dunia usaha, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan jumlah sarana sosial. Jumlah PSKS di Kabupaten Pemalang tiap tahunnya tidak mengalami peningkatan. Peningkatan hanya pada jumlah pekerja sosial masyarakat pada tahun 2006 sebanyak 1.110 orang meningkat menjadi 5.772 orang pada tahun 2010. Jumlah Kelembagaan Sosial di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Kelembagaan Sosial di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010

| No. | Kelembagaan Sosial | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pekerja Sosial Masyarakat | orang | 1.110 | 1.110 | 5.772 | 5.772 | 5.772 |
| 2 | Organisasi Sosial/Yayasan | buah | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 3 | Organisasi Sosial Embrional | buah | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Organisasi Sosial Desa | buah | 222 | 222 | 222 | 222 | 289 |
| 5 | Karang Taruna | buah | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 6 | Wanita Pemimpin Pendayagunaan Sosial | orang | 2.220 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| 7 | Dunia Usaha | buah | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 8 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat | buah | - | - | - | 6 | 6 |
| 9 | Jumlah Sarana Sosial Pemerintah | Buah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Jumlah Sarana Sosial Swasta | Buah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2010

Pada urusan sosial lainnya adalah penanganan kejadian bencana, di Kabupaten Pemalang pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial termasuk kekeringan yang sudah dilaksanakan adalah berupa bantuan uang tunai dan beras. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini jumlah bantuan yang diberikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 bantuan uang tunai sebesar Rp.

114.150.000,- dan beras senilai Rp. 2.750.000,- meningkat ditahun 2009 menjadi bantuan uang tunai sebesar Rp.157.000.000,- dan beras senilai Rp. 33.000.000,-.

Dilihat dari ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana/bencana alam yang dimiliki Kabupaten Pemalang tahun 2009 masih sangat minim yaitu tenda pleton (8 unit), tenda regu (3 unit), Velbed (100 buah), alat dapur umum lapangan (3 set), perahu karet/mesin (2 set), rompi renang (8 buah) dan genset (1 buah). Kejadian bencana di Kabupaten Pemalang dominan tanah longsor, dengan beberapa kejadian banjir. Bencana dengan korban cukup besar terjadi di Kecamatan Watukumpul berupa kejadian bencana tanah longsor, yaitu rumah penduduk rusak dan terancam longsor. Dengan adanya daerah rawan bencana di Kabupaten Pemalang, hendaknya pemerintah meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana/bencana alam yang cukup memadai.

n. Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian dan keterpaduan penanganan. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.51
Jumlah Angkatan Kerja, Pengangguran, TPAK dan TPT
di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010

| No. | Indikator | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah Angkatan Kerja | 912.470 | 981.289 | 935.168 | 621.105 | 676.792 |
| 2 | Jumlah Pengangguran | 318.670 | 376.454 | 358.761 | 69.504 | 54.134 |
| 3 | TPAK (%) | 66,88 | 71,92 | 67,54 | 55,00 | 53,63 |
| 4 | TPT (%) | - | - | 11,13 | 8,85 | 8,00 |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, Tahun 2010

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2006-2010 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 8,29% pertahun. Pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja mencapai 935.168 orang, tetapi terjadi penurunan sangat drastis pada tahun 2009 menjadi 621.105 orang dan pada tahun 2010 meningkat kembali menjadi sebanyak 676.792 orang. Sementara itu, angka pengangguran di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2006-2010 cenderung meningkat. Pada tahun 2008 jumlah pengangguran sebanyak 358.761 orang, pada tahun 2009 menurun menjadi 69.504 orang dan pada tahun 2010 sebanyak 54.134 orang.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan rata-rata 4,38% pertahun, mencapai puncaknya pada tahun 2007 sebesar 71,92% dan turun sangat drastis menjadi 55,00% di tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi sebesar 53,63%. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2008 mencapai 11,13%, turun menjadi 8,85% di tahun 2009 dan pada sebesar 8,00% pada tahun 2010. Rendahnya penurunan tingkat pengangguran terbuka banyak dipengaruhi oleh kualifikasi dan kualitas angkatan kerja yang ada.

Tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di masa mendatang semakin tinggi dan tantangan yang akan dihadapi tenaga kerja di Kabupaten Pemalang adalah kompetitor/pesaing tenaga kerja dari luar Kabupaten Pemalang yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang lebih baik dibandingkan calon tenaga kerja dari Kabupaten Pemalang itu sendiri. Hal ini akan meningkatkan pengangguran di Kabupaten Pemalang apabila tuntutan keahlian angkatan kerja di Kabupaten Pemalang tidak menyesuaikan dengan tuntutan yang ada. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan SDM tenaga kerja adalah melalui pelatihan.

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran terus dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, penyelenggaraan bursa kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Sedangkan upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan.

Tabel 2.52
Upaya Peningkatan SDM Tenaga Kerja di Kab. Pemalang Tahun 2006-2010

| No. | Jenis Kegiatan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Diklat untuk tenaga kerja | | | | | |
| | Jumlah pelatihan | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 |
| | Peserta pelatihan | 120 | 120 | 180 | 160 | 60 |
| 2 | Diklat untuk petugas/pegawai bidang ketenagakerjaan | | | | | |
| | Jumlah diklat | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | Peserta Pelatihan | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Jumlah Lembaga Bursa Kerja/LPTKS | 25 | 29 | 32 | 37 | 37 |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2010

Dilihat dari jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pemalang, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan diklat untuk tenaga kerja pada tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 120 orang, tahun 2008 sebanyak 180 orang, tahun 2009 menurun menjadi sebanyak 160 orang dan pada tahun 2010 menurun sebanyak 60 orang. Jumlah peserta diklat untuk petugas atau pegawai bidang tenaga kerja, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tiap tahunnya rata-rata 1-3 peserta. Jumlah Lembaga Bursa Kerja/LPTKS di Kabupaten Pemalang, dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlahnya meningkat tiap tahunnya. Tercatat Jumlah Lembaga Bursa Kerja/LPTKS sebanyak 25 buah pada tahun 2006, meningkat menjadi 37 buah di tahun 2009 dan 2010.

Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Pemalang mencakup 9 sektor, yaitu pertanian, pertambangan industri pengolahan, listrik gas dan air, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa. Penduduk yang bekerja berdasarkan mata pencaharian di Kabupaten Pemalang lima tahun terakhir menunjukkan penurunan rata-rata 1,51% per tahun. Sektor pertanian masih mendominasi dalam memberikan kesempatan kerja di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2010 penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, yang didalamnya mencakup kehutanan, perburuhan dan perikanan mencapai 372.924 orang (60,00%). Penyerapan tenaga kerja tertinggi kedua adalah dari sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel; mencapai 108.205 orang (19,63%). Hal ini dapat dilihat bahwa pekerja di Kabupaten Pemalang masih terkonsentrasi pada profesi petani dan tenaga kerja produksi. Profesi-profesi lain yang tergolong memiliki produktifitas tinggi termasuk profesional/teknisi dan manajerial/administrasi masih sangat rendah proporsinya.

Tabel 2.53
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2005-2010

| No | Jenis Data | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perburuhan, dan perikanan | 322.578 | 320.167 | 302.878 | 303.980 | 372.924 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 3.483 | 2.951 | 2.792 | 3.998 | 3.866 |
| 3 | Industri Pengolahan | 38.521 | 35.288 | 33.382 | 34.934 | 32.818 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air | 4.752 | 6.172 | 5.839 | 6.831 | 6.333 |
| 5 | Bangunan | 49.870 | 56.090 | 53.061 | 54.913 | 49.787 |
| 6 | Perdagangan Besar, eceran, rumah makan dan hotel | 97.084 | 101.107 | 95.647 | 97.222 | 108.205 |
| 7 | angkutan, pergudangan dan komunikasi | 8.371 | 9.140 | 8.646 | 9.828 | 9.114 |

| No | Jenis Data | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8 | Keuangan, Asuransi, Usaha sewa bangunan, tanah dan jasa | 2.492 | 1.958 | 1.825 | 2.911 | 2.749 |
| 9 | Jasa Kemasyarakatan | 34.518 | 37.690 | 35.655 | 36.984 | 34.852 |
| | Jumlah | 561.669 | 570.563 | 539.725 | 551.601 | 622.658 |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2010

Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2006-2010 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah mencapai sekitar 1.371 orang. Tenaga kerja AKAD sebagian besar adalah perempuan yaitu sebanyak 1.032 orang, sementara tenaga kerja AKAD laki-laki hanya berjumlah sekitar 339 orang. Jumlah tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) di Kabupaten Pemalang perkembangannya selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan fluktuatif, mencapai puncak pada tahun 2007 yang mencapai 4.590 orang, menurun di tahun 2010 menjadi 701 orang. Dilihat dari jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kabupaten Pemalang selama tahun 2006-2010 tiap tahunnya mengalami peningkatan, di tahun 2006 hanya sebanyak 7 orang, meningkat menjadi 113 orang di tahun 2009.

Tabel 2.54
Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010

| No | Jenis Data | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Penempatan Tenaga Kerja AKAD/AKL | | | | | |
| a | Antar Kerja Antar Daerah | | | | | |
| | Laki-laki | 65 | 234 | - | - | 339 |
| | Perempuan | 107 | 392 | 60 | 2 | 1.032 |
| | Jumlah | 172 | 626 | 60 | 2 | 1.371 |
| b | Antar Kerja Lokal | | | | | |
| | Laki-laki | 1.220 | 2.366 | 476 | 1.611 | 401 |
| | Perempuan | 962 | 2.524 | 1.426 | 718 | 300 |
| | Jumlah | 2.182 | 4.890 | 1.902 | 2.329 | 701 |
| 2 | PHK | 4 | 11 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | Jumlah TK PHK | 5 | 24 | 3 | 155 | 76 |
| 4 | Kasus perselisihan tenaga kerja | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Kasus kecelakaan tenaga kerja | 15 | 17 | 17 | 27 | 36 |
| 6 | Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum | 633.098 | 668.996 | 731.230 | 731.229 | 765.622 |
| 7 | Rata-rata Upah Minimum Regional | 530.000 | 540.000 | 630.000 | 675.000 | 675.000 |
| 8 | Rasio upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) | 84,11 | 85,29 | 85,94 | 86,16 | 88,16 |
| 9 | TKI di Luar Negeri (penempatan TKI) | 7 | 58 | 100 | 113 | |
| | a. Tenaga Kerja Wanita | - | 53 | 35 | 19 | |
| | b. Tenaga Kerja Pria | - | 5 | 65 | 94 | |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2010

Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya strategis dan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (pencari kerja/pengangguran) melalui program kerja AKAL (Antar Kerja Antar Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Upaya ini juga dilakukan dalam rangka menanggulangi tindakan nakal dan tidak bertanggungjawab dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja oleh oknum-oknum PPTKIS maupun PJTKI yang berakibat ketidakjelasan dalam penempatan dan perlindungan terhadap keselamatan dan hak tenaga kerja. Sudah banyak terjadi kasus tenaga kerja baik didalam maupun luar negeri melalui PPTKIS yang direkrut dan ditempatkan secara ilegal sehingga sangat merugikan tenaga kerja tersebut dan berimbas pada kesan kurangnya perlindungan TKI oleh Pemerintah.

Pada tahun 2007 Kabupaten Pemalang telah membuat terobosan di bidang penempatan TKI asal Kabupaten Pemalang melalui kerjasama dengan Liang Tian

School di Zuhai, China, dengan biaya APBD Kabupaten Pemalang untuk penempatan TKI di Hongkong, China dan Malaysia. Untuk penempatan di dalam negeri Kabupaten Pemalang mempunyai program penempatan tenaga kerja di Semarang, Lampung dan Kota Batam. Keseluruhan program penempatan TKI ini dilakukan setelah dilakukan kajian yang cukup mendalam dan komprehensif tentang kepastian/jaminan perlindungan hak dan hukum tenaga kerja melalui "job canvassing". Terobosan yang dilakukan dalam proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah tingkat desa dan kecamatan melalui pembentukan Satgas (Satuan Tugas) CTKI. Dengan pembentukan Satgas ini diharapkan maka masyarakat akan mudah dan dekat dalam mencari informasi peluang dan lowongan kerja.

o. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan jumlah koperasi di Kabupaten Pemalang rata-rata sebesar 1,8%. Pada tahun 2006 jumlah koperasi sebanyak 384 unit meningkat menjadi 423 unit pada tahun 2010. Perkembangan ini cukup menggembirakan, mengingat koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Walaupun demikian jumlah koperasi tidak aktif dari tahun 2005 – 2008 jumlah koperasi tidak aktif cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 51 unit meningkat pada tahun 2010 menjadi 155 unit.

Tabel 2.55
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2010

| No | Keaktifan Koperasi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Koperasi Aktif | 337 | 342 | 342 | 249 | 268 |
| 2 | Koperasi Tidak Aktif | 47 | 49 | 63 | 160 | 155 |
| | Jumlah | 384 | 391 | 405 | 409 | 423 |

Sumber : Dinas KopUKMperindag, 2010

Jenis koperasi yang berkembang di Kabupaten Pemalang cukup banyak. Sampai dengan tahun 2009 Kabupaten Pemalang memiliki 21 jenis koperasi yaitu KUD, Kopontren, Kopinkra, KOPTI, KPRI, Koperasi karyawan, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Angkatan Udara, Koperasi Angkatan Kepolisian, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Wanita, Koperasi Profesi, Koperasi Veteran, Koperasi Wredatama, Koperasi Pepabri, Koperasi Pedagang Kakilima, Koperasi Lain-lain dan Koperasi Sekunder.

Tabel 2.56
Perkembangan Jenis Koperasi di Kab. Pemalang Tahun 2006 - 2010

| No | Jenis Koperasi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | KUD | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Kopontren | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 3 | Kopinkra | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | KOPTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | KPRI | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| 6 | Koperasi karyawan | 35 | 35 | 36 | 35 | 37 |
| 7 | Koperasi Angkatan Darat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Koperasi Angkatan Udara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Koperasi Angkatan Kepolisian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Koperasi Serba Usaha | 87 | 90 | 95 | 98 | 104 |
| 11 | Koperasi Pasar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | Koperasi Simpan Pinjam | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| 13 | Koperasi Angkutan Darat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Koperasi Wanita | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | Koperasi Profesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Koperasi Veteran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Koperasi Wredatama | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18 | Koperasi Pepabri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | Koperasi Pedagang Kakilima | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Koperasi Lain-lain | 74 | 75 | 79 | 78 | 83 |

| No | Jenis Koperasi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|-------------------|------|------|------|------|------|
| 21 | Koperasi Sekunder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah | 384 | 391 | 405 | 409 | 423 |

Sumber : Dinas KopUKMperindag, 2010

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah juga secara signifikan menyerap tenaga kerja. Hal ini karena secara riil juga memiliki multiplier terhadap sektor dan usaha yang lain. Berikut digambarkan kondisi sektor UMKM dan penyerapannya terhadap tenaga kerja di Kabupaten Pemalang Tahun 2010.

Tabel 2.57
Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor UMKM Tahun 2010

| No | Uraian/Sektor | Jumlah Naker (orang) |
|----|---|----------------------|
| 1 | Industri | 34.600 |
| 2 | Perdagangan | 18.995 |
| 3 | Koperasi | 2.790 |
| 4 | Pertanian | 76.626 |
| 5 | Sektor lainnya - Pertambangan dan penggalian - Listrik, air dan gas - Hotel, restoran - Angkutan - Keuangan, persewaan dan jasa-jasa lainnya | 250.322 |
| | Total | 383.333 |

Sumber : Dinas Kop UKM Perindag, 2010

p. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal merupakan salah satu urusan penting dalam pembangunan ekonomi di satu daerah. Penanaman modal merupakan trigger bagi penggerak ekonomi daerah dan katup penyelamat bagi berbagai permasalahan ekonomi dan kesejahteraan. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2005 – 2008 menunjukkan kinerja meningkat. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota dalam hal penanaman modal untuk (1) Menyusun perencanaan penanaman modal; (2) Meningkatkan fasilitasi bagi peningkatan penanaman modal di kab/kota; dan (3) Meningkatkan kinerja perijinan dan pelayanan penanaman modal.

Menurut perpres 27 tahun 2009 tentang Pelayanan satu Pintu Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk: (1) mengurangi hambatan dalam pelayanan public dan perjinan usaha bagi penanaman modal di kab/kota; (2) Mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal di daerah; dan (3) Mengurangi hambatan struktural dan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman modal di daerah.

RPJMN tahun 2009 – 2014 mengatur kebijakan tentang penanaman modal sebagai berikut :

- 1) Peningkatan deregulasi penanaman modal dan perijinan penanaman modal di di daerah.
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal di pusat dan daerah.
- 3) Meningkatkan pelayanan perijinan secara elektronik (on line).
- 4) Meningkatkan koordinasi bidang penanaman modal di daerah.
- 5) mengurangi hambatan dan kendala perijinan dalam penanaman modal di daerah.
- 6) meningkatkan daya saing daerah dalam pengembangan perekonomian daerah.

Berdasarkan ketentuan atau amanat undang-undang dan Perpres, serta arahan RPJMN tahun 2009 – 2014 maka pemerintah Kabupaten Pemalang telah merespon dengan membentuk Unit Pelayanan Perijinan Satu Pintu. Hambatan perijinan penanaman modal dikurangi bahkan ditiadakan dengan adanya unit kerja ini. Namun hasilnya belum menunjukkan kinerja yang meyakinkan dalam hal penanaman modal.

Jumlah Investasi di Kabupaten Pemalang antara lain dapat dilihat dari besarnya alokasi kredit yang disalurkan melalui Bank Umum dan BPR. Penggunaan

Kredit yang digunakan untuk investasi menunjukkan perkembangan yang meningkat. Demikian juga alokasi kredit yang digunakan untuk modal kerja menunjukkan kecenderungan meningkat. Perkembangan alokasi kredit dan penggunaannya terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.58
Besarnya Alokasi Kredit Melalui Bank Umum dan BPR dan Penggunaannya di Kabupaten Pemalang

| No | Pengunaan | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
|----|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | Modal Kerja | 377.419 | 416.658 | 429.110 | 528.884 |
| 2 | Investasi | 19.711 | 26.549 | 37.823 | 48.462 |
| 3 | Konsumsi | 165.954 | 216.371 | 388.740 | 526,446 |
| | Jumlah | 563.084 | 659.578 | 855.673 | 1.103.792 |

Sumber data : Bank Indonesia Perwakilan Semarang, 2008

Keterangan: *) Tahun 2008 sampai dengan bulan Juli 2008

Investasi PMDN di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 2010 terdapat sebanyak 3 (tiga) investor, yaitu di bidang industri tekstil dengan total investasi mencapai Rp.120.641.024.027,-. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.242 orang pada tahun 2010. Jumlah Investasi PMDN di Kabupaten Pemalang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Investasi PMDN dan Tenaga Kerja Yang Terserap Tahun 2005 – 2009

| No | PMDN | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Jumlah perusahaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Nilai Investasi (000) | 26.690.488 | 28.500.000 | 158.936.459 | 116.120.641 | 120.641.024 |
| 3 | Jumlah Tenaga Kerja yang akan terserap | 1.834 | 2.173 | 2.277 | 2.243 | 2.242 |

Sumber : Bagian Perekonomian Kabupaten Pemalang, tahun 2010.

Kondisi rendahnya penanaman modal juga dipengaruhi oleh rendahnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal. Kondisi jalan, ketersediaan air, pergudangan, jarak antara pelabuhan ekspor dengan lokasi dan sarana perekonomian mempengaruhi minat investor menanamkan modal di Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan keterangan dari Kantor Pelayanan Terpadu dan Bagian Ekonomi, kendala investasi di Kabupaten Pemalang adalah pelayanan perijinan investasi belum optimal disusul dengan lemahnya kebijakan yang mendukung investasi daerah. Sarana pendukung terutama jaringan jalan di Kabupaten Pemalang belum memadai sampai ke pelosok daerah. Kondisi jalan masih sempit dan banyak yang rusak. Di Kabupaten pemalang juga belum banyak terdapat pergudangan yang melayani perusahaan dalam mendistribusikan barang produksinya. Promosi daerah sudah dilakukan melalui berbagai event, namun hasilnya belum optimal. Hal ini karena pelaksanaan promosi investasi daerah belum optimal. Materi untuk investasi perlu diperbaharui agar lebih informatif dan menarik investor.

q. **Kebudayaan**

Pembangunan di bidang kebudayaan pada Kabupaten Pemalang meliputi pemeliharaan aset-aset peninggalan budaya yang bernilai sejarah tinggi dan pembinaan kelompok-kelompok kesenian/kebudayaan yang tumbuh subur di Kabupaten Pemalang. Di Kabupaten Pemalang saat ini terdapat sejumlah benda dan situs peninggalan kebudayaan masa lampau (purbakala) berupa arca, lingga, petilasan, petirtaan, monumen, situs, masjid kuno, gereja kuno, kelenteng, bangunan kuno dan makam kuno. Kondisi aset-aset peninggalan budaya tersebut saat ini masih sangat memprihatinkan, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara aset-aset peninggalan budaya.

Tabel 2.60
Benda Cagar Budaya di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010

| Benda Cagar Budaya | Tahun | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Arca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingga | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Petilasan | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Petirtaan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Monumen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Situs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Masjid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gereja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klenteng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bangunan Kuno | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Makam Kuno | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Jumlah | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada beberapa tahun terakhir, di Kabupaten Pemalang tumbuh sejumlah kelompok-kelompok kesenian, baik kelompok kesenian tradisional maupun modern. Kelompok kesenian tradisional pada tahun 2010 meliputi kelompok tari tradisional, rebana, campursari, tembang jawa/karawitan, sintren, kuda kepang, keroncong dan dalang/wayang. Sedangkan kelompok kesenian modern meliputi kelompok organ tunggal, orkes dangdut, grup band, sanggar tari modern dan sanggar modelling. Pada tahun 2010 jumlah kesenian modern meningkat sebanyak 17 buah menjadi 186 buah pada tahun 2010. Jenis kesenian modern di Kabupaten Pemalang meliputi organ tunggal, group band, tari modern dan sanggar modelling. Dengan demikian jumlah group kesenian (seni tradisional dan modern) di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 berjumlah 614 group/kelompok.

Tabel 2.61
Perkembangan Kesenian Tradisional di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010 (buah)

| Kesenian Tradisional | Tahun | | | | | |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dalang/Wayang | 81 | 80 | 83 | 87 | 82 | 40 |
| Tembang Jawa/Karawitan | 90 | 90 | 115 | 129 | 130 | 129 |
| Sintren | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| Kuda Kepang | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Campursari | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sanggar Tari Tradisional | 48 | 48 | 48 | 52 | 54 | 54 |
| Rebana | 92 | 99 | 99 | 109 | 112 | 112 |
| Keroncong | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Jumlah | 370 | 373 | 401 | 433 | 432 | 428 |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 2.62
Perkembangan Kesenian Modern di Kabupaten Pemalang
Tahun 2005 – 2010 (buah)

| Kesenian Modern | Tahun | | | | | |
|---------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Organ Tunggal | 32 | 34 | 38 | 38 | 40 | 44 |
| Orkes Dangdut | 41 | 41 | 43 | 44 | 46 | 50 |
| Grup Band | 47 | 47 | 50 | 54 | 63 | 72 |
| Sanggar Tari Modern | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Sanggar Modelling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah | 138 | 140 | 149 | 154 | 169 | 186 |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Selama ini pemerintah telah memperhatikan kehadiran kelompok-kelompok kesenian tersebut, namun perhatian lebih besar masih tetap diperlukan, supaya mereka mampu tumbuh dan berkembang lebih baik, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan bangsa. Kelompok-kelompok kesenian tersebut selama ini telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah, hal ini dapat dibuktikan oleh Kabupaten Pemalang yang telah mengirimkan duta-duta budaya baik ke event di tingkat propinsi sampai dengan tingkat internasional. Pada tahun 2009 Kabupaten Pemalang mengirimkan duta budaya ke tingkat provinsi sebanyak 5 kegiatan, tingkat nasional sebanyak 2 kegiatan dan ditingkat internasional sebanyak 1 kegiatan.

Adapun kegiatan kesenian yang berupa festival seni dan budaya yang dilaksanakan selama tahun 2010 ada sebanyak 5 kegiatan, jumlahnya menurun dari tahun 2009 (13 kegiatan) dan 2008 (10 kegiatan). Di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat 33 benda, situs dan kawasan cagar budaya.

r. Pemuda dan Olah Raga

Data statistik menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pemalang adalah penduduk usia muda, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten pemalang berusia di bawah 40 tahun mencapai 30,26% (490.756 jiwa) dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Pemalang (1.391.771 jiwa). Kondisi yang demikian merupakan potensi bagi tersedianya asset kader pemimpin, pelopor dan penggerak pembangunan. Potensi pemuda yang cukup dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan apabila potensi tersebut dikembangkan secara baik dan berkelanjutan, sebaliknya apabila potensi cukup besar tersebut tidak dikembangkan secara baik akan menjadi hambatan serta menimbulkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemuda seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja maupun tindakan kriminal.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dengan memfasilitasi aktivitas kepemudaan baik lintas internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Fasilitasi aktivitas kepemudaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan.

Peran organisasi kepemudaan sangat penting dan strategis, melalui organisasi kepemudaan diharapkan penyaluran bakat dan minat dikalangan generasi muda untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam berorganisasi maupun dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan dapat terwujud. Jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 250 Organisasi pemuda yang dikoordinir oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Pemalang. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2010 sebanyak 28 kegiatan.

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Pemalang, baik olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Sarana dan prasarana olah raga yang bertaraf nasional juga belum banyak dimiliki oleh Kabupaten Pemalang. Di kabupaten Pemalang terdapat 24 organisasi olahraga dan peringkat Kabupaten Pemalang dalam PORDA Provinsi Jawa Tengah turun dari

peringkat 15 pada tahun 2006 menjadi peringkat 26 pada tahun 2010 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah.

s. Kesbangpoldagri

Perkembangan demokratisasi dan dinamika sosial dalam masyarakat semakin baik semenjak dilaksanakan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001. Dinamika perubahan sosial terutama ditandai oleh meningkatnya keterbukaan informasi publik, meluasnya peran media massa baik dari televisi nasional, radio nasional dan lokal yang mudah menjangkau wilayah lebih luas dengan layanan streaming melalui internet di perdesaan. Banyaknya media cetak baik nasional maupun regional yang memiliki perwakilan di Kabupaten Pemalang. Jumlah media massa cetak nasional sebanyak 36 surat kabar nasional dan 3 surat kabar lokal.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat ditandai oleh keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 yang telah diselesaikan dalam satu putaran, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung tahun 2009 diselesaikan satu putaran. Jumlah TPS di Kabupaten Pemalang sebanyak 3.468 unit yang tersebar di 222 desa/kelurahan yang melayani sebanyak 1.052.230 orang, pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki, yaitu perempuan sebanyak 50,38% dan laki-laki 49,62%. Dalam kegiatan tersebut rata-rata setiap TPS melayani sebanyak 260 - 303 orang pemilih.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu ini karena kesiapan KPUD, petugas pelaksana di KPPS dan petugas TPS di tingkat desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat yang baik. Hal yang menggembirakan adalah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak pilih termasuk kategori baik dan tidak timbul konflik dalam masyarakat. Rata-rata tingkat penggunaan hak pilih (electoral rate) antara 65 - 78% dalam setiap kegiatan Pemilu, baik Pemilukada Gubernur Jawa Tengah 2008, Pileg dan Pilpres secara langsung tahun 2009. Sedangkan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2010 jumlah pemilik suara yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 43,26%. Pemilih yang tidak aktif ini terutama masyarakat desa, pemilih perempuan dan pemula yang belum mendapatkan pendidikan politik, peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan kewarganegaraan yang erat kaitannya dengan pengembangan demokratisasi.

Dari hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 telah terpilih sebanyak 50 orang anggota, terdiri dari 40 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Anggota DPRD Kabupaten Pemalang masa bhakti tahun 2009 – 2014 dengan perincian PDI-P (11 orang), Golkar (9 orang), PPP (6 orang), PKB (6 orang), PKS (5 orang), Partai Demokrat (5 orang), dan tiga partai politik lainnya yaitu Hanura (2 orang), Gerindra (2 orang) dan Partai Patriot (1 orang).

Banyaknya partai politik di Kabupaten Pemalang sebanyak 30 unit dan peserta Pemilu 2009 sebanyak 26 unit. Banyaknya organisasi massa (Ormas) menunjukkan peningkatan dari sebanyak 26 unit pada tahun 2006 meningkat menjadi 29 unit pada tahun 2009. Sedangkan ormas berbasis keagamaan terutama Agama Islam sebanyak 10 unit pada tahun 2004 meningkat menjadi sebanyak 11 unit pada tahun 2009 dan jumlah lembaga swadaya masyarakat dari tahun 2006 – 2010 sebanyak 51 unit organisasi yang melakukan kegiatan pemberdayaan dan advokasi masyarakat dalam berbagai program-program pembangunan daerah secara aktif dari total 88 lembaga swadaya masyarakat yang ada. Upaya meningkatkan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia, peningkatan pemahaman warga negara, terkait dengan kesadaran hidup bernegara, penegakkan hukum dan peningkatan ketahanan ideologi dan pemahaman dasar negara dan ketahanan nasional.

Wilayah Kabupaten Pemalang secara geografis terletak di jalur utama perekonomian Pantai Utara (Pantura) Jawa, sehingga memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Mobilitas penduduk yang tinggi, transportasi yang padat di jalur pantai utara menjadi salah satu penyebab adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu perlu mendapatkan perhatian. Gambaran tentang gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pemalang, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.63
Kejadian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Pemalang
Tahun 2006-2010 (Kasus)

| No | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Pencurian/ perampokan | 142 | - | 275 | - | - |
| 2 | Ujuk rasa | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| 3 | Kejadian pembunuhan | - | - | - | - | - |

Sumber data : Kantor Kesbangpolinmas

Tingkat kriminalitas dalam masyarakat di Kabupaten Pemalang termasuk rendah, hal ini diketahui dari kejadian pencurian, perampokan dan pencurian sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk. Upaya peningkatan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat ditunjang pelayanan polisi yang bertugas di setiap Polsek di wilayah Kabupaten Pemalang dan partisipasi masyarakat. Keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat di masing-masing desa/kelurahan dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan Program Kemitraan Polisi dengan Masyarakat.

Tabel 2.64
Angka Kriminalitas Kabupaten Pemalang 2010 (Kasus)

| No | Kasus | Kejadian | Tertangani |
|--------------|--|------------|--------------|
| 1 | Tindak Pidana Meninjol | | |
| | a. Pencurian dengan pemberatan (curat) | 57 | 43 |
| | b. Pencurian dengan kekerasan (curas) | 17 | 3 |
| | c. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) | 25 | 10 |
| | d. Anirat | 9 | 7 |
| | e. PBK/KBK | 1 | 1 |
| | f. Pembunuhan | 1 | 0 |
| | g. Pemerkosaan | 0 | 0 |
| | h. Kenakalan remaja | 0 | 0 |
| | i. Peredaran uang palsu (Upal) | 1 | 1 |
| | j. Penyalahgunaan narkotika | 4 | 3 |
| | k. Unjuk rasa | 0 | 0 |
| | l. Pelanggaran lingkungan hidup | 0 | 0 |
| | m. Dokumen palsu | 2 | 2 |
| | n. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | 7 | 7 |
| | o. Penculikan | 0 | 0 |
| | p. Pemerasan | 2 | 2 |
| | q. Pengrusakan | 1 | 0 |
| | r. Peggelapan | 11 | 9 |
| s. Perjudian | 27 | 26 | |
| t. Penipuan | 9 | 8 | |
| 2 | Tindak pidana lain | 70 | 55 |
| 3 | Tindak pidana ringan | 1 | 1 |
| | Total Crime | 245 | 135 |
| | Total Indek | | 55,10 |

Dalam upaya peningkatan ketahanan masyarakat dalam menanggulangi masalah keamanan, ketertiban, penyakit masyarakat (Pekat) dan pencegahan bencana semakin ditingkatkan melalui peran Rakyat Terlatih (Ratih) dan Perlindungan

Masyarakat (Linmas) sampai di tingkat desa dan kelurahan. Sampai tahun 2010 jumlah linmas yang ada di Kabupaten Pemalang adalah sebanyak 9.839 personil.

Wilayah Kabupaten Pemalang memiliki potensi bencana alam, antara lain banjir di wilayah dataran rendah dan wilayah pantai mengalami pasang naik. Bencana terkait dengan kekeringan cenderung semakin meluas, angin ribut, tanah longsor (di wilayah pegunungan), kebakaran hutan, untuk itu diperlukan kesiapan aparat pemerintah dan stakeholder yang lain untuk tanggap terhadap bencana sehingga resiko bencana dapat dikurangi. Kejadian bencana alam di Kabupaten Pemalang yaitu kejadian tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan rumah, terjadi pada tahun 2005 dengan korban sebanyak 267 unit rumah dan kejadian tahun 2006 dengan korban sebanyak 71 unit rumah. Kejadian bencana alam terjadi di enam wilayah kecamatan, terutama kecamatan di wilayah dataran tinggi. Jumlah kerugian akibat bencana alam terbesar pada tahun 2005 dengan jumlah kerugian diperkirakan sebesar Rp. 1,85 milyar dan tahun 2006 sebesar Rp. 529,3 juta. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana di wilayahnya.

Bantuan yang diberikan dalam rangka tanggap darurat dari APBD Kabupaten Pemalang diberikan berupa bantuan dana sebesar Rp 483,80 juta, bahan makanan berupa beras, mie instan 53.800 dos, minyak goreng 382 liter dan bantuan pakaian sebanyak 50 bal serta bantuan air bersih sebanyak 2.530 truk tangki.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

1) Otonomi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Maka pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan urusan kewenangan sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan tersebut tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam menangani 34 urusan, baik kemampuan pembiayaan, sumberdaya aparatur sampai di desa/kelurahan, kelembagaan daerah maupun potensi lain yang dimiliki daerah merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut segenap urusan kewenangan pemerintah daerah (urusan rumah tangga daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik telah disusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Sejak tahun 2005 – 2010 telah tersusun Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 96 buah, Peraturan Bupati (Perbup) sebanyak 435 buah dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru. Perincian jumlah Perda dan Perbup sebagai berikut :

Tabel 2.65
Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2009

| No | Tahun | Perda (buah) | Perbup (buah) |
|----|-------|--------------|---------------|
| 1. | 2005 | 11 | 20 |
| 2. | 2006 | 23 | 100 |

| No | Tahun | Perda (buah) | Perbup (buah) |
|--------|-------|--------------|---------------|
| 3. | 2007 | 21 | 98 |
| 4. | 2008 | 24 | 123 |
| 5. | 2009 | 16 | 78 |
| 6. | 2010 | 10 | 55 |
| Jumlah | | 105 | 474 |

Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang (2011)

Pembaruan Perda dan Perbup dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah, pelayanan publik dan kepastian hukum dalam masyarakat. Program legislasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kelengkapan peraturan perundangan di daerah dan kepastian hukum yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan upaya peningkatan pelayanan umum, perijinan usaha dan promosi investasi di daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan kewenangan wajib dan standar kinerja bagi urusan pilihan. Kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan delapan (8) urusan wajib yang telah disahkan oleh masing-masing kementerian teknis, sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang **SPM Bidang Kesehatan.**
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang **SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.**
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang **SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.**
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 tahun 2008 tentang **SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.**
- e) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 tahun 2008 tentang **SPM Bidang Perumahan Rakyat.**
- f) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 tahun 2009 tentang **SPM Pusat Pelayanan Terpadu Bagi saksi dan/ Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.**
- g) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 tahun 2010 tentang **SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota.**
- h) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 tahun 2010 tentang **SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.**
- i) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang **SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.**

Pemerintah Kabupaten Pemalang, wajib menyusun capaian SPM sesuai dengan ketentuan urusan kewenangan wajib tersebut. Dalam peningkatan pelayanan publik maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam penilaian kinerja penyelenggaraan urusan melalui monitoring capaian SPM dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan yang diterima masyarakat secara langsung.

Perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan semakin kompleks akan mempengaruhi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, terutama terkait dengan globalisasi pasar modal, pelaksanaan Asian China Free Trade Area (AC-FTA) pada tahun 2010 dan North American Free Trade Area (NAFTA) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan investasi di daerah.

2) Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang

bersifat akuntabel, transparan dan partisipatif berdasar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan citra kelembagaan SKPD dan profesionalisme aparat pemerintah daerah.

Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan meningkatkan pelayanan perijinan terpadu melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu telah melayani lebih kurang 16 jenis perijinan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kalangan dunia. Demikian pula peningkatan pelayanan lainnya yaitu peningkatan pelayanan pemadam kebakaran, pengelolaan persampahan, air bersih dari PDAM semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Peningkatan kerjasama antar daerah, baik antara pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) maupun kerjasama dengan pihak ketiga lainnya semakin penting di masa mendatang dalam rangka promosi potensi daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan pelayanan publik.

3) Administrasi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah dari tahun 2006–2010 menunjukkan peningkatan dalam hal pendapatan daerah yaitu sebesar Rp 59.457.261.933,00 (2006) menjadi 76.441.045.221,00 (2010). Namun demikian nilai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pemalang jauh lebih kecil dibandingkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya berkisar antara 7,45% hingga 9,87%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Pemalang masih rendah.

Sumber pendapatan asli daerah yang terbesar adalah Retribusi Daerah, selanjutnya pendapatan lain yang sah, pajak daerah dan terakhir bagian laba usaha daerah. Pendapatan daerah dari retribusi daerah di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang baik dari sebesar Rp 31.741.991.980 milyar pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp 44.575.829.393 milyar pada tahun 2010. Pendapatan dari pos pendapatan daerah lain yang sah menunjukkan perkembangan yang baik, yaitu sebesar Rp. 4,25 milyar pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar Rp 13,96 milyar pada tahun 2010. Perincian masing-masing unsur pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tabel 2.66
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pemalang 2006–2010 (ribu Rp)

| No | Pendapatan daerah | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010*) |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a. | Pajak Daerah | 8.144.117.431 | 9.292.780.836 | 10.324.670.535 | 11.782.513.235 | 12.969.956.160 |
| b. | Retribusi Daerah | 31.741.991.980 | 32.179.733.471 | 35.497.456.899 | 39.554.382.955 | 44.575.829.393 |
| c. | Bagian Laba Usaha Daerah | 3.017.261.145 | 2.827.945.257 | 3.668.628.919 | 5.780.559.510 | 5.305.677.515 |
| d. | Lain-lain PAD yang sah | 16.553.891.377 | 11.535.120.679 | 17.246.722.854 | 24.701.877.888 | 13.589.582.153 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 59.457.261.933 | 55.835.580.243 | 66.737.479.207 | 81.819.333.588 | 76.441.045.221 |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Pemalang (2010)

Keuangan daerah di Kabupaten Pemalang secara umum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan dalam kurun waktu lima tahun (2006-2010) diarahkan pada peningkatan sebesar pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui intensifikasi pendapatan daerah. Belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan program-program prioritas daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi daerah dengan prinsip efisiensi. Selain itu, juga dilakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah serta pengendalian dan pengawasan internal.

4) Aparatur Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 1 Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 11 dinas, 3 badan, 1 inspektorat, 5 kantor, 1 Satpol PP, 1 RSUD, 16 UPT, serta 14 kecamatan dan 11 kelurahan sesuai Perda SOTK Nomor 11-15 tahun 2008 dengan jumlah aparatur sebanyak 13.255 orang. Untuk dapat meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan efektivitas pemerintahan secara administratif Kabupaten Pemalang terbagi menjadi 14 kecamatan, 211 desa dan 11 kelurahan. Peningkatan aparatur pemerintah desa/kelurahan semakin ditingkatkan terkait pelayanan umum, kamtibmas dan pembangunan desa/kelurahan. Jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 1.291 unit dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 6.267 unit.

Jumlah aparatur pemerintahan adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2010 sebanyak 13.361 orang, sebagian besar terdiri dari laki-laki sebanyak 7.384 orang (55,27%) dan perempuan sebanyak 5.977 orang (44,73%). Berdasarkan jenis jabatan diketahui jabatan struktural sebanyak 717 orang, jabatan fungsional khusus 7.138 dan fungsional umum sebanyak 5.506 orang.

Tabel 2.67
Jumlah PNS Dirinci Menurut Golongan Tahun 2005–2010

| Tahun | Gol I (orang) | Gol II (orang) | Gol III (orang) | Gol IV (orang) | Jumlah (orang) |
|-------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2005 | 502 | 2.548 | 4.215 | 4.040 | 11.305 |
| 2006 | 586 | 2.983 | 4.384 | 4.076 | 12.029 |
| 2007 | 574 | 4.914 | 4.383 | 3.986 | 11.847 |
| 2008 | 574 | 2.914 | 4.383 | 3.976 | 11.847 |
| 2009 | 544 | 3.518 | 4.226 | 4.412 | 13.100 |
| 2010 | 945 | 3.799 | 4.233 | 4.384 | 13.361 |

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Berdasarkan kepangkatan dan golongan kepegawaian maka sumber daya aparatur pemerintah daerah termasuk baik sekali, berdasarkan kondisi tahun 2010 diketahui bahwa sebagian besar termasuk dalam Golongan III sebesar 31,68% dan Golongan IV sebesar 32,81 % dari jumlah aparatur.

Tabel 2.68
Jumlah PNS Dirinci Menurut Eselon Tahun 2005 –2010

| Tahun | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Eselon V |
|-------|-----------|------------|-----------|----------|
| 2005 | 21 | 107 | 403 | 65 |
| 2006 | 19 | 102 | 397 | 65 |
| 2007 | 20 | 128 | 473 | 71 |
| 2008 | 20 | 128 | 473 | 71 |
| 2009 | 23 | 128 | 491 | 70 |
| 2010 | 20 | 129 | 497 | 71 |

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Jumlah pejabat fungsional dari tahun 2005–2010 menunjukkan penurunan, dari sebanyak 7.195 orang (2005) menjadi sebanyak 6.880 orang (2009) atau menurun sebanyak 315 orang, hal ini dikarenakan yang bersangkutan pensiun.

Kualitas PNS terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan formal PNS di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 diketahui sebagian besar berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 4.618 orang atau 29% dan berpendidikan Magister (S-2) sebanyak 197 orang (1,3%). Tabel berikut menggambarkan tingkat pendidikan PNS.

Tabel 2.69
Jumlah PNS Dirinci Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
Kabupaten Pemalang 2006 –2010 (orang)

| No | Tahun | SD | SMP | SLTA | D I | D II | DIII | D IV | S1 | S2 | Jumlah |
|----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|------|------|-------|-----|--------|
| 1 | 2006 | 378 | 399 | 2.711 | 304 | 2.090 | 659 | 22 | 2.476 | 116 | 12.029 |
| 2 | 2007 | 348 | 440 | 2.622 | 286 | 2.848 | 714 | 23 | 2.598 | 122 | 11.847 |
| 3 | 2008 | 510 | 669 | 3.118 | 337 | 3.073 | 813 | 21 | 3.169 | 133 | 11.847 |
| 4 | 2009 | 580 | 901 | 3.435 | 310 | 3.012 | 815 | 22 | 3.788 | 169 | 13.100 |
| 5 | 2010 | 556 | 886 | 3.362 | 290 | 2.684 | 889 | 23 | 4.476 | 195 | 13.361 |

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang (2010)

5) Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian adalah untuk pelayanan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Kabupaten Pemalang sudah memiliki pelayanan persandian yang merupakan bagian dari Bagian Umum Setda. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

u. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup ketersediaan, distribusi, dan konsumsi bahan pangan. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem konsumsi bahan pangan berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemandirian dan kehalalannya.

Ketahanan Pangan di Kabupaten Pemalang tergolong cukup baik, ditandai ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan penduduk khususnya komoditas beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Ketersediaan beras di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 sebanyak 244.502 ton, sedangkan kebutuhan beras sebanyak 117.216 ton, sehingga terdapat surplus beras sebanyak 127.286 ton. Surplus juga terjadi pada komoditas jagung sebanyak 16.514 ton pada tahun 2010. Sementara itu untuk komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, daging, telur, dan susu mengalami defisit. Pada tahun 2009 terjadi defisit ubi kedelai sebanyak 13.377 ton, kacang tanah sebanyak 3.578 ton, dan kacang hijau sebanyak 1.411 ton, daging sapi sebanyak 6.882 ton, telur sebanyak 2.835 ton, dan susu sebanyak 7.663 ton. Secara rinci perkembangan neraca bahan pangan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Neraca Bahan Pangan di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010

| No | Uraian | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Penduduk (jiwa) | 1.341.422 | 1.352.796 | 1.371.757 | 1.387.453 | 1.389.612 | 1.262.013 |
| 2 | Ketersediaan (Ton) | | | | | | |
| | Beras | 214.724 | 196.177 | 215.484 | 219.976 | 222.904 | 244.502 |
| | Jagung | 48.334 | 32.409 | 29.578 | 34.206 | 44.495 | 37.350 |
| | Kedelai | 103 | 22 | 3 | 23 | 167 | 0 |
| | Kacang Tanah | 1.173 | 364 | 505 | 734 | 771 | 662 |
| | Kacang Hijau | 195 | 139 | 132 | 107 | 56 | 17 |
| | Ubi Kayu | 32.714 | 30.388 | 28.581 | 55.667 | 49.178 | 26.958 |
| | Ubi Jalar | 1.882 | 2.116 | 4.753 | 7.433 | 5.830 | 2.490 |
| | Daging | 2.104 | 2.167 | 1.820 | 4.220 | 4.444 | 5.940 |
| | Telur | 2.597 | 2.569 | 3.639 | 4.814 | 4.767 | 6.125 |
| | Susu | 15 | 19 | 22 | 22 | 8 | 35 |
| | Ikan | 10.734 | 11.578 | 9.273 | 10.320 | 10.919 | 16.615 |

| No | Uraian | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | Tingkat Konsumsi (kg/kap/tahun) | | | | | | |
| | Beras | 96,76 | 96,76 | 96,76 | 96,76 | 96,76 | 96,76 |
| | Jagung | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | Kedelai | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| | Kacang Tanah | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| | Kacang Hijau | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | Ubi Kayu | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 |
| | Ubi Jalar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| | Daging | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| | Telur | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| | Susu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Ikan | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 4 | Kebutuhan (Ton) | | | | | | |
| | Beras | 129.796 | 130.897 | 132.731 | 134.250 | 134.459 | 122.114 |
| | Jagung | 537 | 541 | 549 | 555 | 556 | 506,7 |
| | Kedelai | 14.246 | 14.367 | 14.568 | 14.735 | 14.758 | 13.407 |
| | Kacang Tanah | 3.139 | 3.166 | 3.210 | 3.247 | 3.252 | 2.948 |
| | Kacang Hijau | 1.610 | 1.623 | 1.646 | 1.665 | 1.668 | 1.520 |
| | Ubi Kayu | 15.520 | 15.652 | 15.871 | 16.053 | 16.078 | 14.602 |
| | Ubi Jalar | 2.455 | 2.476 | 2.510 | 2.539 | 2.543 | 2.303 |
| | Daging sapi | 3.917 | 3.950 | 4.006 | 4.051 | 4.058 | 3.685 |
| | Telur | 10.718 | 10.809 | 10.960 | 11.086 | 11.103 | 10.087 |
| | Susu | 8.049 | 8.117 | 8.231 | 8.325 | 8.338 | 7.698 |
| | Ikan | 10.731 | 10.822 | 10.974 | 11.100 | 11.117 | 20.087 |
| 5 | Surplus/defisit (Ton) | | | | | | |
| | Beras | 84.928 | 65.280 | 82.753 | 85.726 | 88.445 | 122.388 |
| | Jagung | 47.797 | 31.868 | 29.029 | 33.651 | 43.939 | 36.843 |
| | Kedelai | (14.143) | (14.345) | (14.565) | (14.712) | (14.591) | (13.407) |
| | Kacang Tanah | (1.966) | (2.802) | (2.705) | (2.513) | (2.481) | (2.286) |
| | Kacang Hijau | (1.415) | (1.484) | (1.514) | (1.558) | (1.612) | (1.503) |
| | Ubi Kayu | 17.194 | 14.736 | 12.710 | 39.614 | 33.100 | 12.356 |
| | Ubi Jalar | (573) | (360) | 2.243 | 4.894 | 3.287 | 187 |
| | Daging sapi | (1.813) | (1.783) | (2.186) | 169 | 386 | 2.255 |
| | Telur | (8.121) | (8.240) | (7.321) | (6.272) | (6.336) | (3.962) |
| | Susu | (8.034) | (8.098) | (8.209) | (8.303) | (8.330) | (7.663) |
| | Ikan | 3 | 756 | (1.701) | (780) | (198) | (3.472) |

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pemalang, 2010

Berdasarkan penelitian dan standar nasional, rata-rata angka kecukupan energi sebesar 2.200 k.kal/kap/hari, sedangkan angka konsumsi energi di Kabupaten Pemalang sebesar 2.000 k.kal/kap/hari. Dengan demikian masih diperlukan upaya untuk terus meningkatkan cakupan konsumsi energi baik melalui upaya pemenuhan maupun upaya diversifikasi pangan. Sedangkan angka ketersediaan protein sebesar 57 gr/kap/hari, sedangkan angka konsumsi protein rata-rata di Kabupaten Pemalang sebesar 52 gr/kap/hari.

v. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang strategis dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, dengan pemberdayaan masyarakat desa dapat mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam pemberdayaan masyarakat ada 3 aspek utama kegiatan pemberdayaan yaitu: 1) pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM), 2) pemberdayaan sosial ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal dan 3) pemberdayaan aspek lingkungan.

Pemberdayaan SDM menitik beratkan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan maupun kegiatan lokakarya, pemberdayaan sosial ekonomi menekankan pada peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui stimulan bantuan modal, peralatan maupun manajemen usaha. Pemberdayaan lingkungan pada hakekatnya menumbuhkan kepedulian dan komitmen masyarakat untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang lebih baik dan berkualitas.

Selama kurun waktu lima tahun terus dilakukan kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan. Target untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

adalah 1) meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, 2) berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan, 3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, 4) meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dan 5) meningkatnya kapasitas pemerintah desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dapat diketahui bahwa jumlah LPMD yang dibina sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 rata-rata baru mencapai 20% hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai target pembinaan terhadap LPMD masih dijumpai kendala atau masalah.

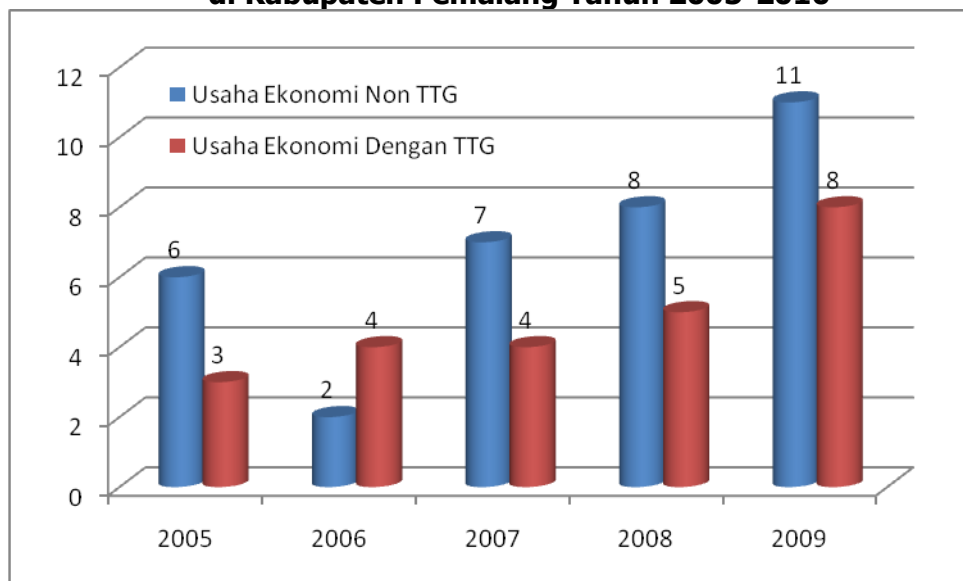
Terkait dengan pemberdayaan usaha kelompok ekonomi produktif masyarakat selama tahun 2005-2009 mengalami peningkatan tiap tahun, peningkatan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, provinsi dan pusat yang mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program PNM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, Program Teknologi Tepat Guna (TTG), dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengembangan modal usaha ekonomi produktif masyarakat desa.

Secara empiris program-program tersebut memberikan manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan SDM, usaha ekonomi produktif dan kualitas lingkungan, namun secara kuantitas program-program tersebut belum mampu mengcover seluruh desa di Kabupaten Pemalang. Hal ini terbukti jumlah kelompok usaha ekonomi produktif tersebut apabila dibandingkan jumlah desa/kelurahan yang ada masih jauh dari harapan.

Selanjutnya ditinjau dari kelembagaan atau kelompok-kelompok masyarakat desa secara kuantitatif cukup besar namun secara kualitatif kelompok-kelompok tersebut belum memberikan kontribusi secara nyata dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat tidak didasari atas kebutuhan bersama melainkan dibentuk karena adanya program-program pemberdayaan masyarakat desa baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Berikut ini digambarkan kondisi perkembangan kelompok usaha masyarakat baik yang menggunakan teknologi tepat guna maupun yang tidak.

Grafik 2.8
Jumlah Usaha Ekonomi Dengan dan Tanpa TTG
di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010



Peran serta masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan belum sesuai harapan, rendahnya keterlibatan perempuan tersebut disebabkan oleh rendahnya kapasitas perempuan serta kurangnya akses perempuan dalam setiap tahapan pembangunan di tingkat desa.

Dari aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa masih banyak menghadapi kendala, hal ini dikarenakan kapasitas dan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat belum sesuai harapan.

Oleh sebab itu pemerintah daerah merespon dan memberi dukungan penuh terhadap berbagai progra pemerintah khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) baik PNPM Mandiri Perkotaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut diwujudkan dalam alokasi pendampingan maupun penunjang Dana Urusan Bersama (DUB) program tersebut. Berikut disajikan data jumlah lokasi PNPM di Kabupaten Pemalang.

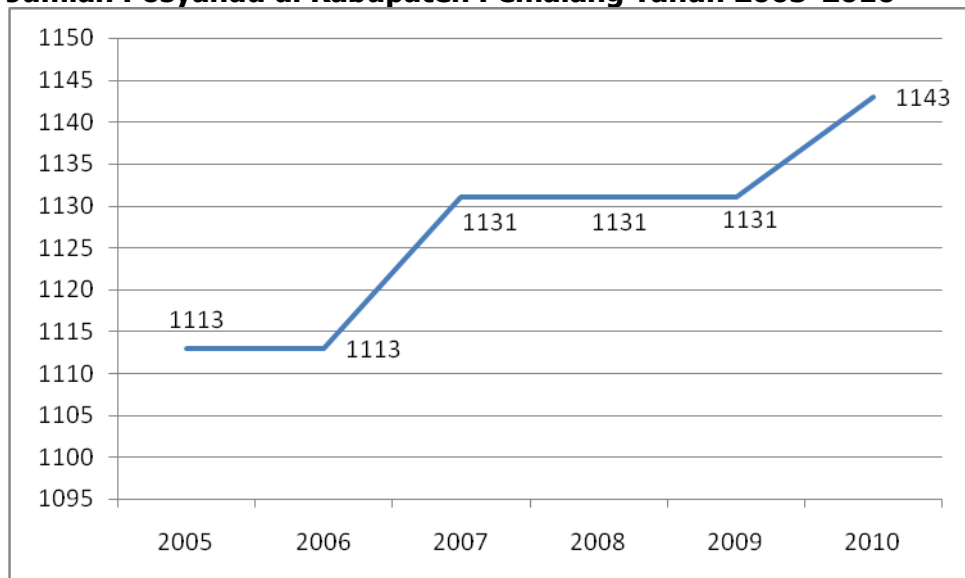
Tabel 2.71
Persebaran Lokasi PNPM di Kabupaten Pemalang Tahun 2010

| No | PNPM | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan |
|----|----------------|------------------|-----------------------|
| | PNPM Perkotaan | 4 | 79 |
| | PNPM Perdesaan | 10 | 143 |

Sumber : Bappeda Kabupaten Pemalang, 2010

Aspek pelayanan masyarakat lain di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adalah semakin banyaknya jumlah lembaga pos pelayanan terpadu di tingkat masyarakat. Posyandu melayani berbagai kegiatan di tingkat RT dan RW yang umumnya di kelola oleh para kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok dasa wisma maupun pengurus Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan semakin berkembangnya kesadaran di tingkat masyarakat akan kebutuhan pelayanan dasar tersebut, maka jumlah posyandu setiap tahun semakin meningkat, seperti terlihat pada gambar berikut :

Grafik 2.9
Jumlah Posyandu di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010



w. Statistik

Penyediaan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui pengembangan sistem pelayanan statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan pengelompokan kegunaan, terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyediaan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang melalui metode sensus (sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian dan sensus antar sensus), survei dilakukan antara lain Sakerda, survei harga-harga 9 bahan pokok, perhitungan inflasi dan kompilasi data produk dari masing-masing laporan SKPD,

profil kesehatan, profil pendidikan dan laporan hasil penelitian dan pengkajian tentang potensi daerah dan lain-lain.

Sebagaimana disebutkan menurut Pasal 152 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, data statistik yang diperlukan meliputi data (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; (3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS daerah; (4) data keuangan daerah; (5) potensi sumberdaya daerah; (6) produk hukum daerah (Perda dan Perbup); (7) data kependudukan dan dinamika perubahannya serta (7) informasi dasar kewilayahan serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan penyusunan data statistik oleh pemerintah daerah setiap tahun adalah Kabupaten Pemalang Dalam Angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang, Indikator Sosial Ekonomi, Sakerda, Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Kabupaten Pemalang. Sementara itu, data statistik dari SKPD terkait, seperti Profil Kesehatan daerah, Profil Gender, Profil pendidikan, dilakukan melalui kerjasama secara terpadu dan terprogram antar SKPD terkait.

Data statistik yang lengkap dan bersifat series akan mendukung perencanaan pembangunan daerah, baik RPJPD, RPJMD, RKPD maupun data pendukung sektoral lainnya. Manajemen penyimpanan data secara elektronik di masa mendatang semakin penting sejalan meningkatnya penggunaan data elektronik dengan sistem informasi manajemen di berbagai bidang pembangunan daerah.

x. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi terciptanya tata pemerintahan daerah yang baik (good governance). Dalam pelaksanaan urusan kearsipan tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan arsip semata namun mencakup banyak hal, mulai dari pengumpulan arsip, pengelolaan/ penyelamatan arsip, penyimpanan arsip, hingga pemanfaatan arsip.

Terkait dengan pengumpulan arsip, beberapa SKPD telah berpartisipasi aktif dalam penyerahan dokumen arsip daerah yang dilakukan melalui akuisisi kearsipan. Akuisi arsip secara rutin pada tahun 2008 dilakukan sebanyak 3 SKPD dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 10 SKPD, sedangkan tahun 2010 SKPD yang telah melakukan akuisisi arsip hanya 3 SKPD saja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan, pemerintah telah menyusun beberapa pedoman untuk pengembangan sistem kearsipan antara lain pedoman penyelenggaraan kearsipan untuk skala kabupaten, modul diklat manajemen arsip dinamis, dan modul pengembangan otomasi kearsipan. Pengumpulan beberapa dokumen/arsip daerah selama 5 tahun terakhir selalu memperlihatkan peningkatan atas dokumen/arsip yang berhasil disimpan. Arsip yang berbentuk tekstual pada tahun 2005 tersimpan sebanyak 4.488 berkas, pada tahun 2006 bertambah menjadi 6000 berkas, dan tahun 2007 meningkat kembali menjadi 20.000 berkas. Pada 2 tahun berikutnya arsip tekstual yang tersimpan semakin bertambah, tahun 2008 sebanyak 23.000 berkas dan hingga tahun 2009 sudah mencapai 30.000 berkas, sedangkan tahun 2010 sebanyak 20.000 berkas. Beberapa arsip lain sampai tahun 2010 yang tersimpan antara lain berbentuk kartografi sebanyak 4 lembar, foto sebanyak 572 album, video 8 buah, VCD 52 keping dan kaset rekaman suara sebanyak 85 buah.

Terkait peningkatan penataan kearsipan daerah telah dilaksanakan kegiatan pelatihan/diklat tentang arsip yang diikuti oleh beberapa SKPD dan kecamatan, pemantauan dan penyuluhan penyelenggaraan arsip, sosialisasi kearsipan dan pameran kearsipan untuk mendorong pemyarakatan kearsipan. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan dilakukan rata-rata 3 kali dalam satu tahun.

Pemeliharaan dan perawatan arsip memiliki peranan yang penting bagi terwujudnya kualitas arsip yang disimpan. Kegiatan pemeliharaan arsip dilakukan antara lain dengan kamperisasi arsip rutin setiap bulan dan labelisasi arsip di tahun 2005 sebanyak 225 boks meningkat menjadi 300 boks pada tahun 2006, hingga

tahun 2009 labelisasi telah dilakukan sebanyak 1.500 boks. Terkait dengan pelestarian arsip tahun 2010 juga telah dilakukan pengalihmediaan video umatic ke video HVS/VCD sebanyak 70 keping, reproduksi foto sebanyak 50 lembar dan pelestarian arsip yang bernilai sejarah sebanyak 13 berkas.

y. Komunikasi dan Informasi

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan deseminasi informasi. Sampai dengan tahun 2010, kewenangan Kabupaten Pemalang dalam urusan Kominfo ini didukung oleh kantor pos selama 5 tahun terakhir (2005-2009) tidak mengalami perubahan yaitu 12 unit. Terkait dengan pelayanan di bidang telekomunikasi, jumlah kapasitas Satuan Sambungan Telepon (SST) sentral sebanyak 8.596 SST, sedangkan kapasitas terpasang juga sama yaitu sebanyak 8.596 SST, sedangkan kapasitas yang terpakai atau jumlah pelanggannya yaitu 8.198 SST. Untuk mendukung kegiatan komunikasi keberadaan warung telekomunikasi (wartel) masih tetap eksis jumlahnya mencapai 271 unit. Pemakaian internet di semua SKPD sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pemerintahan kecuali kecamatan, namun demikian layanan komunikasi dan informasi menggunakan internet di perdesaan masih jauh dari harapan karena hampir sebagian besar desa belum memiliki akses layanan internet.

Era komunikasi nir kabel yang semakin meluas semakin mendorong masyarakat Kabupaten Pemalang memilih alternatif pemakaian telepon selular. Berdasarkan data PT. Telkom di Kabupaten Pemalang, jumlah pelanggan telepon selular yang khusus mempergunakan fleksi sebanyak 3.906 SSF. Dengan terbitnya Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, segala bentuk transaksi yang dilakukan secara elektronik harus memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang sehingga kerugian yang dapat timbul dari pihak-pihak yang terlibat dapat ditekan sekecil mungkin. Seiring dengan arus informasi yang semakin luas beredar di masyarakat, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap informasi yang disajikan pada khalayak umum sehingga potensi konflik yang muncul antara badan publik dengan pemohon informasi dapat diperkecil.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) serta berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka sejak tahun 2010 pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menggunakan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan LPSE.

z. Perpustakaan

Kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perpustakaan adalah menyusun pedoman penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pelestarian koleksi daerah di tingkat kabupaten, pembinaan teknis perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional, pengembangan jabatan fungsional pustakawan, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten secara luas dapat tergambar dari tingkat partisipasi dan kunjungan masyarakat, perkembangan jumlah perpustakaan serta sarana prasarana pendukungnya termasuk didalamnya adalah koleksi perpustakaan dan kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.

Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Pemalang sampai tahun 2010 tercatat sebanyak 482 unit, yang terdiri dari 1 unit perpustakaan milik pemda dan 481 unit perpustakaan non pemda. Jumlah perpustakaan non pemda mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2006 tercatat hanya 399 unit dan tahun 2010 sudah mencapai 481 unit. Perpustakaan lain yang cukup eksis antara lain adalah perpustakaan kecamatan, perpustakaan instansi khusus dan perpustakaan agama,

sedangkan untuk melayani masyarakat yang tinggal di perdesaan serta daerah-daerah yang terpencil saat ini sudah terdapat layanan perpustakaan keliling yaitu sebanyak 2 unit armada keliling.

Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan selalu menunjukkan peningkatan, pada tahun 2006 pengunjung perpustakaan umum daerah sebanyak 26.718 orang dan meningkat menjadi 28.643 orang pada tahun 2008, sedangkan pengunjung tahun 2010 telah mencapai 37.961 orang menurun dari 39.401 pengunjung tahun 2009.

Dalam rangka mendorong tingkat partisipasi dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dibutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai, salah satu yang penting adalah koleksi buku perpustakaan. Dilihat berdasarkan koleksi bukunya, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan umum kabupaten cukup banyak ragamnya antara lain mulai buku fiksi, karya umum, filsafat, buku agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, seni, sastra dan buku-buku sejarah geografi. Dilihat berdasarkan jumlahnya selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2005-2009 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebanyak 7.061 buku bertambah hingga mencapai 20.225 buku di tahun 2009. Beberapa majalah/tabloid juga tersedia yaitu majalah/ tabloid yang berkaitan dengan pertanian, kesehatan, perempuan, sosial dan politik. Surat kabar yang tersedia tidak hanya surat kabar lokal saja tetapi juga surat kabar nasional antara lain Suara Merdeka, Kompas, Jawa Pos, Solo Pos dan Kedaulatan Rakyat.

2. Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Produksi padi di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 tahun (2006-2010) cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,75%. Pada tahun 2010 produksi padi mencapai 487.733 ton. Pada tahun 2010 produksi jagung mencapai 56.060 ton, cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,04%. Produksi padi dan jagung yang besar ini telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat (surplus beras dan surplus jagung) di Kabupaten Pemalang, bahkan terjadi

Produksi kacang tanah pada tahun 2010 sebanyak 684 ton, cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan 6,77%. Jenis tanaman kacang hijau mengalami fluktuatif produksi, dengan jumlah produksi sebanyak 245 ton pada tahun 2010. Kondisi yang sama juga terjadi pada kedelai, dengan produksi sebanyak 69,60 ton pada tahun 2010. Produksi ketela pohon, ketela rambat, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau masih belum mencukupi

Perkembangan produksi tanaman pangan di Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (ton)

| No | Indikator | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Padi Sawah | 359.278 | 398.798 | 400.128 | 339.882 | 487.733 |
| 2 | Padi Gogo | 19.044 | 12.498 | 18.344 | 83.015 | 34.000 |
| 3 | Jagung | 35.113,00 | 33.496,00 | 45.335,08 | 55.619,00 | 56.060,00 |
| 4 | Ketela Pohon | 40.164,00 | 31.158,00 | 35.476,03 | 57.857,00 | 36.970,00 |
| 5 | Ketela Rambat | 3.168,00 | 3.053,00 | 3.858,04 | 6.625,00 | 3.793,00 |
| 6 | Kacang Kedelai | 12,00 | 7,00 | 1,40 | 1,85 | 0 |
| 7 | Kacang Tanah | 468,00 | 604,00 | 548,00 | 857,00 | 684,00 |
| 8 | Kacang Hijau | 134,00 | 113,00 | 320,00 | 62,20 | 245,00 |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Sayur-sayuran utama yang diproduksi di kabupaten Pemalang meliputi bawang merah, kentang, kacang panjang, cabe besar, ketimun, kobis dan tomat. Jenis sayuran yang produksinya meningkat pesat pada dua tahun terakhir adalah kentang pada tahun 2010 sebanyak 7.982,00 ton, kobis sebanyak 8.322,00 ton, dan

Cabe Besar sebanyak 5.766,72 ton. Perkembangan produksi sayur-sayuran di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73
Produksi Sayur-sayuran Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (ton)

| No | Jenis | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 1 | Bawang Merah | 3.309,00 | 2.797,50 | 3.683,00 | 7.044,00 | 4.205,52 |
| 2 | Kentang | 405,00 | 594,00 | 150,00 | 10.946,00 | 7.982,00 |
| 3 | Sawi | 2.171,00 | 2.028,00 | 2.574,00 | 2.318,00 | 633,60 |
| 4 | Kacang Panjang | 1.394,00 | 2.335,20 | 4.012,00 | 3.486,00 | 3.309,16 |
| 5 | Cabe Besar | 3.318,00 | 3.357,90 | 2.591,00 | 4.632,00 | 5.766,72 |
| 6 | Terung | 396,00 | 1.144,00 | 752,00 | 1.458,00 | 890,63 |
| 7 | Buncis | - | 54,60 | 60,00 | 1.749,00 | 506,00 |
| 8 | Ketimun | 1.196,00 | 3.740,00 | 3.894,00 | 4.440,00 | 1.633,80 |
| 9 | Kobis | 2.299,00 | 3.168,00 | 2.310,00 | 10.336,00 | 8.322,00 |
| 10 | Tomat | 924,00 | 638,00 | 1.408,00 | 3.784,00 | 4.978,60 |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Jenis buah-buahan utama di Kabupaten Pemalang adalah nanas, mangga dan nangka. Produksi nanas pada tahun 2010 mencapai sebanyak 938.898,00 ton. Tanaman buah nanas Kabupaten Pemalang terkonsentrasi di Kecamatan Belik dari varietas Queen yang spesifik, memiliki kemanisan yang tinggi. Produksi mangga di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 sebanyak 94.998,00 ton. Sementara itu produksi tanaman pisang mencapai 367.391,00 ton. Perkembangan produksi berbagai jenis buah-buahan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Produksi Buah-buahan Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (Ton)

| No | Jenis | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Alpukat | 113,00 | 110,37 | 494,01 | 7.547,00 | 8.466,00 |
| 2 | Mangga | 5.196,00 | 3.749,40 | 13.207,46 | 87.348,00 | 94.998,00 |
| 3 | Rambutan | 1.610,00 | 774,68 | 1.469,05 | 7.899,00 | 4.320,00 |
| 4 | Duku | 398,00 | 4,60 | 87,68 | 283,00 | 710,00 |
| 5 | Jeruk | 47,00 | 50,77 | 142,84 | 62,00 | 524,00 |
| 6 | Durian | 104,00 | 532,65 | 197,88 | 11.023,00 | 8.781,00 |
| 7 | Pepaya | 1.603,00 | 144,88 | 2.980,36 | 13.917,00 | 10.521,00 |
| 8 | Pisang | 6.002,00 | 4.661,61 | 11.924,20 | 94.783,00 | 367.391,00 |
| 9 | Nanas | 40.871,00 | 32.427,32 | 4.199,09 | 844.735,00 | 938.898,00 |
| 10 | Nangka | 1.909,00 | 1.912,44 | 4.199,09 | 23.034,00 | 63.056,00 |
| 11 | Jambu Biji | 191,40 | 89,74 | 454,84 | 7.045,00 | 1.629,00 |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Tanaman perkebunan utama di Kabupaten Pemalang meliputi teh, kelapa, cengkeh, kopi robusta, kopi arabika, glagah arjuna. Produksi Teh Kabupaten Pemalang menyumbang produksi ketiga terbesar di Jawa Tengah setelah Banjarnegara dan Batang. Perkembangan produksi berbagai jenis tanaman perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010

| No | Jenis | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Cengkeh | 206,86 | 1.060,00 | 1.287,23 | 1.281,70 | 1.202,49 |
| 2 | Glagah Arjuna | 257,81 | 314,07 | 314,56 | 323,13 | 791,28 |
| 3 | Kelapa Dalam | 3.606,94 | 4.845,43 | 4.473,89 | 5.073,40 | 4.500,74 |
| 4 | Kelapa Deres | 137,62 | 67,75 | 59,90 | 67,91 | 119,43 |
| 5 | Kopi Robusta | 218,37 | 296,68 | 313,86 | 314,56 | 282,43 |
| 6 | Kopi Arabika | 97,84 | 129,95 | 208,58 | 314,56 | 67,74 |
| 7 | Teh | 569,67 | 1.070,63 | 1.071,59 | 1.072,89 | 927,53 |
| 8 | Tebu | 17.582,59 | 20.170,10 | 17.943,00 | 14.986,27 | 14.694,72 |
| 9 | Tembakau Rakyat | 34,80 | 33,64 | 35,10 | 21,00 | 1.617,99 |

| No | Jenis | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10 | Kapas | 30,84 | 63,02 | 22,25 | 11,81 | 16,26 |
| 11 | Nilam | 1.400,70 | 1.699,65 | 1.719,00 | 3.200,00 | 6.304,33 |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

2) Peternakan

Peternakan sangat berkembang di Kabupaten Pemalang, terutama jenis ternak sapi potong, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras layer, ayam ras broiler, itik, burung puyuh, dan entok. Pemeliharaan sapi potong terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Pemalang selatan, ternak itik banyak dipelihara di daerah pantai. Jenis ternak lain penyebarannya merata di semua wilayah.

Jenis ternak ruminansia yang populasinya paling banyak pada tahun 2010 adalah kambing sebanyak 137.142 ekor, sedangkan untuk jenis ternak unggas adalah ayam buras sebanyak 2.278.335 ekor. Populasi hewan ternak yang mengalami peningkatan antara lain sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, burung puyuh, kelinci dan angsa. Sementara itu ayam ras layer dan ayam ras broiler cenderung tetap. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.76
Populasi Ternak di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (dalam ekor)

| No | Jenis Ternak | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Sapi potong | 5.714 | 7.706 | 8.091 | 8.415 | 9.268 |
| 2 | Sapi perah | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 3 | Kerbau | 6.078 | 6.545 | 6.643 | 6.693 | 6.744 |
| 4 | Kuda | 221 | 197 | 199 | 200 | 201 |
| 5 | Babi | 700 | 700 | 756 | 786 | 2.524 |
| 6 | Kambing | 74.303 | 111.496 | 121.595 | 128.891 | 137.142 |
| 7 | Domba | 29.268 | 30.788 | 31.712 | 32.663 | 33.654 |
| 8 | Ayam ras layer (Petelur) | 55.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 |
| 9 | Ayam ras broiler (pedaging) | 698.165 | 492.419 | 492.419 | 492.419 | 492.419 |
| 10 | Ayam buras | 1.450.684 | 1.901.765 | 2.059.882 | 2.162.876 | 2.278.335 |
| 11 | Itik | 314.375 | 222.667 | 223.897 | 229.494 | 235.331 |
| 12 | Kelinci | 3.632 | 3.901 | 4.126 | 4.229 | 4.336 |
| 13 | Puyuh | 43.439 | 52.785 | 71.148 | 72.705 | 78.511 |
| 14 | Entok | 39.043 | 39.683 | 40.435 | 41.042 | 41.670 |
| 15 | Angsa | 3.293 | 3.362 | 3.562 | 3.669 | 3.780 |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras dan itik selama periode 2006-2010 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi daging ayam buras 25,76%, selanjutnya daging kambing 20,11%, daging domba (18,36%), daging itik (9,24%), daging kerbau (4,04%), daging dan daging sapi (3,95%). Sementara itu produksi daging ayam ras mengalami penurunan rata-rata -36,02%. Jenis ternak yang produksi dagingnya paling banyak di Kabupaten Pemalang berturut-turut adalah daging ayam buras (734.383 kg), daging sapi (665.190 kg), dan daging kerbau (558.552 kg). Perkembangan produksi daging masing-masing jenis ternak secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Produksi Daging di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010 (dalam kg)

| No | Jenis Ternak | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | Sapi | 566.303 | 616.905 | 640.956 | 665.190 | 621.660 |
| 2 | Kerbau | 402.140 | 517.500 | 550.600 | 558.552 | 393.920 |
| 3 | Kambing | 169.403 | 373.087 | 388.193 | 472.633 | 397.365 |
| 4 | Domba | 142.945 | 304.068 | 317.345 | 342.976 | 178.875 |
| 5 | Ayam Ras | 539.463 | 612.265 | 678.393 | 224.958 | 2.891.751 |
| 6 | Ayam Buras | 336.841 | 736.784 | 726.131 | 734.383 | 1.127.514 |
| 7 | Itik | 169.960 | 230.194 | 231.519 | 232.763 | 271.223 |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Produksi telur ayam buras, ayam ras layer, itik dan burung puyuh dalam kurun waktu lima tahun (2005-2010) terlihat fluktuatif. Produksi telur terbanyak adalah pada jenis telur ayam buras (2.426.177 kg), selanjutnya telur itik (1.562.384 kg), telur ayam ras (1.311.751 kg), dan terendah telur puyuh (120.624 kg). Produksi telur masing-masing jenis hewan ternak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.78
Produksi Telur di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2009 (dalam kg)

| No | Jenis Ternak | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Ayam Ras | 410.908 | 1.491.734 | 1.557.825 | 727.492 | 1.311.751 |
| 2 | Ayam Buras | 845.190 | 1.014.326 | 1.595.123 | 868.953 | 2.426.177 |
| 3 | Itik | 1.621.394 | 1.542.482 | 1.256.531 | 829.479 | 1.562.384 |
| 4 | Puyuh | 43.188 | 89.150 | 126.966 | 49.277 | 120.624 |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Produksi susu di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2009, karena salah satu pemilik usaha peternakan sapi perah beralih usaha ke bidang lain dan ternak sapi perahnya dijual ke daerah lain. Pada tahun 2005 sebanyak 8.775 liter meningkat pada tahun 2008 menjadi 30.137 liter dan menurun cukup besar pada tahun 2009 menjadi 9.587 liter.

Populasi ternak yang dikonversi kedalam Satuan Ternak/Unit Ternak/Animal Unit dibandingkan ketersediaan lahan/ketersediaan pakan ternak yang dikonversikan kedalam Carrying capacity/daya tampung dapat menghitung kelebihan atau kekurangan jumlah ternak di Kabupaten Pemalang. Populasi ternak setelah dikonversikan kedalam Satuan Ternak/Unit Ternak/Animal Unit pada tahun 2010 sebanyak 31.100 AU ternak ruminansia dan 19.648,00 AU ternak unggas, sehingga total populasi ternak sebanyak 50.748 AU.

Ketersediaan lahan/ketersediaan pakan ternak setelah dikonversikan kedalam daya tampung ternak/Carrying capacity sejumlah 328.361 AU, sehingga Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 masih bisa menampung/menambah ternak (kekurangan ternak) sebanyak 279.856,45 AU. Kekurangan ternak dapat disediakan dari jenis ternak ruminansia baik ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing dan domba), karena ketersediaan limbah pertanian sebagai pakan ternak di Kabupaten Pemalang cukup melimpah. Secara rinci Populasi dan Carrying Capacity Ternak di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Populasi dan Carrying Capacity Ternak di Kabupaten Pemalang Tahun 2010

| Jenis Ternak | Populasi (Ekor) | Populasi (AU) | Jenis limbah pertanian/hijauan | Produksi (Ton/th) | Carrying capacity (AU/th) |
|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Sapi potong | 9.268 | 6.664 | Jerami padi | 233.383 | 24.123,02 |
| Sapi perah | 20 | 15 | Jerami jagung | 441.479 | 82.468,06 |
| Kerbau | 6.744 | 4.856 | Daun ketela pohon | 9.252 | 537,68 |
| Kuda | 201 | 163 | Jerami kedelai | 20.878 | 790,40 |
| Kambing | 137.142 | 15.634 | Daun Tebu | 1.199.041 | 158.080,29 |
| Domba | 33.654 | 3.264 | Daun Ketela Rambat | 68.711 | 2.395,90 |
| Babi | 2.524 | 500 | Daun kacang tanah | 10 | 1,26 |
| Kelinci | 4.336 | 4 | Daun-daunan | 149.688 | 7.829,26 |
| Ayam buras | 2.278.335 | 13.670 | Rumput lapang | 253.331 | 41.012,49 |
| Ayam ras layer | 151.500 | 1.212 | Rumput unggul | 68.711 | 11.123,82 |
| Ayam ras broil | 492.419 | 1.970 | Jumlah | 2.444.484 | 328.362,18 |
| Itik | 235.331 | 1.883 | | | |
| Puyuh | 78.511 | 550 | | | |
| Entog | 41.670 | 333 | | | |
| Angsa | 3.780 | 30 | | | |
| Jumlah | 3.475.435 | 50.748 | | | |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

b. Kehutanan

Tingkat ketertutupan hutan di Kabupaten Pemalang tergolong baik, yaitu mencapai 40% dari luas wilayah kabupaten, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah yang hanya sebesar 27,8%. Luas hutan negara di Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2009 sebesar 32.624,85 ha, dengan komposisi terbesar berupa hutan produksi seluas 16.925,65 ha, hutan produksi terbatas seluas 10.617,02 ha, dan hutan lindung sebesar 5.082,18 ha.

Luas hutan rakyat juga cukup besar yaitu mencapai 18.473,21 ha, pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, baik secara swadaya maupun melalui kelompok tani hutan. Pengembangan hutan rakyat selama ini difasilitasi oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat melalui program GNRHL maupun pemerintah Kabupaten Pemalang. Luas hutan rakyat meningkat seiring semakin meningkatnya permintaan kayu rakyat terutama jenis sengon.

Tabel 2.80
Perkembangan Luas Hutan di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010

| No | Indikator | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Hutan Negara | | | | | |
| | Hutan Produksi tetap (ha) | 16.925,65 | 16.925,65 | 16.925,65 | 16.925,65 | 16.925,65 |
| | Hutan Produksi Terbatas (ha) | 10.617,02 | 10.617,02 | 10.617,02 | 10.617,02 | 10.617,02 |
| | Hutan lindung (ha) | 5.082,18 | 5.082,18 | 5.082,18 | 5.082,18 | 5.082,18 |
| | Hutan Konservasi / Cagar Alam (ha) | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |
| 2 | Hutan Rakyat (ha) | 18.473,21 | 18.473,21 | 18.473,21 | 18.473,21 | 18.473,21 |

Sumber: Dispertanhut Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Kebakaran hutan juga masih terjadi di Kabupaten Pemalang, terutama pada bulan Agustus - Oktober. Luas hutan yang terbakar pada tahun 2006 seluas 12,73 Ha, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 209,95 ha, dan menurun kembali menjadi 30,90 ha pada tahun 2008. Peningkatan luas lahan hutan yang mengalami kebakaran dari tahun ke tahun ini memerlukan perhatian yang serius untuk ditangani, dan dilakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat disekitar hutan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir industri pengolahan hasil hutan mengalami peningkatan dari sebanyak 22 unit pada tahun 2006 dan 2007, menjadi 32 unit pada tahun 2008, dan 41 unit pada tahun 2009. Peningkatan industri pengolahan hasil hutan ini menyebabkan permintaan hasil hutan semakin tinggi. Jumlah produksi hasil hutan kayu bulat dalam kurun waktu empat tahun (2006-2009) mengalami peningkatan dari sebanyak 21.165,48 m³ pada tahun 2006 menjadi 30.907,82 m³ pada tahun 2009. Peningkatan produksi kayu ini perlu diperhatikan agar jangan sampai mengurangi kelestarian fungsi ekosistem hutan sebagai paru-paru kota dan pelindung sumberdaya air di Kabupaten Pemalang.

Produksi hasil hutan non kayu di Kabupaten Pemalang sangat terbatas. Berdasarkan data yang ada produksi hutan non kayu hanya getah pinus. Produksi getah pinus dalam kurun waktu tahun 2006-2010 mengalami penurunan dari sebanyak 8.949,29 ton pada tahun 2006 menjadi hanya sebanyak 2.161,89 ton pada tahun 2010. Perkembangan produksi hasil hutan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81
Produksi Hasil Hutan di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2009(M³)

| No. | Jenis Hasil Hutan | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Kayu Bulat | 2.346,75 | 20.263,65 | 21.165,48 | 28.600,05 | 30.907,82 | 45.031,13 |
| 2 | Kayu Gergajian | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kayu olahan | | - | - | - | - | |
| 4 | Getah Pinus | 8.949,29 | 3.360,87 | 1.512,00 | 2.478,30 | 3.138,26 | 2.161,89 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Pemalang.

Lahan hutan saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat desa di sekitar hutan. Saat ini masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan untuk penanaman palawija dan empon-empon di bawah tegakan pohon tanaman hutan, dengan harapan terjalinnya kemitraan dalam pengelolaan hutan antara PT Perhutani dan masyarakat. Hutan juga memberikan jasa lingkungan yang dimanfaatkan berbagai kalangan masyarakat. Jasa lingkungan hutan di Kabupaten Pemalang antara lain sebagai sumber air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pemalang. Selain itu, beberapa perusahaan air minum kemasan juga memanfaatkan air pegunungan untuk diolah menjadi produk air minum kemasan. Untuk memelihara kelestarian lingkungan hutan ini diperlukan penerapan jasa lingkungan, melalui pengalokasian dana CSR beberapa perusahaan pemanfaat air dari Kabupaten Pemalang untuk melakukan penghijauan hutan dengan melibatkan masyarakat di sekitar hutan.

Luas lahan kritis Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dari seluas 13.368,67 ha pada tahun 2006 menjadi seluas 2.107,66 ha pada tahun 2010. Upaya mengurangi luasnya lahan kritis di Kabupaten Pemalang telah dilakukan melalui program reboisasi, baik melalui Gerakan Menanam Sejuta Pohon maupun GNRHL. Luas lahan yang telah ditanami pada tahun 2006 seluas 1.458,30 Ha dan pada tahun 2007 meningkat menjadi seluas 5.191,85 Ha. Selain itu, dilakukan pula penghijauan dengan luasan secara kumulatif menjadi 2.350 ha pada tahun 2006 dan tahun 2007, seluas 2.900 ha di tahun 2007, seluas 3.300 ha di tahun 2008, seluas 3.362,50 pada tahun 2009, dan 3.177,15 ha pada tahun 2010. Data luas lahan kritis, lahan reboisasi, lahan penghijauan dan kerusakan hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Luas Lahan Kritis, Lahan Reboisasi, Lahan Penghijauan dan Kebakaran Hutan di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 (Ha)

| No. | Jenis Lahan | Tahun | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Lahan Kritis | 13.962,82 | 13.368,67 | 9.585,00* | 5.801,33* | 2.107,66* | 2.107,71 |
| 2 | Lahan Reboisasi | | 1.458,30 | 5.191,85 | - | - | - |
| 3 | Lahan Penghijauan | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.900,00** | 3.300,00** | 3.362,50** | 3.177,15 |
| 4 | Luas kerusakan hutan*** | | 12,73 | 209,95 | 30,90 | 239,57 | - |

Keterangan:

* hasil perhitungan dari rata-rata penurunan antara 2006-2010

** akumulasi luasan dengan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai kontrol atas penurunan luas lahan kritis.

*** kerusakan hutan: pencurian kayu, kebakaran hutan, dan pohon tumbang (angin ribut).

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Pemalang

c. ESDM

Tingkat elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Pemalang sampai tahun 2010 baru mencapai 64,49%. Oleh karena itu sesuai dengan amanat UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat merencanakan peningkatan penyediaan energi dan sumber tenaga listrik untuk wilayah perdesaan dan kawasan terpencil, sesuai dengan potensi sumber energi yang tersebut (misalnya tenaga mikro hidro, panas bumi, gas alam) dan lain-lain.

Banyaknya stasiun pompa bahan bakar umum (SPBU) sejak tahun 2005 – 2009 sebanyak 12 unit yang menyalurkan premium dan minyak solar. Sedangkan jumlah penyalur minyak tanah sebanyak 11 unit dan cenderung semakin menurun, karena penghapusan subsidi untuk minyak tanah. Jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas atau disebut Stasiun Pengisian Pompa Bulk Elpiji (SPPBE) sebanyak 1 unit, yang menyalurkan kebutuhan LPG untuk rumah tangga, hotel dan restoran serta memenuhi kebutuhan dunia usaha. Namun masih banyak rumah tangga di perdesaan dan sektor usaha mikro yang menggunakan kayu bakar untuk memasak dan mengolah bahan makanan. Banyaknya bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan pada tahun 2005 meliputi premium sebanyak 38.072 kilo liter meningkat menjadi sebesar 41.640 kilo liter pada tahun 2009, sedangkan minyak tanah semakin berkurang, yaitu sebesar 45.485 kilo liter menjadi sebesar 40.830 kilo liter pada tahun

2009. Banyaknya minyak solar yang disalurkan dari sebesar 41.992 kilo liter tahun 2005 menurun menjadi sebesar 24.938 kilo liter pada tahun 2009.

Mulai tahun 2008 – 2009 melalui program nasional telah dilaksanakan konversi minyak tanah ke gas liquid petroleum gas (LPG) sebagai bahan bakar untuk rumah tangga kecil dalam tabung kemasan 3 kg dengan harga yang disubsidi dari APBN. Dengan pengurangan subsidi untuk minyak tanah (kerosene) maka harga jual minyak tanah sesuai harga pasar minyak dunia menjadi sebesar Rp. 8.000 per liter (2009) dan akan berfluktuasi sesuai dengan harga minyak mentah di pasar dunia. Jumlah SPBE di Kabupaten Pemalang sebanyak 1 unit dengan jumlah disalurkan pada tahun 2008 sebanyak 1.909 metrik ton yang dipasarkan dalam tabung dengan kapasitas 3 kg, 12 kg dan 50 kg.

Potensi pertambangan di Kabupaten Pemalang cukup besar, terutama di wilayah selatan yang merupakan wilayah pegunungan, mengandung berbagai bahan galian tambang, antara lain batu kapur, kaolin, diorit, marmer, andesit, tras, batu sabak, batu pasir dan bahan tambang yang telah diidentifikasi melalui penelitian, antara lain oker dan tambang emas. Potensi sumber tambang di Kabupaten Pemalang, antara lain :

Tabel 2.83
Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Pemalang

| No | Potensi Bahan Tambang | Kecamatan | Jumlah Produksi (ton) |
|----|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Batu kapur | Bantarbolang | 2.000 |
| 2 | Kaolin | Moga | 63.250 |
| 3 | Diorit | Belik dan Watukumpul | 113.400.000 |
| 4 | Marmer | Bantarbolang | - |
| 5 | Andesit | Belik, Pulosari dan Randudongkal | 288.470 |
| 6 | Tras | Belik dan Bodeh | 42.480 |
| 7 | Batu Sabak | Pemalang, Bantarbolang, Belik, Ampelgading, Petarukan, Ulujami, Bodeh, Randudongkal dan Kecamatan Watukumpul | 7.500 |

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum

Potensi bahan tambang terbesar adalah tambang pasir dan batu yang tersebar di 10 kecamatan, meliputi Kecamatan Pemalang, Bantarbolang, Belik, Ampelgading, Petarukan, Ulujami, Comal, Bodeh, Randudongkal dan Kecamatan Watukumpul. Potensi bahan tambang andesit dengan luas areal 2.078 Ha di 3 kecamatan, yaitu Belik, Pulosari dan Randudongkal, batu kapur di Kecamatan Bantarbolang, tambang kaolin yang telah dieksploitasi dengan rata-rata produksi per tahun 63.250 ton, tambang andesit dengan areal 2.078 Ha dengan besar cadangan diperhitungkan sebesar 288.470 ton dan tambang batusabak dengan luas areal potensi bahan tambang seluas 10 ha dengan cadangan potensial sebesar 7.500 ton. Potensi lain yang belum dioptimalkan di Kabupaten Pemalang adalah potensi air bersih permukaan (mata air dan air sungai) dan air bawah tanah yang di masa mendatang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan bagi kegiatan industri dan pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga bagi masyarakat Kabupaten Pemalang dan kabupaten/kota di sekitarnya.

d. Pariwisata

Kabupaten Pemalang memiliki banyak potensi obyek wisata yang dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan pariwisata sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah, meliputi obyek wisata alam dan obyek wisata religius. Obyek wisata yang termasuk obyek wisata alam pantai yaitu Pantai Widuri, Blendung, Nyamplungsari, dan Joko Tingkir. Obyek wisata alam pegunungan antara lain Gunung Gajah, Gunung Mendelem, Air terjun Sibedil, Air terjun Barong, Air terjun Sipendok, Air terjun Bengkawah, Air Terjun Lawang, Cempaka Wulung, Goa Gunung Wangi, Telaga Silating, Telaga Rengganis, kolam renang Moga, Penginapan Moga dan PTPN IX Semugih. Sementara itu obyek wisata religius yaitu Makam Pandanjati dan Makam Syech Maulana Syamsuddin.

Berbagai potensi obyek wisata tersebut masih belum didukung dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Dari berbagai jenis potensi obyek wisata di Kabupaten Pemalang, terdapat sebanyak 9 obyek wisata daerah yang telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dari sekian banyak obyek wisata, jenis obyek wisata yang paling diminati oleh masyarakat adalah Pantai Widuri. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 tahun (2006-2010) menunjukkan peningkatan dari sebanyak 149.579 orang pada tahun 2006, menjadi 318.563 orang pada tahun 2010. Pengunjung wisata semuanya adalah wisatawan nusantara, dari Kabupaten Pemalang sendiri (wisatawan lokal) dan daerah sekitarnya. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Jumlah Obyek Wisata Jumlah Pengunjung Wisata
dan Jumlah Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata

| No | Kategori | Satuan | Tahun | | | | |
|----|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Banyaknya obyek wisata (OB) | Unit | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 2 | Jumlah Pengunjung wisata | Orang | 92.174 | 107.114 | 220.640 | 510.191 | 564.835 |
| 3 | Jumlah pendapatan daerah dari OB | Juta Rp | 353.389.200 | 425.921.700 | 460.247.400 | 2.614.813.150 | 2.764.180.480 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Catatan Obyek Wisata :

1. Pantai Widuri
2. Pantai Joko Tingkir
3. Pantai Blendung
4. Telaga Silating
5. Makam Pandanjati
6. Pemandian Moga & Pesanggrahan Moga
7. Perkebunan Teh Semugih (PTP XVII)
8. Widuri Waterpark
9. Ventura river

Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pemalang umumnya sangat singkat, yaitu hanya satu hari. Hal ini disebabkan daya tarik obyek wisata masing sangat kurang dan sebagian besar pengunjung wisata adalah penduduk asli Kabupaten Pemalang yang jarak rumahnya relatif terjangkau. Jumlah hotel di Kabupaten Pemalang tahun 2010 sebanyak 9 hotel bertaraf melati dengan kamar yang tersedia sebanyak 145 kamar dengan tingkat hunian rata-rata 64,8%. Sementara itu jumlah pengunjung hotel (penginap) sebanyak 5.832 orang pada tahun 2010 dengan lama menginap rata-rata 1,06 malam.

Pengeluaran wisatawan di Kabupaten Pemalang juga masih rendah, karena tidak didukung dengan industri pariwisata yang menjadi ciri khas daerah. Industri pariwisata di Kabupaten Pemalang belum begitu berkembang. Jarang ditemui produk-produk industri khas daerah yang dipasarkan di obyek wisata daerah. Pada saat-saat tertentu saja masyarakat yang memanfaatkan obyek wisata untuk menjual makanan dan minuman bagi para pengunjung. Industri pariwisata belum mengarah pada pemasaran potensi produk industri kreatif dan UMKM yang menjadi ciri khas Kabupaten Pemalang, seperti kerajinan, hasil konveksi, makanan khas, dan jasa-jasa.

Pemasaran pariwisata Kabupaten Pemalang tergolong masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari Penyelenggaraan event MICE (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition) di Kabupaten Pemalang yang sangat jarang, dan penyelenggaraan promosi langsung, penyelenggaraan event pariwisata dan partisipasi promosi pariwisata pada event berskala regional, nasional dan internasional yang sangat sedikit. Padahal Kabupaten Pemalang memiliki event budaya daerah, seperti prosesi jamasan pusaka (menjamas pusaka peninggalan Syeh Pandanjati), baritan (sedekah laut), dan kesenian daerah berupa Karangkeng (latihan ilmu

kanuragan/keprajuritan yang diiringi dengan musik), sintren (pertunjukan seorang gadis belia yang dikurung berubah menjadi bidadari), dan jaran kepong (kuda lumping), kuntulan (tarian pencak silat diiringi rebana).

Pemasaran pariwisata daerah juga belum didukung keberadaan pusat pelayanan informasi kepariwisataan daerah. Selama ini pusat pelayanan informasi pariwisata hanya berada di Dinas Pariwisata dan Budaya yang letaknya tidak strategis, tidak berada di Pusat Kota, namun didalam obyek wisata Pantai Widuri. Jumlah obyek wisata yang memiliki kelengkapan bahan promosi pariwisata juga masih sangat terbatas, yaitu hanya Pantai Widuri.

e. Kelautan, dan Perikanan

Kabupaten Pemalang memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan tangkap di laut Kabupaten Pemalang dari tahun 2005 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan produksi, dari 11.148.172 kg menjadi 13.828.869 kg. Nilai produksi perikanan tangkap cenderung meningkat dari sebesar Rp 42.480.823.000,00 pada tahun 2005 menjadi Rp 57.564.671.649,00 pada tahun 2010. Jika dibandingkan potensi lestari perikanan sebesar 9.984.200 kg, maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Pemalang telah terjadi overfishing karena telah melampaui batas potensi lestari perikanan. Perkembangan produksi perikanan tangkap di laut dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85
Produksi Perikanan Tangkap di Laut Kabupaten Pemalang
Tahun 2006 - 2010

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Produksi Perikanan Tangkap (kg) | 11.148.172 | 9.273.380 | 10.320.449 | 10.919.650 | 13.828.869 |
| 2. | Nilai Perikanan Tangkap (rupiah) | 42.480.823.000 | 39.117.512.500 | 49.970.003.600 | 52.112.551.300 | 57.564.671.649 |

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (2005-2009)

Berbeda dengan perikanan tangkap di laut, produksi perikanan tangkap di perairan umum dalam kurun waktu 5 tahun sedikit meningkat, dari sebanyak 396.243 kg senilai Rp 2.229.988.000,00 pada tahun 2006 menjadi 400.113 kg senilai Rp 2.029.850.000 pada tahun 2010. Data produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di perairan umum di Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum
Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2010

| No | Jenis Perikanan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Produksi (kg) | 396.243 | 397.160 | 401.053 | 400.628 | 400.113 |
| 2 | Nilai Produksi (Rp 1.000) | 2.229.988.000 | 1.879.326.000 | 1.894.226.000 | 1.899.254.000 | 2.029.850.000 |

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Produksi perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 tahun (2006-2010) menunjukkan peningkatan. Produksi perikanan budidaya air payau pada tahun 2006 hanya sebanyak 2.283.181 kg senilai Rp 22.574.118,00. Pada tahun 2009 produksi perikanan budidaya air payau telah mencapai sebanyak 3.045.773 kg senilai Rp 32.437.485,00. Beberapa komoditas perikanan yang dibudidayakan antara lain ikan bandeng, udang windu, udang krosok, udang vanamei, kepiting dan ikan rucah. Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau di Kabupaten Pemalang disebabkan adanya penambahan luas tambak dari seluas 1.643 ha pada tahun 2006 menjadi 1.728 ha pada tahun 2009 dan tahun 2010. Penambahan luas tambak ini perlu diwaspadai agar tidak merusak ekosistem mangrove yang dapat memicu terjadinya abrasi pantai. Data jumlah produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air payau di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau di Kabupaten Pemalang
Tahun 2006 - 2010

| No | Jenis Perikanan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Luas tambak | 1.643 | 1.682 | 1.703 | 1.728 | 1.728 |
| 2 | Produksi (kg) | 2.283.181 | 2.437.154 | 2.603.677 | 2.977.100 | 3.045.773 |
| 3 | Nilai Produksi (ribuan Rp) | 22.574.118 | 26.018.882 | 33.305.420 | 37.215.384 | 32.437.485 |

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Produksi budidaya perikanan air tawar juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2006-2010), dari sebanyak 59.138 kg atau senilai Rp 463.133.000,00 pada tahun 2006 menjadi sebanyak 100.927 kg atau senilai Rp 1.043.316.000,00 pada tahun 2010. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan lele (63,81%), dan nila gift (19,11%), lainnya berupa ikan tawes, ikan mujaer, ikan nila, ikan karper, dan ikan bawal. Dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan luas kolam budidaya, yaitu seluas 28,35 ha. Budidaya perikanan air tawar di kolam diusahakan pada lahan seluas 28,35 ha yang tersebar di seluruh kecamatan (14 kecamatan), dengan luasan terbesar di Kecamatan Watukumpul (6,31 ha), dan Kecamatan Belik (5,39 ha). Data produksi dan nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Pemalang
Tahun 2006-2010

| No | Uraian | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1. | Luas kolam (ha) | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 |
| 2. | Produksi perikanan budidaya air tawar (kg) | 59.138 | 88.335 | 92.432 | 100.831 | 100.927 |
| 3. | Nilai perikanan air tawar (rupiah) | 463.133.000 | 760.882.000 | 873.542.700 | 1.039.486.000 | 1.043.316.000 |

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Dalam kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan jumlah nelayan di Kabupaten Pemalang, yaitu dari sebanyak 15.750 orang pada tahun 2006 menjadi 11.284 orang pada tahun 2010. Dari jumlah nelayan sebanyak 11.134 orang, 90,17% diantaranya termasuk nelayan pandega (nelayan yang tidak memiliki kapal/perahu sendiri) dan sisanya nelayan juragan. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh semakin tidak diminatinya pekerjaan sebagai nelayan karena tidak adanya kepastian pendapatan yang bergantung musim. Perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Jumlah Nelayan di Kabupaten Pemalang
Tahun 2006 – 2010 (Orang)

| No | Jenis Nelayan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Nelayan Juragan | 1.057 | 1.231 | 1.079 | 1.094 | 1.081 |
| 2 | Nelayan Pandega | 14.693 | 10.674 | 10.838 | 10.203 | 10.203 |
| | Jumlah | 15.750 | 11.905 | 11.917 | 11.297 | 11.284 |

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Tingginya potensi perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat belum diikuti dengan ekspor produk perikanan, dukungan usaha pengolahan ikan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Usaha pengolahan ikan yang ada selama ini masih bersifat tradisional dengan volume produksi kecil, dan nilai jual produk olahan ikan yang masih rendah. Tingkat konsumsi ikan masyarakat yang rendah disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan nilai gizi produk perikanan bagi kesehatan.

Jumlah rumah tangga yang bergerak di bidang budidaya perikanan air payau (tambak) sebanyak 1.530 RTP, terdiri dari sebanyak 43 RTP di Kecamatan Pemalang, 64 RTP di Kecamatan Taman, 342 RTP di Kecamatan Petarukan, dan terbanyak di Kecamatan Ulujami sejumlah 1.081 RTP. Sementara itu Budidaya ikan kolam ditekuni oleh sebanyak 1.718 RTP yang tersebar di 14 kecamatan, terbanyak di kecamatan Watukumpul (382 RTP) dan Kecamatan Belik (352 RTP). Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan masih rendah, sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Sarana dan prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sebanyak 5 unit. Kapal penangkapan ikan di Kabupaten Pemalang terdiri dari kapal motor dan perahu motor tempel, kesemuanya berukuran dibawah 10 GT dan layak untuk dioperasikan. Jumlah kapal dalam kurun waktu tiga tahun (2007-2009) menunjukkan adanya peningkatan dari sebanyak 1.275 unit pada tahun 2007 menjadi 1.442 unit pada tahun 2009. Dilihat dari komposisinya, kapal motor tempel masih mendominasi kapal yang ada di Kabupaten Pemalang, yaitu mencapai 79,81%. Perkembangan jumlah kapal motor di Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.90
Jumlah Kapal di Kabupaten Pemalang Tahun 2007 - 2010

| No | Jenis kapal | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Kapal Motor (unit) | 168 | 293 | 291 | 294 |
| 2 | Perahu Motor Tempel (unit) | 1.107 | 1.142 | 1.151 | 1.151 |
| 3 | Perahu tanpa motor (unit) | 1.275 | 1.435 | 1.442 | 0 |

Jumlah alat penangkapan ikan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2009 sebanyak 1.754 unit, terdiri dari cantrang sebanyak 133 unit, mini purseine 110 unit, pancing 72 unit, jala/jaring sebanyak 410 unit, dan lainnya 1.029 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat alat penangkapan yang kurang ramah lingkungan, yaitu cantrang dengan sifat mirip trawl yang menangkap ikan dari semua ukuran sehingga mengancam kelestarian sumberdaya ikan.

Di Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2008 luas kawasan mangrove sebesar 1.672,50 hektar. Sementara itu kerusakan pantai yang terjadi berupa abrasi seluas 10.203 km² dan akresi seluas 11.297 km². Abrasi pantai ini terjadi pada wilayah-wilayah yang pantainya terbuka secara langsung dengan perairan laut. Untuk menghindari terjadinya abrasi pantai yang lebih parah diperlukan pelestarian dan pengembangan kawasan mangrove.

f. Perdagangan

Sarana perdagangan di Kabupaten Pemalang cukup lengkap. Sarana Perdagangan yang ada di Kabupaten Pemalang terdiri dari pasar induk, pasar tradisional pasar modern. Pasar retail dan pusat perkulakan. Jumlah pasar tradisional lebih banyak daripada pasar modern. Gambaran sarana dan prasarana perdagangan terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.91
Jumlah sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2010

| No | Uraian | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|---|------|------|------|------|------|
| A | Kategori Pasar | | | | | |
| | a. pasar induk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | b. pasar tradisional | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | c. pasar modern (supermarket) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | d. Pasar retail (pasar swalayan) | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 |
| | e. sentra perkulakan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| B | Potensi Pasar Yang Dikelola Pemerintah Kabupaten | | | | | |

| No | Uraian | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Jumlah Pasar (unit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Luas Pasar (m2) | 167.174 | 167.174 | 167.174 | 167.174 | 167.174 |
| | Jumlah Toko (Unit) | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.297 | 2.259 |
| | Jumlah Kios (Unit) | | | | | |
| | Jumlah petak los (petak) | 277 | 277 | 277 | 277 | 295 |
| | Jumlah los petak (petak) | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |

Sumber: Disperindagkop Kab. Pemalang 2010.

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2006 – 2010 pertumbuhan sarana dan prasarana perdagangan relatif kecil atau tidak ada perubahan yang berarti. Selama kurun waktu 2006 – 2010 supermarket bertambah 1 unit, pasar swalayan (retail) bertambah 3 unit, dan sentra perkulakan bertambah 1 unit pada tahun 2008. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Pemalang relatif rendah.

Pertumbuhan usaha perdagangan di Kabupaten Pemalang cukup pesat. Untuk usaha skala besar meningkat dari 9 usaha besar pada tahun 2006 menjadi 88 pada tahun 2010. Penyerapan tenaga kerja juga terjadi cukup pesat. Perkembangan usaha ini mampu menurunkan angka pengangguran. Secara rinci perkembangan jumlah usaha terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.92
Jumlah Usaha Perdagangan dan Tenaga Kerja yang Terserap
Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010

| No | Uraian | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | Usaha perdagangan (Unit) | | | | | |
| | Skala Besar | 9 | 23 | 40 | 70 | 88 |
| | Skala Sedang | 90 | 194 | 286 | 392 | 496 |
| | Skala Kecil | 1.227 | 2.125 | 3.035 | 3.909 | 4.727 |
| | Jumlah | 1.326 | 2.342 | 3.361 | 4.371 | 5.311 |
| 2 | Tenaga Kerja (orang) | | | | | |
| | Skala Besar | 165 | 467 | 759 | 1.972 | 2.355 |
| | Skala Sedang | 548 | 964 | 1.424 | 1.954 | 2.863 |
| | Skala Kecil | 2.882 | 5.570 | 8.298 | 10.932 | 13.877 |
| | Jumlah | 3.595 | 7.001 | 10.481 | 14.858 | 18.955 |

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Pemalang 2010

Data di atas menunjukan bahwa walaupun pertumbuhan sarana dan prasarana perdagangan relatif kurang pesat namun data tentang perkembangan jumlah usaha menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usaha di Kabupaten Pemalang cukup pesat. Kondisi ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Pemalang cukup baik. Kondisi ini bisa terjadi dengan asumsi bahwa mereka melakukan usaha di Pemalang namun pemasaran yang mereka lakukan tidak di Pemalang melainkan di luar daerah.

Dalam hal perdagangan, beberapa komoditas dari Kabupaten Pemalang juga sudah menembus pasar internasional. Jenis produksi tersebut umumnya pertanian dan perikanan seperti komoditas rajungan (crab). Adanya kegiatan ekspor komoditas tersebut tidak diimbangi dengan kegiatan impor dari luar negeri secara langsung. Hal tersebut dapat mengindikasikan sisi positif yaitu dengan adanya surplus neraca perdagangan daerah, karena nilai ekspor yang tinggi dan nilai impor yang rendah. Berikut disajikan tabel produksi ekspor dari Kabupaten Pemalang selama tahun 2006-2010.

Tabel 2.93
Data Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Pemalang

| No | NAMA PERUSAHAAN/ JENIS KOMODITI | VOLUME (TON)/NILAI EKSPOR (RIBU RP) | | | | | NEGARA TUJUAN |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | Perum Perhutani | | | | | | |
| | Gondorukem | 460.800/ 3.809.781.512 | 374.160/ 2.383.399.200 | 192,72/ 1.227.626.400 | - | - | Pakistan, India, Eropa, Jepang |
| | Terpentin | 90.440/ 771.947.464 | 70.660/ 427.369.532 | 36,41/ 250.154.905 | - | - | |
| 2 | PT. Phillip Seafood | | | | | | |
| | Crab | 973,68/ 149.379.340.187 | 838,83/ 112.342.547.287 | 1.404,03/ 166.719.122.740 | 1.379,35/ 136.267.980.950 | 882,71/ 157.157.000.000 | USA, Inggris, Australia,Hongkong |
| 3 | PTP IX Persero | | | | | | |
| | Teh | 480,1/ 5.874.988.200 | 470,8/ 5.761.179.600 | 424,76/ 6.633.077.103 | 415,74/ 8.062.278.000 | 176,40/ 7.224.000.000 | Afganistan, Australia, Kanada, Inggris, Jerman |
| | Kakao | 34,49/ 477.190.328 | 342,05/ 473.123.560 | 22,37/ 543.895.794 | 28,187/ 822.150.000 | - | Rusia, Singapura, Thailand |
| 4 | H. Sofan Casuri | | | | | | |
| | Sapu Glagah | 60.233/ 544.525.000 | - | - | - | - | Taiwan, Malaysia |
| 5 | PT. SDM | | | | | | |
| | Ikan Teri | 27,23/ 1.719.751.000 | 22,98/ 1.373.675.164 | - | - | - | Jepang |
| | PT. ECS | | | | | | |
| | Ikan Teri | 16,7/ 1.002.000.000 | - | - | - | - | Jepang |
| 6 | PT. Kuning | | | | | | |
| | Minyak Nilan | - | 23,26/ 9.204.260.000 | 27,406/ 8.433.350.000 | 45,2/ 12.621.100.000 | 16,34/ 9.953.000.000 | Prancis |
| | Jumlah | 613.005/ 163.579.523.691 | 446.518/ 131.965.554.343 | 2.107,70/ 183.807.226.942 | 1.868,48/ 157.773.508.950 | 1.075,45/ 174.334.000.000 | |
| | Prosentase Kenaikan | | -27,16% / -19,33% | -99,53% / 39,28 | -11,35% / -14,16 | -42,44% / 10,50% | |

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Pemalang 2010

g. Industri

Komposisi industri di Kabupaten Pemalang paling banyak adalah industri kecil non formal, selanjutnya industri kecil formal, industri menengah dan paling sedikit industri besar. Sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Pemalang hanya terdapat dua industri besar yaitu PT Candi Mekar dan PT Philips Sea Food Indonesia dengan total nilai produksi sebesar Rp 234.428 milyar. Jumlah industri menengah sebanyak 44 unit dengan nilai produksi mencapai 501.840 milyar. Jumlah industri kecil formal sebanyak 842 unit dengan nilai produksi mencapai Rp 364.946 milyar, sedangkan industri kecil non formal sebanyak 364.946 unit dengan nilai produksi Rp 828.520 milyar. Perkembangan Industri di Kabupaten Pemalang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.94
Perkembangan Industri di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2010

| No | Indikator | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | Perkembangan Industri | | | | | | |
| 1 | Industri Besar | | | | | | |
| | Unit Usaha | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Nilai Produksi | Rp. Jt | 154.519 | 232.224 | 232.224 | 207.003 | 234.428 |
| | Tenaga Kerja terserap | orang | 1.859 | 2.075 | 2.075 | 2.159 | 1.663 |
| 2 | Industri Menengah | | | | | | |
| | Unit Usaha | Unit | 22 | 28 | 28 | 39 | 44 |
| | Nilai Produksi | Rp. Jt | 46.812 | 191.838 | 190.932 | 496.149 | 501.840 |

| No | Indikator | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Tenaga Kerja terserap | orang | 508 | 1.346 | 1.198 | 1.509 | 1.591 |
| 3 | Industri Kecil Formal | | | | | | |
| | Unit Usaha | Unit | 993 | 728 | 776 | 842 | 955 |
| | Nilai Produksi | Rp. Jt | 246.780 | 213.274 | 225.164 | 339.658 | 364.946 |
| | Tenaga Kerja terserap | orang | 10.982 | 8.313 | 8.670 | 9.172 | 9.945 |
| 4 | Industri Kecil Non Formal | | | | | | |
| | Unit Usaha | Unit | 6.018 | 7.083 | 7.083 | 6.619 | 7.992 |
| | Nilai Produksi | Rp. Jt | 338.786 | 678.072 | 678.072 | 800.658 | 828.520 |
| | Tenaga Kerja terserap | orang | 17.736 | 22.751 | 22.751 | 20.682 | 21.401 |

Sumber: Disperindagkop Kab. Pemalang 2010.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pemalang terbanyak pada industri kecil non formal, selanjutnya industri kecil formal, industri besar dan terakhir industri menengah. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri besar dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2010 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2010 terjadi penurunan, artinya telah terjadi pemutusan hubungan kerja. Jumlah tenaga kerja pada industri menengah menunjukkan peningkatan dari 2006 hingga tahun 2010, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pengurangan pengangguran di Kabupaten Pemalang. Tenaga kerja terserap pada industri kecil formal mengalami penurunan pada dari tahun 2006 ke tahun 2007, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2010. Sementara itu tenaga kerja yang terserap pada industri kecil non formal mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Secara umum daya saing produk industri di Kabupaten Pemalang masih kalah dengan produk dari daerah lain dan negara lain. Harga produk dari negara lain, khususnya China sebagian besar lebih murah dibandingkan harga produk industri Kabupaten Pemalang. Pemasaran produk industri kecil masih menghadapi kendala dalam pemasaran, sehingga jangkauan pemasaran produk masih terbatas. Produk industri di Kabupaten Pemalang yang telah diekspor antara lain industri sapu glagah dan terpetin.

h. Ketransmigrasian

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pembangunan transmigrasi mengalami perubahan dari supply approach yang ditangani secara sentralistik menjadi demand approach yang perencanaan dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Perubahan kebijakan ini adalah pembangunan transmigrasi tidak lagi diposisikan sebagai program pemerintah pusat, tetapi sepenuhnya menjadi program pemerintah daerah bersama masyarakat.

Gambaran kondisi pembangunan ketransmigrasian di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2006-2010 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.95
Perkembangan Transmigrasi di Kabupaten Pemalang
Tahun 2006 – 2010

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------|---|--------|------|------|------|------|------|
| A. | Jumlah Calon Transmigran yang mendaftar | | | | | | |
| 1 | Jumlah Rumah Tangga | KK | 50 | 45 | 20 | 40 | 20 |
| 2 | Jumlah Calon Transmigran | Jiwa | 193 | 170 | 62 | 160 | 75 |
| B | Jumlah Transmigran yang diberangkatkan berdasarkan | | | | | | |

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | Jenis Transmigrasi | | | | | | |
| 1 | Transmigrasi Umum | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Tangga | KK | 35 | 25 | - | 25 | 10 |
| | Jumlah Calon Transmigran | Jiwa | 136 | 102 | - | 62 | 40 |
| 2 | Transmigrasi Swakarsa Mandiri | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Tangga | KK | - | - | 20 | 25 | 10 |
| | Jumlah Calon Transmigran | Jiwa | - | - | 62 | 98 | 35 |
| | Jumlah Total | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Tangga | KK | 35 | 25 | 10 | 50 | 20 |
| | Jumlah Transmigran | Jiwa | 136 | 102 | 62 | 112 | 75 |

Sumber : Disnakertransos Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Jumlah calon transmigran yang terdaftar di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2006-2010 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2006 jumlah calon transmigran sebanyak 193 jiwa dan pada tahun 2010 hanya mencapai 75 jiwa. Demikian juga jumlah transmigran yang diberangkatkan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2010 Kabupaten Pemalang hanya memberangkatkan transmigran sebanyak 40 orang, angka ini jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dilihat menurut jenisnya pada tahun 2010 transmigrasi yang diberangkatkan di Kabupaten Pemalang terdiri dari Transmigrasi umum (10 KK atau 40 jiwa) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (10 KK atau 35 jiwa). Jika dilihat berdasarkan daerah tujuan transmigrasi, Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara adalah daerah yang paling banyak dituju. Provinsi lain sebagai daerah tujuan transmigrasi dari Kabupaten Pemalang adalah Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun 2010 Kabupaten Pemalang memperoleh program dari provinsi Jawa Tengah alokasi 35 orang untuk mengikuti program Transmigrasi Swakarsa Mandiri, angka ini lebih besar dibandingkan dengan tujuan Kabupaten Bengkulu Utara. Tetapi dilapangan kondisi lokasi tujuan transmigrasi belum siap, dari alokasi 100 rumah yang akan ditempati oleh transmigran asal Kabupaten Pemalang dan kabupaten lain di Jawa Tengah, baru 35 unit kerangka rumah yang didirikan. Akses jalan dari lokasi transmigrasi ke kantor desa belum jadi, jalan masih berupa semak-semak. Hal ini berarti masih kurang optimalnya penyediaan lokasi penempatan dengan kesiapan daerah penempatan dalam menyiapkan lokasi yang benar-benar memenuhi kriteria Clear and Clean – Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang, Layak Lingkungan (2C- 4L).

Belum banyak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan penyebaran informasi ketenagakerjaan, misalnya di Kabupaten Pemalang belum tersedianya Pusat Informasi Ketransmigrasian, Sistem Informasi Ketransmigrasian dan jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Ketransmigrasian. Penyebaran informasi ketransmigrasian yang ada di Kabupaten Pemalang hanya adanya MoU dengan daerah tujuan transmigrasi, yaitu pada tahun 2009 sebanyak 4 buah. Selain itu pelatihan bagi calon transmigran juga masih relatif sedikit, dalam kurun waktu 2005-2009 jumlah pelatihan bagi calon transmigran yang dilaksanakan hanya sebanyak 1-3 pelatihan dengan peserta 20-50 orang.

D. Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp.2.378.000,-. Angka tersebut memang secara nominal beada diatas tahun 2009. Dari hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ada peningkatan aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Kondisi Infrastruktur

Kondisi prasarana jalan Kabupaten Pemalang dilalui jalur pantura yang merupakan jalan nasional dan provinsi dengan panjang jalan nasional 32,43 km dan jalan provinsi sepanjang 99,52 km sedangkan panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat ibukota Kabupaten Pemalang dengan seluruh wilayah kecamatan sepanjang 651,97 km (data BPS Kabupaten Pemalang 2009). Sementara itu pelayanan pergerakan antar daerah di Kabupaten Pemalang dilayani oleh Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan kendaraan umum berupa angkutan pedesaan, serta angkutan tidak bermotor (Becak dan Dokar). Jumlah Bus AKAP tahun 2009 sebanyak 129 unit. Sementara itu untuk perkembangan bus AKDP tahun 2009 sebesar 193 unit.

b. Fasilitas Penunjang

Salah satu fasilitas penunjang perkembangan wilayah adalah hotel. Jumlah hotel di Kabupaten Pemalang tahun 2009 sebanyak 17 hotel bertaraf melati dengan kamar yang tersedia sebanyak 217 kamar dengan tingkat hunian rata-rata 20,92%. Sementara itu jumlah pengunjung hotel (penginap) sebanyak 41.305 orang pada tahun 2009 dengan lama menginap rata-rata 1,06 malam.

c. Jaringan Listrik

Tingkat elektrifikasi desa di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2004 telah mencapai 211 dari 222 desa/kelurahan (95,05%), seluruhnya pelayanan listrik untuk rumah tangga dan kegiatan usaha dilayani oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) jaringan interkoneksi Jawa – Bali. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2005 sebanyak 162.786 unit, dengan daya terpasang sebesar 103.916.745 Volt Ampere (VA) dan jumlah energi terjual sebesar 176.559.294 kilo watt hours (KWH). Pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 197.042 unit, dengan besarnya daya terpasang sebesar 134.630.674 VA dan energi terjual sebesar 236.766.322 KWH. Sebagian besar pelanggan listrik termasuk pelanggan rumah tangga kecil (R-1) dengan daya terpasang sampai dengan 1.300 Watt.

d. Ketaatan Terhadap RTRW

Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengamatkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota harus sudah disusun dan disesuaikan paling lambat 3 tahun yaitu tahun 2010. Saat ini proses revisi RTRW Kabupaten Pemalang sudah dibahas BKPRN, dan masih dalam proses perbaikan.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam melakukan investasi di suatu daerah investor melihat kondusifitas dan kemudahan berusaha di daerah tersebut. Kondusifitas satu daerah dapat diukur dari keamanan lingkungan, antara lain angka kriminalitas dan demonstrasi. Angka kriminalitas di Kabupaten Pemalang dalam kurun 2006-2010 mengalami fluktuasi dan angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2008. Sementara jumlah demonstrasi dari tahun 2006-2010 cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.96
Perkembangan Kasus Kriminalitas, Demonstrasi
Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010

| No | Indikator | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah kasus Kriminalitas | 142 | | 275 | | 207 |
| 2 | Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 |

Sumber : Kantor Kesbangpol dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pemalang

Rata-rata proses perijinan memerlukan waktu 5 hari mulai tahun 2009. Macam pajak dan retribusi daerah sampai tahun 2010 mencapai 10 macam pajak dan

retribusi daerah. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha sampai tahun 2009 mencapai 5 perda.

Tabel 2.97
Lama Proses Perijinan Usaha, Jumlah Macam Pajak/Retribusi dan Perda yang Mendukung Investasi di Kab. Pemalang Tahun 2006-2009

| No | Indikator | Satuan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|---|--------|------|------|------|------|------|
| 1 | Rata-rata lama proses perijinan | hari | | | | 5 | 5 |
| 2 | Jumlah macam pajak dan retribusi daerah | | | 5 | 9 | 10 | 10 |
| 3 | Jumlah perda yang mendukung iklim usaha | | | 1 | 3 | 5 | |

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 tahun tergolong tinggi. Rasio ketergantungan dari tahun 2005 sampai tahun 2009 berada diatas 44%, ini menunjukkan ketergantungan penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun (penduduk non produktif) terhadap penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) tergolong tinggi. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.98
Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2009

| No | Indikator | Satuan | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah penduduk <15 thn dan >64 thn | Jiwa | 425.399 | 417.725 | 417.725 | 425.399 | 425.864 |
| 2 | Jumlah penduduk usia 15-64 thn | Jiwa | 960.265 | 946.549 | 946.549 | 960.265 | 965.847 |
| | Dependency ratio | % | 44,30 | 44,13 | 44,13 | 44,30 | 44,09 |

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Target pendapatan dan realisasi tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Target pendapatan tahun anggaran 2006 adalah Rp 620.995.699.000,00 dan realisasinya Rp 638.059.213.655,00 atau melampaui target yang ditetapkan (102,75%).
- b. Target pendapatan tahun anggaran 2007 sebesar Rp 667.105.399.000,00 realisasinya sebesar Rp 686.308.757.512,00 atau melampaui target yang ditetapkan (102,88%).
- c. Target pendapatan tahun anggaran 2008 sebesar Rp 728.278.846.000,00 realisasinya sebesar Rp 756.910.319.097,00 atau melampaui target yang ditetapkan (103,93%).
- d. Target pendapatan tahun anggaran 2009 sebesar Rp 793.640.142,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 829.074.218.989,00 atau melampaui target yang ditetapkan (104,46%).
- e. Target pendapatan tahun anggaran 2010 sebesar 910.512.675.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 933.713.817.185,00 atau melampaui target yang ditetapkan (102,55%).

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun (2006-2010) menunjukkan peningkatan dari sebanyak Rp 59.457.261.933,00 (2006) menjadi Rp 76.441.045.221,00 (2010). PAD ini relatif kecil dibandingkan dana perimbangan yang dalam kurun waktu lima tahun meningkat dari sebesar Rp 578.083.008.773,00 pada tahun 2006 menjadi Rp 759.460.107.004,00 pada tahun 2010. Sementara itu lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dari sebanyak Rp 27.881.546.555,00 pada tahun 2006 menjadi Rp 97.812.664.960,00 pada tahun 2010.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2006-2010 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010**

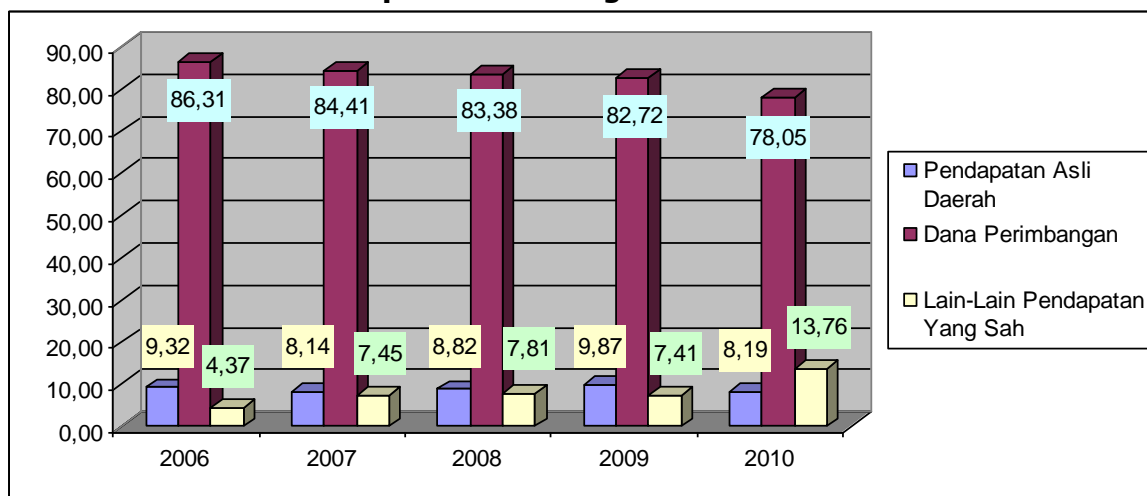
| No. | Pendapatan daerah | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| I. | Pendapatan Asli Daerah | 54.160.894.000 | 59.457.261.933 | 52.026.512.000 | 55.835.580.243 | 53.748.798.000 | 66.737.479.207 |
| a. | Pajak Daerah | 8.779.000.000 | 8.144.117.431 | 8.295.000.000 | 9.292.780.836 | 8.669.000.000 | 10.324.670.535 |
| b. | Retribusi Daerah | 27.649.299.000 | 31.741.991.980 | 30.403.460.000 | 32.179.733.471 | 30.041.211.000 | 35.497.456.899 |
| c. | Bagian Laba Usaha Daerah | 2.802.863.000 | 3.017.261.145 | 2.668.592.000 | 2.827.945.257 | 3.238.858.000 | 3.668.628.919 |
| d. | Lain-lain PAD yang sah | 14.929.732.000 | 16.553.891.377 | 10.659.460.000 | 11.535.120.679 | 11.799.729.000 | 17.246.722.854 |
| II. | Dana Perimbangan | 566.834.805.000 | 578.083.008.773 | 589.243.816.000 | 600.382.024.439 | 643.796.620.000 | 656.900.643.775 |
| a. | Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak | 23.381.657.000 | 31.678.415.175 | 27.181.500.000 | 39.073.309.923 | 33.740.390.000 | 43.284.783.628 |
| b. | Dana Alokasi Umum | 491.282.000.000 | 491.281.989.992 | 530.443.000.000 | 530.442.999.996 | 577.864.687.000 | 577.864.687.000 |
| c. | Dana Alokasi Khusus | 27.760.000.000 | 27.760.000.000 | 9.871.000.000 | 9.809.700.000 | 9.871.000.000 | 9.932.300.000 |
| d. | Dana Perimbangan Dari Prop | 24.411.148.000 | 27.362.603.606 | 21.748316.000 | 21.056.014.520 | 22.320.543.000 | |
| III. | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | - | 518.942.949 | 25.835.071.000 | 30.091.152.830 | 30.733.428.000 | 33.272.196.115 |
| | Total Pendapatan | 620.995.699.000 | 638.059.213.655 | 667.105.399.000 | 686.308.757.512 | 728.278.846.000 | 756.910.319.097 |

| No. | Pendapatan daerah | 2009 | | 2010 | |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| I. | Pendapatan Asli Daerah | 69.871.265.000 | 81.819.333.588 | 70.610.736.000 | 76.441.045.221 |
| a. | Pajak Daerah | 10.596.000.000 | 11.782.513.235 | 12.117.250.000 | 12.969.956.160,00 |
| b. | Retribusi Daerah | 32.030.001.000 | 39.554.382.955 | 39.256.920.000 | 44.575.329.393,00 |
| c. | Bagian Laba Usaha Daerah | 5.494.290.000 | 5.780.559.510 | 5.274.101.000 | 5.305.677.515,00 |
| d. | Lain-lain PAD yang sah | 21.750.974.000 | 24.701.877.888 | 13.962.465.000 | 13.589.582.153,00 |
| II. | Dana Perimbangan | 680.608.113.000 | 685.823.813.995 | 721.548.342.000 | 728.760.540.210 |
| a. | Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak | 36.460.047.000 | 41.675.747.995 | 39.992.550.000 | 47.204.748.210 |
| b. | Dana Alokasi Umum | 609.478.066.000 | 609.478.066.000 | 619.895.592.000 | 619.895.592.000 |
| c. | Dana Alokasi Khusus | 34.670.000.000 | 34.670.000.000 | 61.660.200.000 | 61.660.200.000 |
| d. | Dana Perimbangan Dari Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 43.160.764.000 | 61.431.071.406 | 118.173.597.000 | 128.512.231.754 |
| | Total Pendapatan | 793.640.142.000 | 829.074.218.989 | 910.332.675.000 | 933.713.817.185 |

Pendapatan daerah Kabupaten Pemalang didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, dengan kecenderungan menurun dari sebesar 86,31% pada tahun 2006 menjadi 78,05% pada tahun 2010. Proporsi pendapatan asli daerah berada pada kisaran antara 8,14% hingga 9,87%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan peningkatan dari sebanyak 4,37% pada tahun 2006 menjadi 13,76% pada tahun 2010. Idealnya keuangan daerah Kabupaten Pemalang diperoleh dari PAD sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah diatas 50% berarti tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Namun demikian perlu dipahami bahwa pengelolaan pajak-pajak yang memberikan kontribusi besar seperti PPN dan PPh pengelolaannya sampai saat ini belum didesentralisasikan.

Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Proporsi Pendapatan Asli daerah Realisasi APBD
Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2009



Proporsi PAD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2006-2010 yang berkisar antara 8,14% hingga 9,32% menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Pemalang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 90% pembiayaan pembangunan masih bergantung kepada dana perimbangan dari pusat maupun propinsi. Kenyataan ini hendaknya menjadikan pemicu bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bekerja lebih keras lagi, lebih kreatif dan inovatif lagi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah didominasi oleh retribusi daerah dengan kontribusi sekitar 48,34% hingga 58,31% dari PAD, sedangkan pajak hanya memberikan kontribusi sebesar 14,40% hingga 16,97% dari PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang masih mengandalkan retribusi dari masyarakat.

Di Kabupaten Pemalang dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sumber terbesar pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

2. Neraca Daerah

Penilaian terhadap pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2010 diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan/metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap Rasio Antar Pos Neraca (Rasio Cair/ Quick Ratio, Rasio Hutang terhadap Total Aset, dan Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset).

Tabel 3.2
Ringkasan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2009 dan 2010

| No | Uraian | 2009 | 2010 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| A | Aset | | |
| 1. | Aset lancar | 80.872.637.711 | 91.338.370.312,22 |
| 2. | Investasi jangka panjang | 49.633.480.732 | 53.469.722.732 |
| 3. | Aset tetap | 1.803.789.794.785 | 1.868.142.415.169 |
| 4. | Dana cadangan | 10.949.426.362 | 0 |
| 5. | Aset lainnya | 2.533.696.686 | 3.904.573.986 |
| | Jumlah aset | 1.947.779.036.276 | 2.016.855.082.199 |
| B | Kewajiban | | |
| 1. | Kewajiban jangka pendek | 2.715.449.535 | 2.175.449.535 |
| 2. | Kewajiban jangka panjang | 3.564.341.594 | 2.420.872.987 |
| | Jumlah kewajiban | 7.641.663.411 | 5.136.322.522 |
| C | Ekuitas dana | | |
| 1. | Ekuitas dana lancar | 76.795.315.894 | 88.622.920.776 |
| 2. | Ekuitas dana investasi | 1.852.392.630.608 | 1.923.095.838.899 |
| 3. | Ekuitas dana cadangan | 10.949.426.362 | 0 |
| | Jumlah ekuitas dana | 1.940.137.372.864 | 2.011.718.759.676 |
| | Jumlah kewajiban dan ekuitas dana | 1.947.779.036.276 | 2.016.855.082.199 |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pemalang 2010

Analisis neraca daerah Kabupaten Pemalang tahun 2010 secara ringkas sebagai berikut:

a) Rasio Cair (*Quick Ratio*)

Rasio Cair (*quick ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum angka diatas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya Pemerintah Daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada. Sementara itu angka dibawah 100% menunjukkan hasil yang kurang baik.

$$\text{Rasio Cair (Quick Ratio)} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Jangka Pendek}} = 1.575,63\%$$

Capaian rasio cair sebesar 1.575,63% menunjukkan kinerja keuangan Kabupaten Pemalang sangat baik, Artinya Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2010 mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya.

b) Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt Ratio*)

Rasio Hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang PFK, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} = 0,45\%$$

Angka rasio di Kabupaten Pemalang sebesar 0,45% menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung hasil aktifitas operasi bukan dari pinjaman.

c) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri dalam membiayai pembangunan.

$$\boxed{\text{Rasio Ekuitas Dana Aset Terhadap Total Aset}} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}} = \boxed{99,55\%}$$

Angka yang mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri. Capaian Rasio Ekuitas Dana Aset Terhadap Total Aset di Kabupaten Pemalang sebesar 99,55% menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana hasil aktifitas operasi, bukan dari pinjaman.

d) Debt Service Ratio (DSR)

Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Unsur yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah Pembayaran Hutang dan Bunga, dan Biaya Pinjaman Lainnya yang dibayar dalam Tahun Anggaran.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standart DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan hutang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga hutang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (Minimal) dapat diartikan baik, dan makin besar angka rasio maka makin jelek kondisi keuangan Pemda atau makin berat beban APBD.

$$\boxed{\text{DSR}} = \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok + Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}} = \boxed{0,46\%}$$

Angka DSR sebesar pada TA 2010 sebesar 0,46% menunjukkan kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan rasio pada TA 2009 yang sebesar 0,54%. Salah satu faktornya adalah telah dilunasinya satu dari dua hutang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada ADB (melalui Pemerintah Pusat) yakni Penerusan Pinjaman RDA-188/DP3/1994 tanggal 30 Maret 1994 telah lunas pada bulan maret 2009.

e) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Debt Service Coverage ratio (DSCR) memiliki logika yang tidak berbeda dengan Debt Service Ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar hutang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, penerimaan SDA, dan bagian daerah lainnya seperti PPh perseorangan, serta DAU setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (Pasal 12, PP Nomor 54 tahun 2005 Tentang Pinjaman daerah).

$$\boxed{\text{DSCR}} = \frac{(\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Pembayaran Pokok} + \text{Bunga} + \text{Jasa Bank}} = \boxed{5.130,31\%}$$

Angka DSCR sebesar 5.130,31% menunjukkan bahwa dari sisi ini Pemerintah Kabupaten Pemalang dimungkinkan untuk mencari alternatif pembiayaan dalam bentuk pinjaman daerah, jika diperlukan. Meskipun perhitungan DSCR bukan satu-satunya faktor yang diperhitungkan ketika hendak melakukan pinjaman daerah.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

1. Proporsi Pengguna Anggaran

Belanja daerah Kabupaten Pemalang dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. **Belanja tidak langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- 1) **Belanja pegawai**, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati/Wakil Bupati dan biaya pemungutan pajak daerah.
- 2) **Belanja bunga**, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak lainnya.
- 3) **Subsidi**, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) **Belanja hibah**, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat *cross cutting issue*.
- 5) **Bantuan sosial**, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.
- 6) **Belanja bagi hasil**, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- 7) **Bantuan keuangan** yang bersifat umum maupun khusus
- 8) **Belanja tak terduga**, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :

1. **Belanja pegawai**, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur
2. **Belanja barang dan jasa**, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
3. **Belanja modal**, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Kebijakan anggaran dalam kurun waktu 4 tahun (2006-2009) secara ringkas sebagai berikut:

- a. Pada APBD Tahun Anggaran 2006 belanja daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan; penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan taraf hidup penduduk miskin; peningkatan sarana dan prasarana fisik; peningkatan kinerja aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima; peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkesinambungan; dan peningkatan ketertiban dan keamanan.
- b. Pada APBD Tahun Anggaran 2007 belanja daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan; pemberantasan

kemiskinan dengan peningkatan taraf hidup penduduk miskin; peningkatan sarana dan prasarana fisik; peningkatan kinerja aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima; peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkesinambungan; dan peningkatan ketertiban dan keamanan.

- c. Pada APBD Tahun Anggaran 2008 belanja daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan; penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan taraf hidup penduduk miskin; peningkatan sarana dan prasarana fisik; peningkatan kinerja aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima; peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkesinambungan; dan peningkatan ketertiban dan keamanan.
- d. Pada APBD Tahun 2009, belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk peningkatan pelayanan dan kepentingan publik termasuk optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengatasan kemiskinan berupa jaminan kesehatan masyarakat miskin, perluasan akses terhadap pendidikan maupun pengembangan infrastruktur jalan/jembatan dan sarana perdesaan serta pendampingan pengatasan dan antisipasi bencana alam disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan peningkatan dan pengembangan aset daerah.
- e. Pada APBD Tahun Anggaran 2010, belanja diarahkan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah diikuti peningkatan kinerja aparat yang berkualitas, professional, dan berjiwa pelayanan prima dalam upaya mendukung tercapainya suasana yang tertib, aman, dan damai ; peningkatan pertumbuhan ekonomi investasi, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan antar wilayah.

Perkembangan belanja di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 4 tahun (2006-2010) menunjukkan kecenderungan meningkat, secara rinci sebagai berikut:

- a. Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 648.133.929.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 583.144.513.242,00 (89,97%), terdiri dari belanja tidak langsung Rp 307.356.335.156,00 dan belanja langsung Rp 275.788.178.086,00.
- b. Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 742.496.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 651.124.068.777,00 (87,69%), terdiri dari kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp 363.964.882.736,00 dan kelompok belanja langsung sebesar Rp 287.159.185.941,00.
- c. Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 831.478.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 767.167.955.591,00 (92,27%), terdiri dari kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp 481.657.037.977,00 dan kelompok belanja langsung sebesar Rp 285.510.917.614,00.
- d. Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 893.747.833.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 843.963.216.570,00 (94,43%), terdiri dari kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp 552.044.383.050,00 dan kelompok belanja langsung sebesar Rp 291.918.833.520,00.
- e. Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.005.074.569.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 928.713.828.281,00, terdiri dari kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp 684.233.134.350,00 dan kelompok belanja langsung sebesar Rp 244.480.693.931,00, terdiri dari kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp 684.233.134.350,00 dan kelompok belanja langsung sebesar Rp 244.480.693.931,00.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Laporan Realisasi Belanja Kabupaten Pemalang
Tahun 2006 s.d Tahun 2009

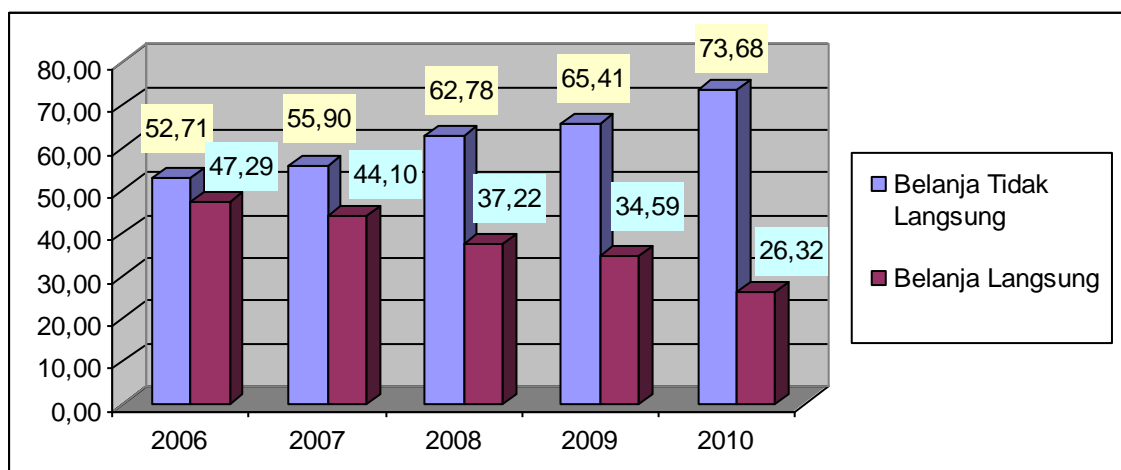
| No | Uraian | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | | | | | |
| | Belanja Pegawai | 264.756.818.841 | 310.951.852.283 | 410.659.617.734 | 481.684.699.150 | 588.737.311.496 |
| | Belanja Bunga | 697.129.891 | 576.645.922 | 497.055.669 | 426.250.058 | 326.805.691 |
| | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| | Belanja Hibah | | | 3.218.701.000 | 8.040.800.000 | 23.981.177.694 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 16.645.937.514 | 18.483.393.890 | 14.442.058.500 | 16.302.219.962 | 21.747.890.000 |
| | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa | 21.564.544.410 | 1.080.193.011 | 1.727.942.124 | 1.737.359.780 | 1.882.677.792 |
| | Belanja Bantuan Keuangan Kpd Pemerintahan Desa | | 31.877.958.000 | 48.238.177.350 | 43.665.169.100 | 46.591.586.777 |
| | Belanja Tak Terduga | 3.691.904.500 | 994.839.630 | 2.873.485.600 | 187.885.000 | 965.684.900 |
| | Jml Belanja Tidak Langsung | 307.356.335.156 | 363.964.882.736 | 481.657.037.977 | 552.044.383.050 | 684.233.134.350 |
| 2 | Belanja Langsung | | | | | |
| | Belanja Pegawai | 7.403.336.361 | 49.959.398.132 | 55.628.856.839 | 52.179.294.769 | 49.639.881.492 |
| | Belanja Barang Jasa | 152.489.466.725 | 88.786.766.552 | 94.782.257.605 | 113.207.161.753 | 117.666.545.406 |
| | Belanja Modal | 115.895.375.000 | 148.413.021.257 | 135.099.803.170 | 126.532.376.998 | 77.174.267.033 |
| | Jumlah Belanja Langsung | 275.788.178.086 | 287.159.185.941 | 285.510.917.614 | 291.918.833.520 | 244.480.693.931 |
| | Jumlah Belanja Daerah | 583.144.513.242 | 651.124.068.677 | 767.167.955.591 | 843.963.216.570 | 928.713.828.281 |
| | Jumlah Pendapatan Daerah | 638.059.213.655 | 686.308.757.512 | 756.910.319.097 | 829.074.218.989 | 933.713.817.185 |
| | Surplus/(Defisit) | 54.914.700.413 | 35.184.688.835 | 10.257.636.494) | (14.888.997.581) | 4.999.988.904 |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pemalang 2010

Struktur belanja daerah Kabupaten Pemalang didominasi Belanja Tidak Langsung, dengan proporsi yang cenderung meningkat dari sebanyak 52,7% pada tahun 2006 menjadi 65,4% pada tahun 2009. Sebaliknya proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar belanja digunakan untuk pembiayaan belanja tidak langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa postur anggaran pemerintah Kabupaten Pemalang kurang ideal, yang ditandai semakin meningkatnya pengeluaran akibat peningkatan belanja pegawai (tidak langsung) sebagai akibat dari kebijakan pemerintah (pusat) dalam hal pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang tidak diimbangi dengan peningkatan dana perimbangan sehingga pada pelaksanaannya mengokupasi alokasi belanja modal.

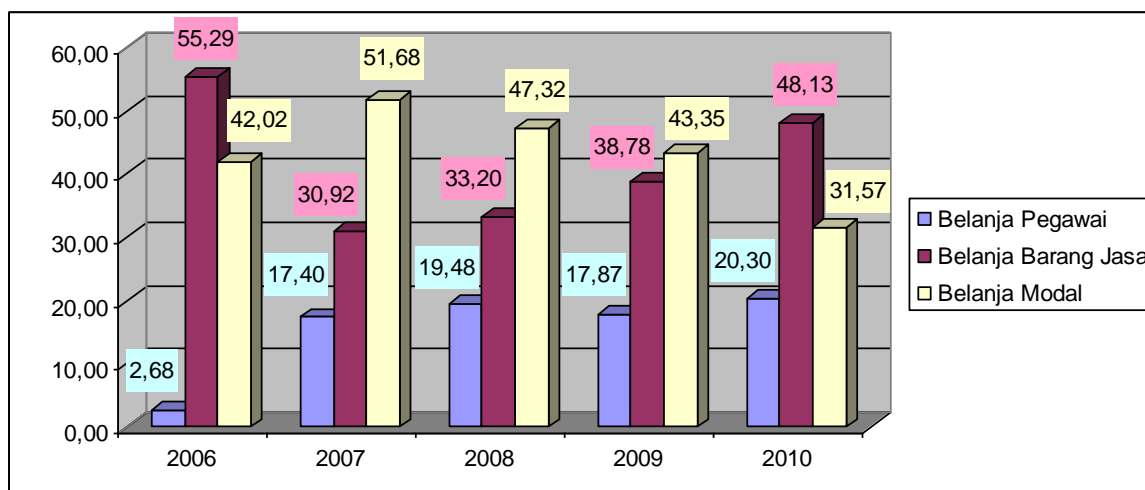
Proporsi masing-masing pos belanja daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.2
Grafik Perbandingan Proporsi Masing-masing Unsur Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2010



Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 42,02% pada tahun 2006 menjadi 51,68% pada tahun 2007, sebesar 47,32% pada tahun 2008, sebesar 43,35% pada tahun 2009 dan 31,57% pada tahun 2010. Sebaliknya belanja barang dan jasa cenderung meningkat dari sebesar 30,92% pada tahun 2007, sebesar 33,20% pada tahun 2008, sebesar 38,78% pada tahun 2009, dan 48,13% pada tahun 2010. Kondisi demikian menunjukkan bahwa alokasi belanja lebih banyak untuk penyelenggaraan kegiatan yang tidak bersifat penyediaan infrastruktur wilayah. Perkembangan proporsi masing-masing unsur belanja langsung Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.3
Grafik Perbandingan Masing-masing Unsur Belanja Langsung Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2010



2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Transfer dari Dana Cadangan; (3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; dan (4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, maupun berupa Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup: (1) Transfer ke Dana Cadangan; (2) Investasi/Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 adalah anggaran defisit. Kebijakan tersebut terutama untuk mendukung kebutuhan belanja dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan defisit ini secara cermat juga memperhitungkan realisasi SILPA pada tahun anggaran sebelumnya sebagai sumber pembiayaan utama untuk menutup defisit yang ada.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terutama diarahkan untuk :

1. Membayar angsuran kewajiban jangka panjang pemerintah yaitu: (1) Pinjaman Pembangunan Pasar Inpres Tahun 1986, (2) Pinjaman dengan kode RDA-188/DP3/1994 Tahun 1994 dan (3) Pinjaman dengan Kode SLA-863/DP3/1996 Tahun 1996;
2. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010 yang dialokasikan dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2009.
3. Penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk penguatan Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi pembiayaan daerah TA 2010 sebesar Rp 64.328.635.615,00 atau 68,03% dari target (Rp. 94.561.894.000,00), lebih rendah dari tahun 2009 sebesar Rp 73.618.993.300,00. Beberapa catatan pelaksanaan realisasi pembiayaan selama periode tersebut adalah:

- a) Selesai/dilunasinya pembayaran dua dari tiga kewajiban/hutang pemerintah daerah yaitu : (1) Pinjaman Pembangunan Pasar Inpres Tahun 1986 yang dilunasi pada Tahun Anggaran 2006; dan (2) Pinjaman dengan kode RDA-188/DP3/1994 yang dilunasi pada tahun anggaran 2009.
- b) Realisasi pembentukan dana cadangan sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp 10.000.000.000,00 untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010. Dana cadangan tersebut sudah direalisasikan pengeluarannya pada Tahun Anggaran 2010.
- c) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, yang mulai direalisasikan penyertaan modalnya pada Tahun Anggaran 2007.

Realisasi pembiayaan selama tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010

| No | Jenis Pembiayaan | 2006 (Rp) | 2007 (Rp) | 2008 (Rp) | 2009 (Rp) | 2010 (Rp) |
|----------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| A | Penerimaan Pembiayaan | | | | | |
| 1 | Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 37.242.840.008 | 82.073.553.799 | 106.811.424.348 | 83.717.589.707 | 58.729.995.719 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | | 10.000.000.000 |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | | | |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | 2.867.000.000 | 2.500.000.000 | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 |
| 5 | Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | | 1.210.000.000 | 4.330.000.000 | 5.905.000.000 | 8.811.893.000 |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | 1.000.000.000 | | | | |
| 7 | penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman-Pemda Lainnya | | 2.867.000.000 | | | |
| 9 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 38.242.840.008.00 | 89.017.553.799 | 113.641.424.348 | 93.122.589.707.00 | 81.041.888.719 |
| B | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| 2 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.810.466.415 | 8.500.000.000 | 11.500.000.000 | 9.442.190.761 | 5.236.000.000 |
| 3 | Pembayaran Pokok Utang | 773.520.207 | | 3.128.698.187 | 4.061.405.646 | 3.977.253.104 |
| 4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 2.000.000.000 | 2.867.000.000 | 2.500.000.000 | 3.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| 5 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemerintah Lainnya | | | | | |
| 6 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda Lainnya | | 2.867.000.000 | | | |
| 7 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemerintah Pusat | | 634.318.186 | | | |
| 8 | Pembayaran Pokok Pinjaman DN-PemProv Jateng | | | | | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 11.083.986.622 | 17.368.318.186 | 19.628.698.187 | 19.503.596.407 | 16.713.253.104 |
| | Pembiayaan Netto | 27.158.853.386 | 71.649.235.613 | 94.012.726.161 | 73.618.993.300 | 64.328.635.615 |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pemalang 2010

C. Kerangka Pendanaan

Belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Pemalang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (pada pos belanja tidak langsung), dan belanja pegawai pada pos belanja langsung. Sementara itu pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meliputi pembentukan dana cadangan dan pembayaran pokok hutang. Total belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada pos belanja pegawai. Pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk pembentukan dana cadangan persiapan pemilu dan pembayaran pokok hutang. Secara rinci belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Pemalang tahun 2006-2009

| No | Uraian | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I | Belanja | | | | | |
| A. | Belanja Tidak Langsung | | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai | 264.756.818.841 | 310.951.852.283 | 410.659.617.734 | 481.684.699.150 | 588.737.311.496 |
| 2 | Belanja Bunga | 697.129.891 | 576.645.922 | 497.055.669 | 426.250.058 | 326.805.691 |
| 3 | Belanja bagi hasil kepada pemdes | 21.564.544.410 | 1.080.193.011 | 1.727.942.124 | 1.737.359.780 | 1.882.677.792 |
| 4 | Belanja bantuan keuangan kepada pemdes | 0 | 31.877.958.000 | 48.238.177.350 | 43.665.169.100 | 46.591.586.777 |
| | Total belanja Tidak Langsung yang wajib dan Mengikat | 287.018.493.142 | 344.486.649.216 | 461.122.792.877 | 527.513.478.088 | 637.538.381.756 |
| II | Pembiayaan | | | | | |
| | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| 1 | Pembentukan dana cadangan | 2.500.000.000 | 2.500.000.000.00 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| 2 | Pembayaran pokok hutang | 773.520.207 | 0 | 3.128.698.187 | 4.061.405.646 | 3.977.253.104 |
| | Total pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat | 294.421.829.503 | 394.446.047.348 | 516.751.649.716 | 579.692.772.857 | 3.977.253.104 |

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pemalang untuk mendanai pembangunan daerah diprediksikan mengalami peningkatan, namun masih kecil. Pendapatan daerah diproyeksi secara moderat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,35% untuk PAD, sekitar 10,00% untuk dana perimbangan, dan sebesar 5% untuk lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya diharapkan menurun dengan rata-rata penurunan seiring dengan meningkatnya ketepatan dalam penganggaran program dan kegiatan pembangunan.

Pengeluaran belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat di Kabupaten Pemalang yang paling besar adalah belanja pegawai rata-rata sebesar 10%. Peningkatan belanja pegawai dipengaruhi oleh peningkatan gaji berkala dan penambahan cadangan sekitar 2,5% dengan catatan tidak terjadi keputusan dari pemerintah pusat mengenai kenaikan gaji pegawai. Belanja tidak langsung lainnya yang cukup besar adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang pengelolaannya untuk pembangunan pedesaan. Diperkirakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa mengalami peningkatan. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa diharapkan mengalami penurunan seiring dengan peningkatan alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Sementara itu belanja bunga diperkirakan tidak mengalami perubahan. Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat di Kabupaten Pemalang juga mengalami peningkatan, khususnya pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Alokasi belanja langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Pemalang diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan namun dilihat dari persentasenya terhadap belanja daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan peningkatan belanja tidak langsung dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka peran kebijakan dan inovasi daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sangat diperlukan. Disatu sisi beban anggaran karena jumlah pegawai dan peningkatan gaji PNS setiap tahun meningkat serta kebutuhan pendanaan pembangunan juga direncanakan naik, di sisi regulasi sebagai dasar pendapatan daerah semakin selektif dengan tidak membebani masyarakat. Penerbitan perda tentang pajak dan retribusi daerah yang pro pendapatan sekaligus tidak membebani masyarakat menjadi salah satu alternatif yang harus ditempuh. Pada sisi yang lain, investasi masyarakat dan dunia usaha diharapkan terus berkembang guna menggerakkan aktivitas ekonomi lokal yang bermuara pada akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya guna memberikan gambaran kerangka pendanaan jangka menengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011 – 2016

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | Pendapatan Daerah | 1.139.605.953.000 | 1.177.511.828.074 | 1.210.511.828.074 | 1.255.561.824.100 | 1.285.901.240.200 | 1.335.657.959.000 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 74.784.376.000 | 77.590.250.000 | 92.590.250.000 | 101.590.250.000 | 109.930.450.000 | 115.240.570.000 |
| 2 | Dana Perimbangan | 779.721.384.000 | 819.721.384.000 | 830.721.384.000 | 861.721.384.000 | 881.720.600.000 | 923.077.289.000 |
| 3 | Lain- Lain Pendapatan yang sah | 285.100.193.000 | 280.200.194.074 | 287.200.194.074 | 292.250.190.100 | 294.250.190.200 | 297.340.100.000 |
| II | Belanja Daerah | 1.245.072.032.000 | 1.220.767.217.253 | 1.266.379.432.036 | 1.301.740.233.823 | 1.354.164.165.629 | 1.394.608.347.134 |
| A | Belanja Tidak Langsung | 824.760.156.000 | 799.401.342.182 | 829.933.702.086 | 858.956.097.266 | 906.711.333.288 | 931.080.703.350 |
| | Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap belanja daerah (%) | 66,24 | 65,48 | 65,54 | 65,99 | 66,96 | 66,76 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung yang wajib dan Mengikat | 775.347.243.000 | 782.058.322.220 | 812.590.682.124 | 841.613.077.304 | 888.368.313.326 | 913.737.683.388 |
| a | Belanja Pegawai | 726.042.143.000 | 733.867.146.910 | 763.609.361.601 | 791.970.297.761 | 838.167.327.537 | 862.984.060.291 |
| b | Belanja Bunga | 481.505.000 | 481.505.000 | 481.505.000 | 481.505.000 | 481.505.000 | 481.505.000 |
| c | Belanja bagi hasil kepada pemdes | 1.628.600.000 | 1.821.400.000 | 2.152.662.510 | 2.350.650.000 | 2.440.750.000 | 2.520.600.000 |
| d | Belanja bantuan keuangan kepada pemdes | 47.194.995.000 | 45.888.270.310 | 46.347.153.013 | 46.810.624.543 | 47.278.730.789 | 47.751.518.097 |
| 2 | Belanja Tidak Langsung yang tidak wajib dan Mengikat | 49.412.913.000 | 17.343.019.962 | 17.343.019.962 | 17.343.019.962 | 18.343.019.962 | 17.343.019.962 |
| a | Belanja Hibah | 17.465.713.000 | 6.040.800.000 | 6.040.800.000 | 6.040.800.000 | 7.040.800.000 | 6.040.800.000 |
| b | Belanja Bantuan Sosial | 30.780.714.000 | 10.302.219.962 | 10.302.219.962 | 10.302.219.962 | 10.302.219.962 | 10.302.219.962 |
| c | Belanja tidak terduga | 966.486.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| d | belanja subsidi | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Belanja Langsung | 420.311.876.000 | 421.365.875.071 | 436.445.729.950 | 442.784.136.557 | 447.452.832.341 | 463.527.643.784 |
| | Proporsi Belanja Langsung terhadap belanja daerah (%) | 33,76 | 34,52 | 34,46 | 34,01 | 33,04 | 33,24 |
| a | Rencana Alokasi Belanja Langsung Program Prioritas I (Pencapaian Visi Misi Bupati dan penyelesaian isu strategis utama). | 144.533.173.000 | 184.685.000.000 | 197.294.000.000 | 173.480.000.000 | 156.330.000.000 | 177.576.700.000 |
| b | Rencana Alokasi Belanja Program Prioritas II (Program seluruh SKPD). | 275.778.703.000 | 236.680.875.071 | 239.151.729.950 | 269.304.136.557 | 291.122.832.341 | 285.950.943.784 |

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Surplus | -105.466.079.000 | -43.255.389.179 | -55.867.603.962 | -46.178.409.723 | -68.262.925.429 | -58.950.388.134 |
| | | | | | | | |
| III | Pembiayaan | | | | | | |
| A | Penerimaan Pembiayaan | 122.094.573.000 | 63.104.761.498 | 71.724.009.608 | 61.364.815.369 | 80.449.331.075 | 75.136.793.780 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 69.328.624.000 | 56.104.761.498 | 38.542.624.229 | 27.294.137.711 | 17.421.805.647 | 17.708.948.838 |
| 2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 47.265.949.000 | 3.500.000.000 | 29.181.385.379 | 30.070.677.658 | 42.527.525.428 | 52.927.844.942 |
| 3 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | 5.500.000.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| 4 | Pencairan dana cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000.000 | 0 |
| B | Pengeluaran Pembiayaan | 16.628.494.000 | 19.849.372.319 | 15.856.405.646 | 15.186.405.646 | 12.186.405.646 | 16.186.405.646 |
| 1 | Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat | 488.494.000 | 8.057.372.319 | 8.561.405.646 | 8.561.405.646 | 5.061.405.646 | 9.061.405.646 |
| a | Pembentukan dana cadangan | 0 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 |
| b | Pembayaran pokok hutang | 488.494.000 | 4.057.372.319 | 4.561.405.646 | 4.561.405.646 | 5.061.405.646 | 5.061.405.646 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan yang tidak wajib dan mengikat | 16.140.000.000 | 11.792.000.000 | 7.295.000.000 | 6.625.000.000 | 7.125.000.000 | 7.125.000.000 |
| a | Penyertaan modal pemerintah daerah | 10.640.000.000 | 8.292.000.000 | 3.295.000.000 | 2.625.000.000 | 2.625.000.000 | 2.625.000.000 |
| b | Pemberian pinjaman daerah | 5.500.000.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| | | | | | | | |
| | Pembiayaan Netto | 105.466.079.000 | 43.255.389.179 | 55.867.603.962 | 46.178.409.723 | 68.262.925.429 | 58.950.388.134 |
| | SILPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian hasil-hasil pembangunan sebagaimana telah dikemukakan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, selanjutnya dapat dilakukan analisis isu strategis sesuai kewenangan pemerintah daerah. Rumusan permasalahan masing-masing urusan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, diketahui sebagai berikut :

1. Urusan Kewenangan Wajib

a. Pendidikan

- 1) Jumlah PAUD sesuai standar masih sedikit dan masih rendahnya kualitas guru PAUD dan TK. Jumlah PAUD sesuai standar 24,34% sedangkan jumlah guru PAUD yang sesuai kualifikasi sebesar 29,12%. Selain itu jumlah PAUD di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dan jumlah murid berfluktuasi bahkan pada tahun 2010 jumlah murid mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009.
- 2) APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah, pada tahun 2010 sebesar 75,28%. Angka Drop Out (DO) SMP sebesar 0,78%, termasuk cukup. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran SD dan SMP, terutama jumlah SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar masih rendah (sebesar 4,7%).
- 3) APK dan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih relatif rendah tahun 2010 sebesar 55,22% dan APM sebesar 45,70%. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2010 sebesar 0,63%, lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,31%. Target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah angka putus sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,21% pada tahun 2013.
- 4) Masih kurangnya kualifikasi guru berpendidikan D4/S1 untuk jenjang pendidikan dasar dan masih rendahnya jumlah guru yang bersertifikasi pada semua jenjang pendidikan. Persentase guru yang memiliki kualifikasi D4/S1 untuk jenjang SD/MI sebesar 71,23%, dan jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 87,84%.
- 5) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal, dibuktikan dengan angka kelulusan pendidikan kesetaraan masih di bawah 95%.
- 6) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan luar biasa (SDLB) yang ditandai dengan rendahnya sarana dan prasarana pendidikan luar biasa.
- 7) Belum semua sekolah menerapkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

b. Kesehatan

- 1) Masih kurangnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita, hal ini ditandai dengan tingginya AKI di Kabupaten Pemalang . Pada tahun 2010 AKI Kabupaten Pemalang sebesar 197,06 per 100.000 kelahiran hidup, AKB sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup dan masih ditemukannya balita dengan gizi buruk dan bawah garis merah di perdesaan.
- 2) Masih tingginya kasus penyakit menular terutama DBD, TB Paru, diare, HIV/AIDS dan Kusta. Hal ini ditandai dengan masih tingginya *Incident Rate* DBD, TB Paru, Diare, HIV/AIDS dan Kusta serta ditemukannya kasus CFR DBD cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
- 3) Masih kurangnya presentase penemuan kasus TB Paru, Phenomonía, dan surveillance HIV/AIDS.
- 4) Terlambatnya penemuan kasus penyakit menular sehingga kondisi pasien dalam stadium lanjut khususnya untuk penyakit TB paru, Kusta dan HIV/AIDS.
- 5) Meningkatnya jumlah penderita penyakit tidak menular (diabetes mellitus, stroke, hipertensi, jantung dan kanker).

- 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- 7) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, cakupan rumah sehat, dan masih ditemukannya tempat-tempat umum yang belum memenuhi syarat kesehatan.
- 8) Masih belum optimalnya penanganan kasus kurang gizi.

a. Pekerjaan Umum

- 1) Masih rendahnya pelayanan jaringan jalan yang baik, data kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 44%, sedangkan kondisi jalan yang sedang 16%, rusak ringan 21% dan rusak berat sebesar 18%.
- 2) Meningkatnya jumlah jalan yang rusak, karena kurang optimalnya fungsi drainase
- 3) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan pelayanan jaringan pengairan untuk lahan persawahan. Hal ini dapat diketahui dari angka kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder, maupun tersier. Proporsi rumah tangga yang dapat mengakses sarana air minum tahun 2010 untuk wilayah perkotaan baru mencapai 74,42%, sedangkan wilayah pedesaan 69,84%.
- 4) Masih rendahnya proporsi rumah tangga bersanitasi. Tahun 2010 proporsi rumah tangga bersanitasi wilayah perkotaan baru mencapai 64,96%, sedangkan wilayah pedesaan mencapai 52,58%.
- 5) Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk, perilaku konsumsi yang belum ramah lingkungan dan rendahnya kesadaran masyarakat dengan pengelolaan sampah.
- 6) Belum optimalnya pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- 7) Belum optimalnya kualitas TPA, hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang masih menggunakan sistem *onsite*.

b. Perumahan

- 1) Pertumbuhan penduduk cukup tinggi sehingga kebutuhan perumahan semakin meningkat. Rata-rata pertumbuhan kebutuhan rumah pada 4 tahun terakhir (2006-2010) sebesar 13%.
- 2) Masih rendahnya penyediaan rumah, baik oleh pengembang maupun secara swadaya. Rumah yang didirikan oleh pengembang hanya sebesar 1,71%, penyediaan rumah secara swadaya sebesar 98,28%.
- 3) Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah rumah tidak layak huni /rumah non permanen di Kabupaten Pemalang tahun 2010 sebesar 139.269 unit.
- 4) Masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang kumuh. Tahun 2010 persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 9,19%, dengan jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh sebesar 850 jiwa.
- 5) Masih rendahnya cakupan pelayanan kebakaran. Tahun 2010 pemadam kebakaran yang ada hanya di Kecamatan Comal dan Pemalang, tahun 2011 direncanakan di Kecamatan Randudongkal.

c. Tata Ruang

- 1) Masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan pemanfaatan ruang.
- 2) Masih adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan dan tata ruang, antar sektor, yaitu kehutanan, ruang terbuka hijau, kebutuhan lahan untuk prasarana wilayah dan permukiman.
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

- 4) Masih kurangnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Pemalang. Tahun 2009 luas RTH di Kabupaten Pemalang hanya sebesar 933 Ha sedangkan tata ruang luasan di kawasan perkotaan (dalam RTRW) sebesar 4.563 Ha.

d. Perencanaan Pembangunan

- 1) Masih terbatasnya kapasitas aparatur perencana di masing-masing SKPD dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung perencanaan.
- 2) Belum lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan daerah, terkait dengan perencanaan pembangunan sektoral dan komitmen internasional.
- 3) Belum optimalnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan sosial.
- 4) Belum lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan pengelolaan sumberdaya alam.
- 5) Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan, terutama rencana penanggulangan kemiskinan, pengurangan resiko bencana, kesetaraan dan keadilan gender dan lain-lain.

e. Perhubungan

- 1) Masih kurangnya kualitas manajemen pengaturan lalu lintas dan rendahnya disiplin pengguna jalan.
- 2) Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum antar wilayah bagi masyarakat.
- 3) Tingginya beban lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan yang padat dan banyaknya daerah rawan kecelakaan (antar moda bercampur (truck, becak, dokar), dari pusat jalur pantura masih bercampur.
- 4) Belum diimplementasikan tataran transportasi lokal (tatralok) sebagai tindak lanjut masterplan tatralok.

f. Lingkungan Hidup

- 1) Meningkatnya produksi sampah domestik yang tidak sebanding dengan daya tampung sarana pengelolaan dan pengolahan sampah. Hal ini ditandai penggunaan TPA yang telah melampaui batas akhir operasi.
- 2) Meningkatnya pencemaran air dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini diketahui dari meningkatnya pencemaran di 6 sungai di Kabupaten Pemalang.
- 3) Menurunnya kualitas sumber daya air dan sumberdaya alam, disebabkan meningkatnya alih fungsi lahan dan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan.
- 4) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam. Hal ini ditandai masih minimnya laporan masyarakat mengenai kerusakan sumberdaya alam.
- 5) Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan industri.
- 6) Terbatasnya luas ruang terbuka hijau di wilayah pemukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari persentase ruang terbuka hijau di wilayah permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas hanya 4,82%.

g. Pertanahan

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi pertanahan. Hal ini dikarenakan sistem pendaftaran pertanahan yang belum berjalan secara optimal.
- 2) Masih terdapatnya kasus persengketaan tanah, dapat dilihat dari sering dijumpainya sengketa status tanah antar individu maupun antar institusi/lembaga.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah. Hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah.

h. Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan.
- 3) Perlunya peningkatan kualitas dan masih terbatasnya kuantitas SDM dalam bidang pengelolaan dokumen kependudukan.

i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, terutama tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, kualifikasi tenaga kerja dan upah kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Data tahun 2008 diketahui nilai IPG sebesar 64,6 dan IDG sebesar 59,7.
- 2) Belum optimalnya kelembagaan PUG dan perlindungan anak dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 3) Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan.
- 4) Masih kurangnya program-program pembangunan yang responsif gender bagi masyarakat perdesaan.

j. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1) Tingginya Unmetneed KB, pada tahun 2010 diketahui sebesar 14,95%.
- 2) Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB, ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alat kontrasepsi MOP dan Kondom (1 – 3%).
- 3) Masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB (PLKB), prasarana dan sarana pelayanan KB. Banyaknya desa dan kelurahan sebanyak 222 kelurahan/ desa terdapat 74 orang PLKB sehingga masih terdapat kekurangan.
- 4) Masih tingginya jumlah penduduk miskin, persentase keluarga pra sejahtera (Pra KS) dan sejahtera I (KS I) sebesar 57,11% tahun 2010 dan jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan sebesar 22,17% tahun 2010.

k. Sosial

- 1) Masih rendahnya cakupan penanganan PMKS. Hal ini menyebabkan jumlah PMKS masih cukup tinggi.
- 2) Masih rendahnya peran PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial dan penanganan PMKS.
- 3) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti dan nonpanti.
- 4) Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- 5) Masih rendahnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- 6) Rendahnya peran pemerintah dan lembaga swasta dalam memberdayakan fakir miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

l. Ketenagakerjaan

- 1) Masih besarnya jumlah penganggur, terutama disebabkan rendahnya pendidikan dan keterampilan.
- 2) Masih kurangnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, disamping itu kesempatan kerja yang ada tidak semua dapat dipenuhi dikarenakan kualifikasi tenaga kerja belum sesuai dengan permintaan.
- 3) Belum optimalnya balai latihan kerja dan lembaga pelatihan kerja, serta terbatasnya instruktur yang bersertifikasi.
- 4) Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja.

m. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Masih terbatasnya akses koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan permodalan usaha ke perbankan.
- 2) Masih terbatasnya akses UMKM terhadap informasi pasar dan jangkauan pemasaran.
- 3) Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna bagi pengembangan UMKM.
- 4) Masih kurangnya pemahaman tentang mutu, desain produk dan standar kualitas produk UMKM.
- 5) Masih rendahnya sumbangan koperasi bagi perkembangan perekonomian daerah.
- 6) Masih rendahnya keterampilan SDM di bidang UMKM.
- 7) Meningkatnya jumlah koperasi yang tidak aktif, tahun 2006 koperasi tidak aktif sebanyak 47 unit meningkat menjadi 155 unit pada tahun 2010.

n. Penanaman Modal

- 1) Masih rendahnya realisasi penanaman modal, baik untuk PMDN dan PMA. Besarnya realisasi investasi tahun 2010 sebesar Rp 120,64 milyar.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung investasi daerah. Hal ini ditandai belum adanya kawasan industri yang dimiliki pemerintah daerah.
- 3) Pelayanan perijinan satu pintu belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pelayanan belum memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penanaman modal di daerah.
- 4) Pelayanan penanaman modal masih ditangani beberapa institusi, yaitu Bappeda, KPPT dan bagian perekonomian SETDA Kabupaten Pemalang.
- 5) Belum optimalnya promosi dalam upaya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pemalang.
- 6) Belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap penanaman modal.

o. Kebudayaan

- 1) Masih rendahnya perlindungan dan pemeliharaan peninggalan purbakala yang dikhawatirkan terancam rusak dan hilang.
- 2) Masih rendahnya perlindungan, fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kesenian baik kesenian tradisional maupun modern.
- 3) Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kegiatan tradisi budaya.
- 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana kesenian antara lain gedung kesenian.

p. Pemuda dan Olah Raga

- 1) Belum optimalnya peran pemuda dalam kegiatan pembangunan, disebabkan oleh kapasitas pemuda dan akses pemuda yang masih rendah dalam setiap tahapan pembangunan.
- 2) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda. Hal ini disebabkan dorongan motivasi untuk mengembangkan potensi diri dalam kegiatan usaha ekonomi produktif masih rendah.
- 3) Peran serta organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda masih rendah. Kelembagaan organisasi kepemudaan belum berkembang.
- 4) Rendahnya prestasi olah raga dan pemasyarakatan olah raga kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum terselenggara dengan baik dan berkelanjutan. Pada tahun 2009 prestasi olahraga pada PORDA Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang pada peringkat 26 dari 35 kabupaten/kota.
- 5) Peran kelembagaan/organisasi olah raga dalam meningkatkan prestasi olah raga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari prestasi atlet yang belum menunjukkan prestasi yang nyata pada tingkat regional, provinsi maupun nasional.

- 6) Prasarana dan sarana olah raga masih sangat terbatas, sehingga peningkatan kegiatan olah raga belum sesuai harapan.

q. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Masih kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam masyarakat disebabkan oleh menurunnya jiwa nasionalisme.
- 2) Belum teraktualisasinya nilai-nilai budaya lokal dalam rangka pembentukan karakter/budaya masyarakat.
- 3) Masih terdapat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu mendapat antisipasi/penanganan.
- 4) Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta penanganan penyakit masyarakat (Pekat).
- 5) Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih) dalam melaksanakan penanganan awal gangguan kamtibmas.
- 6) Belum optimalnya manajemen/pengelolaan bencana daerah.
- 7) Masih rendahnya pendidikan politik khususnya bagi pemilih perempuan, pemilih pemula dan masyarakat desa, terkait dengan kesadaran politik, pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara serta penegakan hukum dan HAM di daerah.
- 8) Kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang peraturan daerah yang berlaku masih kurang.
- 9) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas personil satpol PP.
- 10) Masih kurangnya personil PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dalam rangka penegakan perda.
- 11) masih terhambatnya upaya penegakan perda dikarenakan adanya perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi.
- 12) Kurang optimalnya penanganan dan penyelesaian pasca kegiatan penertiban.
- 13) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional

r. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keungan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- 1) Belum semua SKPD di Kabupaten Pemalang menetapkan target pencapaian, Standar Operasional dan Prosedur, serta penerapan SPM sebagai pedoman pelayanan publik sehingga kinerja pelayanan belum dapat terukur secara kuantitatif.
- 2) Belum semua SKPD di Kabupaten Pemalang menetapkan target pencapaian dan menerapkan SPM sebagai pedoman pelayanan publik sehingga kinerja pelayanan belum dapat terukur secara kuantitatif.
- 3) Masih rendahnya perbandingan PAD terhadap APBD dari tahun 2006– 2009 sebesar 6,30–8,88%, antara lain disebabkan upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah belum optimal.
- 4) Masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
- 5) Kurang berkembangnya kerjasama antar daerah dalam meningkatkan promosi daerah, penanaman modal dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan di SKPD dan pemerintah desa yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di desa.
- 7) Belum mantapnya pengawasan, legislasi dan perencanaan penganggaran yang efisien.
- 8) Belum optimalnya penyusunan dan pengawasan produk hukum di daerah yang aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Belum optimalnya sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan.
- 10) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDI Hukum)
- 11) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum.

- 12) Kurang optimalnya dalam pemberian pertimbangan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum.
- 13) Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung LPSE

s. Ketahanan Pangan

- 1) Rendahnya produktivitas pertanian dan produksi tanaman pangan masih bersifat subsisten (fluktuatif). Hal ini ditandai surplus bahan pangan hanya padi dan jagung, ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, daging, telur dan susu mengalami defisit.
- 2) Belum meratanya konsumsi pangan pokok. Hal ini ditandai jumlah desa rawan pangan tahun 2009 sebanyak 72 desa, angka kecukupan gizi sebesar 82,5%, angka kecukupan energi sebesar 1917 kkal/kapita/hari.
- 3) Belum optimalnya jaminan keamanan bahan pangan bagi seluruh masyarakat.

t. Pemberdayaan masyarakat

- 1) Rendahnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa. Hal ini dapat diketahui tingkat ketergantungan masyarakat pada pihak lain masih cukup besar.
- 2) Kurang berkembangnya kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa. Hal ini disebabkan kapasitas SDM yang masih rendah dan jaringan kemitraan dalam mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif belum sepenuhnya dapat diwujudkan.
- 3) Kemampuan dan kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal.
- 4) Kurangnya peran serta masyarakat dan khususnya perempuan dalam setiap tahap pembangunan.
- 5) Kurang optimalnya peran tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
- 6) Rendahnya penyediaan pelayanan masyarakat, hal ini dapat diketahui dari dukungan sarana dan prasarana guna pelayanan pemerintahan dalam hal kesehatan, pendidikan dan sosial budaya.

u. Statistik

- 1) Belum lengkapnya data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dunia usaha.
- 2) Masih kurangnya prasarana dan sarana dalam penyediaan data statistik yang lengkap, akurat dan komprehensif..
- 3) Masih terbatasnya kemampuan aparatur SKPD dalam penyediaan dan pengelolaan data sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Masih kurangnya data yang spesifik dan data tematik untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik
- 5) Masih kurangnya koordinasi antar SKPD dalam mengelola data statistik guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.

v. Kearsipan

- 1) Kurang optimalnya penyelenggaraan Sistem Administrasi Kearsipan di masing-masing SKPD disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana kearsipan. Dalam hal ini penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya mendasarkan pada pedoman yang telah disusun oleh pemerintah.
- 2) Kurang optimalnya kegiatan penyusutan arsip daerah. Hal ini ditandai ada beberapa lembaga/instansi pemerintah yang kesadaran dalam penyelamatan dan pelestarian arsip belum terlaksana dengan baik.
- 3) Belum memadainya SDM pengelola kearsipan di masing-masing SKPD. Kondisi ini terlihat dari jumlah dan kemampuan personil pengelola kearsipan yang sangat minim.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyerahan dokumen/arsip yang bernilai sejarah. Kondisi ini ditandai masih adanya arsip sejarah yang disimpan sendiri oleh masyarakat maupun

stakeholder lainnya dan belum diserahkan kepada lembaga yang mengelola kearsipan.

w. Komunikasi dan Informasi

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum sebanding dengan laju perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
- 2) Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintahan daerah, disebabkan kurang optimalnya pengolahan data dan penyajian informasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
- 3) Kurang memadainya kualitas SDM aparatur dibidang komunikasi dan informatika, disebabkan oleh minimnya pendidikan, ketrampilan dan keahlian aparat di lembaga/instansi pemerintah.
- 4) Belum optimalnya penyebarluasan informasi pemerintahan daerah, disebabkan oleh masih lemahnya kinerja sistem informasi manajemen pemerintahan daerah.

x. Perpustakaan

- 1) Masih rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh masih kurang optimalnya sosialisasi.
- 2) Masih rendahnya budaya membaca.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan disebabkan oleh belum memadainya sumberdaya manusia (tenaga pengelola, pustakawan) dan prasarana pendukung lainnya seperti gedung perpustakaan yang representatif dan perpustakaan keliling yang belum menjangkau semua wilayah perdesaan yang terpencil.
- 4) Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan karena rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder dalam rangka penyerahan karya cetak dan karya rekam, , serta belum optimalnya upaya penelusuran dokumen-dokumen terutama yang memiliki nilai sejarah.

2. Urusan Kewenangan Pilihan

a. Pertanian

- 1) Kurang stabilnya kontinuitas produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini disebabkan perubahan musim yang tidak menentu dan pengaruh hama/penyakit pada tanaman.
- 2) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Hal ini dipengaruhi tingginya harga saprodi pertanian dan tidak stabilnya harga produk pertanian.
- 3) Jangkauan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan masih terbatas. Hal ini disebabkan akses informasi yang rendah dan jaringan pemasaran komoditas pertanian di luar daerah yang belum terjalin secara optimal.
- 4) Masih rendahnya kualitas SDM petani dalam penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
- 5) Masih rendahnya pengaruh penyuluhan pertanian terhadap peningkatan produksi pertanian. Hal ini dipengaruhi intensitas penyuluhan dan kualitas penyuluh.
- 6) Belum optimalnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembada daging.
- 7) Masih adanya kasus penyakit ternak terutama pada jenis ternak ruminansia (hewan ternak besar dan ternak kecil) dan unggas, dan adanya ancaman penyakit ternak dari daerah endemik anthrax.
- 8) Jangkauan pemasaran hasil produksi peternakan masih terbatas. Hal ini disebabkan akses informasi yang rendah dan jaringan pemasaran di luar daerah yang belum terjalin secara optimal.
- 9) Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha peternakan.

b. Kehutanan

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi hasil hutan, khususnya hutan non kayu.
- 2) Masih adanya lahan kritis di luar kawasan hutan, pada tahun 2009 luas lahan kritis seluas 2.107,66 ha.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan.
- 4) Masih tingginya ancaman kerusakan hutan akibat pencurian kayu, kebakaran hutan, dan pohon tumbang (angin ribut). Hal ini dilihat dari luas hutan yang terbakar seluas 12,73 ha (tahun 2006), 209,95 ha (2007), dan 30,90 ha (tahun 2008).
- 5) Masih tingginya kesenjangan antara suply dan demand bahan baku industri kehutanan, khususnya kayu yang belum secara optimal disediakan dari hutan rakyat.

c. Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan listrik (yaitu 12%-19%) dan usaha mikro dan kecil di perdesaan.
- 2) Masih rendahnya penggunaan LPG per kapita, karena daya beli dan kesadaran masyarakat masih rendah.
- 3) Masih terdapat pengelola usaha pertambangan tanpa ijin (PETI) yang berpotensi merusak lingkungan (pertambangan non mineral).

d. Pariwisata

- 1) Masih rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata di tingkat regional dan nasional. Hal ini ditandai wisatawan sebagian besar wisatawan lokal dan dari kabupaten/kota sekitar.
- 2) Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang kepariwisataan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata.
- 3) Belum berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah. Hal ini ditandai belum adanya pemasaran produk-produk industri di sekitar obyek wisata.
- 4) Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata untuk mendukung pendapatan asli daerah.

e. Kelautan dan Perikanan

- 1) Masih rendahnya pendapatan masyarakat pelaku usaha pertanian.
- 2) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap
- 3) Kondisi overfishing (penangkapan ikan secara berlebihan) pada perairan 4 mil laut.
- 4) Belum optimalnya produktivitas usaha perikanan disebabkan keterbatasan keterampilan, akses modal, akses pemasaran dan sarana prasarana perikanan.
- 5) Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan SDM nelayan.
- 6) Adanya kerusakan ekosistem di wilayah perairan.
- 7) Tingginya abrasi pantai dan interusi air laut.
- 8) Masih rendahnya kemandirian kelembagaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
- 9) Rendahnya konsumsi makan ikan.

f. Perdagangan

- 1) Kurang optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Hal ini ditandai masih adanya peredaran barang-barang yang tidak memenuhi standar, dan produk makanan yang telah kadaluarsa.
- 2) Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya jaringan ekportir.
- 3) Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah.

- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar swalayan/pasar modern.
- 5) Berlakunya C-AFTA 2010 yang mempengaruhi tingkat persaingan produk-produk impor yang murah di pasar lokal mengakibatkan tersisihnya hasil produk lokal.

g. Industri

- 1) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk industri, yang ditandai kurang berkembangnya inovasi sistem produksi.
- 2) Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha, dan terbatasnya akses permodalan dan pemasaran.
- 3) Daya saing produk industri Kecil dan Menengah masih rendah dibandingkan produk sejenis dari luar negeri dan luar daerah. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan teknologi industri dan belum optimalnya standarisasi mutu produk industri.
- 4) Kurang berkembangnya sentra-sentra industri di daerah yang disebabkan kurangnya daya kreativitas SDM dalam inovasi produk industri.

h. Ketransmigrasian

- 1) Belum optimalnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor pendukung urusan transmigrasi.
- 2) Kurang optimalnya penyediaan lokasi penempatan dengan kesiapan daerah penempatan dalam menyiapkan lokasi yang benar-benar memenuhi kriteria clear and clean – layak huni, layak usaha, layak berkembang, layak lingkungan (2C- 4L), dikarenakan penentuan lokasi dan jumlah(kuota) transmigran ditetapkan oleh pusat.
- 3) Tingginya minat masyarakat untuk bertransmigrasi tidak diimbangi dengan kemampuan daerah untuk menempatkan transmigran.

B. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini yang disajikan pada bab terdahulu dan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Pemalang pada lima tahun yang akan datang adalah:

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang.

Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang sebesar 4,94% di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,8%. Masih terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara bagian utara dan bagian selatan Kabupaten Pemalang.

2. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja

Hal ini ditunjukkan dengan angka pengangguran terbuka sebesar 12,26% tahun 2010 dan rendahnya berpendidikan tenaga kerja yang masuk pasar kerja (60% lulus SD/ sederajat) dan keterampilan terbatas. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian (subsisten) sebesar 36,39% dan sektor perdagangan 22,16%.

3. Tingginya jumlah penduduk miskin.

Masih cukup tingginya penduduk miskin, pada tahun 2009 persentase penduduk miskin sebesar 22,17% dan pada tahun 2010 jumlah keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan KS I sebesar 57,11%. Sebagian besar penduduk miskin berda di perdesaan (67%) dan sedangkan sisanya berada di perkotaan (33%)

4. Rendahnya kapasitas fiskal daerah

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pada tahun 2009 sebesar 9,83%, dengan total PAD(2009) sebesar Rp 69,87milyar. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Pemalang relatif rendah. Sumber pendapatan utama adalah berasal dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

5. Belum Optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Usia harapan hidup sebesar 67,46 tahun pada tahun 2010, lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah sebesar 71,25 tahun. Angka Kematian Ibu pada tahun 2010 adalah 193/100.000 kelahiran hidup berada di atas rata-rata Jawa Tengah. dan AKI di Kabupaten Pemalang masih tinggi. termasuk tertinggi di Jawa Tengah dan munculnya penyakit baru serta penyakit lama muncul kembali.

6. Pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan dasar dan menengah belum optimal.

Pada tahun 2010 rata-rata angka lama sekolah sebesar 6,49 tahun, lebih rendah dari angka Jawa tengah yaitu sebesar 7,07 tahun. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SMP/MTs baru mencapai 75% dan untuk jenjang SMA/SMK/MA sebesar 46%.

7. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang amanah (*Good Governance*).

Masih belum optimalnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, kurangnya disiplin PNS dan pelayanan administrasi, persampahan, air bersih dan penanggulangan bencana dirasakan masih lambat dan memakan waktu yang lama.

8. Masih rendahnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Pemalang.

Masih terdapat kesenjangan antara persetujuan dan realisasi penanaman modal baik PMA dan PMDN. Sedangkan untuk investasi non fasilitas relatif kecil. Belum mantapnya iklim berusaha dan peluang kerja bagi kelompok usia produktif.

9. Masih rendahnya daya saing, akses permodalan usaha dan pemasaran hasil produksi UMKM.

Belum optimalnya lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam, UED SP, BKM dan BPR dalam peningkatan permodalan usaha, peningkatan pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perdagangan kecil dan menengah.

10. Banyaknya wilayah rawan bencana alam

Wilayah di Kabupaten Pemalang termasuk wilayah rawan bencana, antara lain tanah longsor di Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga dan Randudongkal; rawan bencana banjir di Kecamatan Comal, Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami; rawan bencana gunung merapi di Kecamatan Pulosari dan Belik; rawan bencana gelombang pasang dan abrasi di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami; dan rawan bencana kekeringan di Kecamatan Belik.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

Visi jangka panjang Kabupaten Pemalang seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

“KABUPATEN PEMALANG YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan daerah tahun 2005 – 2025 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pemalang. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat perkembangan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kedamaian dan kesejahteraan yang ingin hendak dicapai.

Berdasarkan visi jangka panjang tersebut, serta sejalan dengan kondisi Kabupaten Pemalang saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun nasional, maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2011-2016 adalah :

“Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”

Penjelasan Visi:

Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu:

- 1. Pemalang yang Sehat**, dimaksudkan bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Pemalang dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBAL) dan peningkatan usia harapan hidup (UHH).
- 2. Pemalang yang Cerdas**, dimaksudkan bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Pemalang akan menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan APK dan APM baik jenjang pendidikan dasar, maupun menengah.
- 3. Pemalang yang Berdaya Saing**, dimaksudkan bahwa Kabupaten Pemalang mampu meningkatkan investasi melalui peningkatan infrastruktur dan peningkatan investasi yang didukung oleh kondisi Pemalang yang aman dan tertib, serta aparatur yang bersih dan amanah. Selain itu terwujudnya penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender.
- 4. Pemalang Yang Berakhlak Mulia**, dimaksudkan bahwa masyarakat Pemalang yang santun, beragama dan menjunjung tinggi toleransi beragama.

B. Misi

Pencapaian visi “Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia” ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan berbasis kompetensi.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
5. Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di perdesaan.
6. Mengembangkan kehidupan beragama yang aman, damai, harmonis, toleran dan saling menghormati.

C. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka penentuan langkah-langkah yang lebih operasional, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas**, dengan sasaran:
 - a. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk dan kurang.
 - b. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
 - c. Optimalnya penanggulangan penyakit menular terutama DB, HIV/AIDS, Kusta dan TB
 - d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
 - e. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat.
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
2. **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial**; dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
 - b. Bekurangnya persentase penduduk miskin.
 - c. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
 - d. Meningkatnya pelayanan KB dan berkurangnya Drop Out KB dan Unmetneed KB.
 - e. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.
 - f. Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi.
3. **Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata**; dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan.
 - b. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah.
 - c. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
 - d. Meningkatnya keterjaminan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
4. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip good governance**; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah
 - b. Meningkatnya penanganan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan aparaturnya penegak hukum sebagai upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi
5. **Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi daerah**; dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya layanan satu atap (one stop service)
 - b. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi
 - c. Meningkatnya penyediaan sarana pendukung investasi

- d. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusifitas daerah untuk menunjang investasi daerah.
6. **Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;** dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
 - b. Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
 - c. Terkendalinya pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara, air dan tanah.
7. **Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah,** dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM dan industri kecil dan menengah.
 - b. Meningkatnya daya saing produk industri dan UMKM baik didalam negeri maupun luar negeri.
8. **Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah;** dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 - b. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri.
 - c. Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan.
9. **Meningkatkan ketersediaan infrastuktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah;** dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air.
 - c. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sampah, air bersih dan penerangan.
10. **Meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama;** dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya toleransi bermasyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai
 - b. Meningkatnya kerukunan dan kegotongroyongan antar umat beragama.
 - c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

Capaian visi misi Kabupaten Pemalang dapat diukur menggunakan indikator kunci sebagai berikut:

Tabel 5.1
Matrik Indikator Kunci Capaian Visi Misi Kabupaten Pemalang

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Kunci Capaian Visi-Misi |
|--|--|
| 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran : | |
| a. Menurunnya AKI, AKB dan balita gizi buruk dan kurang. | Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH) Angka Kematian Bayi (per 1000 KLH) |
| b. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin | Angka Kematian Balita (per 1000 KLH) Persentase Balita Gizi Buruk (%) |
| c. Menurunnya angka kesakitan menular terutama DB, HIV AIDS, dan TB | Angka Kesakitan (DB, TB, HIV AIDS) |
| d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan | |

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Kunci Capaian Visi-Misi |
|---|--|
| e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | |
| 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial; dengan sasaran : | |
| a. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. | Menurunnya jumlah PMKS |
| b. Bekurangnya persentase penduduk miskin. | Persentase penduduk miskin (%) |
| c. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) |
| d. Meningkatnya pelayanan KB dan berkurangnya Drop Out KB dan Unmetneed KB. | Contraception Prevalence Rate (%) Total Fertility Rate (TFR) Unmetneed KB (%) |
| e. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
| f. Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi. | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) |
| 3. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata; dengan sasaran : | |
| a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan. | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) |
| b. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah. | APM PAUD (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) |
| c. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) |
| d. Meningkatnya keterjaminan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. | Persentase sarana prasarana sesuai standar jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA (%) |
| 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; dengan sasaran : | |
| a. Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah | Status audit keuangan BPK |
| b. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terinformasikannya LPPD dan LKPJ kepada masyarakat melalui media massa. |

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Kunci Capaian Visi-Misi |
|--|--|
| c. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan. | Kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) |
| | Kepemilikan Akta Kelahiran (%) |
| | Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Pemalang (%) |
| 5. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi daerah; dengan sasaran : | |
| a. Meningkatkan layanan satu atap (<i>one stop service</i>). | Jumlah perijinan yang dilayani (jenis) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. |
| b. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. | Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah) |
| c. Meningkatkan penyediaan sarana pendukung investasi. | Nilai investasi skala lokal (non fasilitas) |
| d. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas daerah untuk menunjang investasi daerah. | |
| 6. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; dengan sasaran : | |
| 1. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. | Persentase lahan kritis (%) |
| 2. Meningkatkan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam. | Persentase kawasan lindung terhadap luas wilayah (%) |
| 3. Terkendalinya pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara, air dan tanah. | Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) |
| | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) |
| | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) |
| 7. Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, dengan sasaran : | |
| a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM dan industri kecil dan menengah. | Persentase koperasi aktif (%) |
| | Persentase koperasi sehat (%) |
| b. Meningkatkan daya saing produk industri dan UMKM baik didalam negeri maupun luar negeri. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UKM (%) |
| | Pertumbuhan Industri (%) |
| 8. Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah; dengan sasaran : | |
| a. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. | Produksi pertanian tanaman pangan utama (ton) |
| | Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (ton) |
| | Populasi produksi komoditas perkebunan utama (ton) |
| | Populasi produksi komoditas peternakan utama (ekor) |
| | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) |
| | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) |
| b. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. | Rata-rata pendapatan nelayan (rupiah/bulan) |

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Kunci Capaian Visi-Misi |
|--|--|
| | Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (rupiah/bulan) |
| c. Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Indeks Pola Pangan Harapan |
| 9. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah; dengan sasaran : | |
| a. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%). |
| b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air. | Saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) |
| c. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sampah, air bersih dan penerangan. | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) |
| | Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) |
| | Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) |
| | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) |
| 10. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama; dengan sasaran : | |
| a. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama. | Jumlah kasus SARA |
| b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat | Angka Kriminalitas (kasus) |

D. Pentahapan Pembangunan daerah

Pentahapan pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016) direncanakan sebagai berikut :

1. Tahap Konsolidasi (Tahun 2011)

Pada tahap ini dilakukan persiapan terhadap pencapaian visi Kabupaten Pemalang yang meliputi konsolidasi di antara segenap stakeholder Kabupaten Pemalang.

2. Tahap Pencapaian Pemalang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia (Tahun 2012 – 2014)

Pada tahap ini prioritas pembangunan diarahkan pada upaya pencapaian visi Pemalang sehat, cerdas, berdayasaing dan berakhlak mulia, dengan fokus pada urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan pencapaian misi antara lain kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, Koperasi dan UMKM, industri, perdagangan, pariwisata, kehutanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, energi dan sumberdaya mineral, perumahan, dan perhubungan.

3. Tahap Pemantapan Pemalang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia (2015 – 2016)

Pada tahap ini apa yang telah tercapai pada tahap sebelum dimantapkan, dan tujuan serta sasaran yang belum dicapai diakselerasikan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi untuk mencapai **Tujuan 1 (Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas)** yaitu :

1. Meningkatkan peran Desa dan Kelurahan Siaga dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Mendorong keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan surveillance DBD, dan TB Paru dan penyakit menular lainnya serta Penyakit Tidak Menular (PTM).
3. Mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar (PKD, Puskesmas) dan rujukan yang memadai.
4. Mengoptimalkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 2 (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial)**

1. Mengurangi kemiskinan melalui peningkatan perluasan kesempatan kerja, kelembagaan perekonomian desa/kelurahan dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, pengoptimalan bantuan langsung masyarakat kepada masyarakat desa/kelurahan, pelaksanaan transmigrasi dan pemantapan program pemberdayaan masyarakat dan mengefektifkan pelaksanaan program nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
2. Mewujudkan kesetaraan gender melalui penguatan kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kelembagaan PUG dan perlindungan anak, termasuk korban kekerasan dan pelanggaran responsif gender.
3. Meningkatkan fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas panti asuhan, kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kerjasama dengan swasta dan dunia usaha.
4. Meningkatkan peran dan prestasi pemuda melalui pelatihan kewirausahaan dikalangan pemuda, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan, penyelenggaraan event-event olah raga dan pemberian penghargaan/tali asih kepada atlet berprestasi, peningkatan kapasitas pembina olah raga/pelatih, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
5. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan prasarana dan sarana pelayanan KB, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas PLKB.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 3 (Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan secara merata dan meningkatkan kualitas pendidikan)**, yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan sarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
2. Meningkatkan fasilitasi pendidikan non formal dan pendidikan kecakapan hidup.
3. Meningkatkan fasilitasi bantuan biaya operasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu sampai jenjang pendidikan dasar.
5. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 4 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip good governance)** yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek bagi segenap aparatur pemerintah.

2. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan publik di setiap SKPD, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan agar kinerja pelayanan publik lebih baik.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengembangan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan.
4. Menegakkan hukum terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.
5. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan dengan teknologi informasi (TI) dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 5 (Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi daerah)**, yaitu:

1. Meningkatkan iklim usaha dan pelayanan penanaman modal melalui optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif dan penyederhanaan perijinan penanaman modal.
2. Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan saran dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung investasi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan melibatkan dunia usaha.
4. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui penguatan kelembagaan keamanan lingkungan dalam masyarakat untuk peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat (Pekat), serta
5. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap awal gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan memperkuat kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) di tingkat desa/kelurahan dan kemitraan dengan Kepolisian.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 6 (Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup)**, yaitu:

1. Menurunkan luas lahan kritis melalui pengembangan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat dan pelibatan masyarakat di sekitar hutan dalam pemanfaatan kawasan hutan.
2. Menanggulangi kerusakan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan melalui penguatan kelompok masyarakat bekerjasama dengan pihak terkait.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 7 (Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah)**, yaitu:

1. Meningkatkan akses permodalan UMKM dengan mengoptimalkan potensi lembaga keuangan mikro di perdesaan, meningkatkan pemasaran dan perlindungan UMKM melalui berbagai even promosi dan pemasaran hasil UMKM, fasilitasi perijinan usaha dan peningkatan mutu produk.
2. Mengembangkan kelembagaan dan usaha perkoperasian melalui pengembangan usaha dan kemitraan usaha dengan koperasi/badan usaha dari lain daerah.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 8 (Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah)** yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, mutu hasil pertanian, sumberdaya pertanian, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya dan pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 9 (Meningkatkan ketersediaan infrastuktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah)**, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui peningkatan kinerja jaringan transportasi yang berkelanjutan, pengembangan sistem informasi/data base jalan/jembatan yang integrasi dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan tata ruang.

2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, saluran sungai, reservoir dan sumberdaya air lainnya.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pelayanan sampah, sanitasi dan penambahan jaringan air bersih.
4. Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur di wilayah pedesaan melalui revitalisasi pasar dan sarana prasarana perekonomian lainnya.

Strategi untuk mencapai **Tujuan 10 (Meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama)**, yaitu: meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui dialog, penguatan kelompok dan kerjasama yang saling menghormati antar kelompok keagamaan yang satu dengan yang lainnya.

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 1 (Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas)**, yaitu :

- 1) Pengembangan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga dalam penciptaan masyarakat yang sehat.
- 2) Peningkatan KIE bagi kader kesehatan desa/kelurahan tentang perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit menular serta Penyakit Tidak Menular.
- 3) Penyertaan Jamkesmas, dan Jamkesda serta Jampersal bagi penduduk miskin.
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar (PKD dan Puskesmas) dan pelayanan rujukan (rumah sakit).
- 5) Penambahan jumlah tenaga kesehatan. ahli gizi dan kesehatan lingkungan di Puskesmas.
- 6) Peningkatan pendidikan, pelatihan dan bintek bagi tenaga kesehatan.

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial)**, yaitu:

- 1) Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- 2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan.
- 3) Penguatan kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan perlindungan anak.
- 4) Peningkatan sarana perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 5) Peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kapasitas PLKB serta pengembangan kelembagaan KB di perdesaan.

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 3 (Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan secara merata dan meningkatkan kualitas pendidikan)**, yaitu:

- 1) Peningkatan rehabilitasi sarana pendidikan dan sarana penunjang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Peningkatan fasilitasi pengembangan pendidikan non formal dan keaksaraan fungsional.
- 3) Peningkatan fasilitasi bantuan operasional pendidikan pendidikan dasar dan menengah.
- 4) Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan.
- 5) Peningkatan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, siswa bagi keluarga kurang mampu dan difabel pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 4 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip good governance)** yaitu:

- 1) Peningkatan pendidikan lanjut, pelatihan dan bintek bagi aparatur pemerintah daerah dan aparatur pemerintah desa/kelurahan.
- 2) Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik di setiap SKPD dan pemerintah desa.
- 3) Peningkatan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

- 4) Peningkatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan pemerintah daerah.
- 5) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 6) Peningkatan pelayanan informasi pembangunan daerah dengan teknologi informasi.
- 7) Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, baik pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia usaha dalam peningkatan pelayanan publik.

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 5 (Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi daerah)**, yaitu:

- 1) Peningkatan evaluasi terhadap perda-perda yang menghambat investasi.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
- 3) Peningkatan promosi penanaman modal di tingkat nasional dan regional.
- 4) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi.
- 5) Peningkatan upaya penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungan dan pencegahan terhadap gangguan keamanan.

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 6 (Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup)**, yaitu:

Dirumuskan arah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis terutama pada daerah resapan air dan wilayah rawan bencana.
- 2) Peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,

Strategi untuk mencapai **Tujuan 7 (Meningkatkan fasilitas dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, Industri Kecil dan Menengah)**, yaitu:

- 1) Peningkatan fasilitasi perijinan UMKM, akses permodalan usaha dan pemasaran produk UMKM.
- 2) Pengembangan kelembagaan koperasi dan perluasan usaha koperasi.
- 3) Pengembangan klaster industri dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah.
- 4) Peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda untuk memperluas kesempatan kerja.

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 8 (Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah)** yaitu:

- 1) Peningkatan produksi, mutu dan pemasaran produk/komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.
- 2) Pengembangan usaha peternakan dan peningkatan produk unggulan peternakan.
- 3) Pengembangan perikanan budidaya dan kawasan minapolitan.
- 4) Pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 9 (Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah)**, yaitu:

- 1) Peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten yang berkondisi rusak berat secara merata.
- 2) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan reservoir dan sumberdaya air lainnya.
- 3) Peningkatan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi.
- 4) Peningkatan pemeliharaan pasar tradisional dan sarana perekonomian lainnya.

Arah kebijakan untuk mencapai **Tujuan 10 (Meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama)**, yaitu: Peningkatan dialog, penguatan kelompok dan kerjasama antar penganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kebijakan Umum

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang diupayakan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment* dan keadilan untuk semua (*justice for all*). Selain itu pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang sinergi dengan komitmen nasional yaitu pencapaian target pembangunan millennium (MDGs) untuk semua urusan yang berkaitan dengan target capaian MDGs. Upaya pencapaian target pembangunan daerah juga tidak terlepas dari target yang telah ditetapkan oleh kementerian masing-masing urusan baik melalui Renstra Kementerian dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang, maka kebijakan umum pembangunan daerah selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan titik berat pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial, dengan titik berat pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pelayanan KB, dan penempatan transmigrasi.
3. Perluasan kesempatan dan pelayanan pendidikan secara merata dan berkualitas dengan titik berat pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan terutama pada pendidikan dasar dan menengah.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan titik berat pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan peningkatan kinerja pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Peningkatan investasi dalam rangka pengelolaan potensi daerah dengan titik berat pada peningkatan iklim investasi melalui pelayanan *One Stop Services* dan kebijakan pro investasi, promosi dan kerjasama investasi, serta penciptaan iklim yang kondusif.
6. Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan titik berat pada rehabilitasi lahan kritis, pemulihan cadangan sumberdaya alam, dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Penguatan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, dengan titik berat pada peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta peningkatan daya saing produk industri.
8. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan dengan titik berat peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan usaha agribisnis dan minapolitan, dan peningkatan ketahanan pangan.
9. Peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih dan sanitasi serta sarana persampahan.
10. Peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama dengan sasaran pada peningkatan kerukunan antar umat beragama.

Untuk lebih mempertajam kebijakan umum pembangunan jangka menengah daerah serta dengan mempertimbangkan kondisi daerah, maka dirumuskan kebijakan strategis dan prioritas sebagai berikut :

1. Implementasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD)

Sejalan dengan tuntutan peningkatan pelayanan bidang kesehatan khususnya di rumah sakit, maka diperlukan perbaikan manajemen pengelolaan pelayanan kesehatan dalam bentuk implementasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2012.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang RSUD serta Puskesmas Unggulan

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang RSUD serta Puskesmas unggulan sekaligus pengembangan Puskesmas rawat inap akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2014 dan 2015. Sarana dan prasarana tersebut meliputi peralatan medis yang penting untuk pelayanan dasar kesehatan di puskesmas dan rumas sakit umum daerah.

3. Pemantapan Proporsi Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Umum

Untuk meningkatkan kemampuan dasar masyarakat utamanya lulusan sekolah menengah, maka ditetapkan kebijakan peningkatan proporsi sekolah kejuruan (SMK) dan sekolah umum (SMA) menjadi 60:40. Implementasi peningkatan proporsi tersebut yaitu dengan pembangunan SMK baru pada tahun 2013, 2014 dan 2015, serta penambahan ruang kelas baru pada SMK setiap tahun minimal 3 RKB

4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka proporsi belanja langsung yang merupakan belanja yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung direncanakan semakin meningkat. Oleh karena itu setiap tahun secara bertahap direncanakan akan dilakukan peningkatan proporsi belanja langsung dan penurunan belanja tidak langsung. Target pada tahun 2016 proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah 35:65. Hal tersebut juga diikuti dengan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam setiap program dan kegiatan baik pada belanja langsung maupun pada belanja tidak langsung.

5. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Aparatur dan Kelembagaan

Besarnya belanja tidak langsung pada APBD penyebab utamanya adalah besarnya belanja gaji PNS yang saat ini berjumlah 13.245 orang. Oleh karena itu kebijakan yang akan ditempuh untuk menurunkan belanja pegawai adalah selektif dalam penerimaan pegawai (zero growth). Adapun jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun berkisar 300-400 orang, dengan demikian pada akhir tahun 2016 diperkirakan jumlah PNS di Kabupaten Pemalang akan berkurang sebanyak 1500 orang. Selanjutnya pada perspektif kelembagaan juga diupayakan kebijakan kelembagaan yang efektif dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

6. Pembangunan Pusat Pedagangan Beras Regional

Sebagai upaya pendukung Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu lumbung beras di Provinsi Jawa Tengah, maka akan dilaksanakan kebijakan pengembangan pemasaran beras berupa pembangunan pasar induk beras regional pada tahun 2013.

7. Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sejalan dengan kebijakan nasional upaya swasembada pangan serta mendukung gerakan bali deso mbangun deso di Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang akan melaksanakan pengendalian alig fungsi lahan guna mempertahankan keberadaan dan luasan sawah lestari. Hal ini sekaligus sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi beras, tanpa menghambat dinamika pertumbuhan ekonomi di sektor lain.

8. Manajemen Usaha Kecil Menengah

Dengan semakin berkembangnya berbagai produksi industri rumah tangga, maka akan dirancang kebijakan manajemen UKM untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Kebijakan manajemen UKM tersebut meliputi pasca produksi, data dan informasi pemasaran

9. Insentif Pengembangan Investasi Daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan arus investasi adalah dengan pemberian insentif bagi calon investor. Insentif tersebut antara lain dalam bentuk kemudahan proses perijinan dan penyiapan lahan.

10. Pemantapan Prasarana dan Sarana Dasar Ke PU an (PSD PU)

Kebijakan pemantapan PSD PU dalam bentuk rehabilitasi berupa jalan, jembatan dan sarana perhubungan akan dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013 yang diharapkan dapat mengkaver lebih dari 90% dari jumlah dan panjang sarana dan prasaran tersebut. Sedangkan 2 tahun berikutnya adalah optimalisasi pemeliharaan sarana dasar tersebut.

11. Privatisasi Pengelolaan Kepariwisata

Berbagai potensi obyek wisata yang ada seperti kawasan widuri, pemandian moga dan perhotelannya serta wisata air telaga silating akan dikembangkan dengan konsep kemudahan dan keterjangkauan akses. Kebijakan privatisasi ini untuk memberikan peluang kepada pihak swasta dalam bentuk pengembangan dan pengelolaan obyek pariwisata.

12. Eksplorasi Pos Pengamatan Gunung Slamet

Posisi Kabupaten Pemalang sebagai satu-satunya daerah yang memiliki sarana observasi pengamatan aktivitas Gunung Slamet perlu ditangkap dengan pemanfaatan sarana tersebut yang diintegrasikan dengan wisata dan penelitian. Kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan membangun dan meningkatkan sarana Gardu Pandang Pos Pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari untuk menjadi ikon wisata baru.

13. Pemenuhan Sarana Kebutuhan Dasar Listrik Perdesaan

Sampai dengan tahun 2010 jumlah dusun/dukuh yang belum terlayani jaringan listrik sejumlah 124 dusun yang tersebar di seluruh Kabupaten Pemalang. Kebijakan tersebut berupa percepatan pemenuhan layanan pembangunan listrik di perdesaan minimal sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar 80%.

14. Optimalisasi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Upaya lain yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi adalah dengan validasi data potensi wajib pajak penerangan jalan umum dan upaya pemasangan meter KWH pada LPJU. Kebijakan ini akan ditempuh dengan meningkatkan koordinasi baik di tingkat Regional PLN Provinsi, Area Pelayanan Jaringan (APJ) di Tegal maupun Unit Pelayanan Jaringan di Kabupaten Pemalang yang tersebar di 4 lokasi. Dengan mengetahui potensi secara pasti wajib pajak akan diketahui potensi pajak PJU, sedangkan pemasangan meter KWH pada PJU diharapkan akan dapat diketahui pasti penggunaan energi pada PJU tersebut, tidak dilakukan dengan pembayaran biaya tetap (abonemen).

15. Pengembangan Mina dan Agropolitan

Kabupaten Pemalang memiliki potensi perikanan laut dan darat yang cukup besar. Guna pengembangan potensi tersebut maka perlu dilakukan dikembangkan konsep minapolitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta kemudahan akses informasi pemasaran. Sedangkan potensi pertanian di wilayah selatan yang sudah berkembang dengan konsep agropolitan, perlu dilakukan revitalisasi.

16. Revitalisasi Pertanian

Peningkatan produksi pertanian sebagai salah satu basis perekonomian Kabupaten Pemalang mensyaratkan peningkatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai garda terdepan dalam peningkatan produksi pertanian. Kebijakan konkrit yang akan dilaksanakan adalah dengan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan kantor Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan, upaya pemberian insentif dan disinsentif bagi PPL, penyediaan data dan informasi serta upaya peningkatan akses pasar. Kebijakan ini akan dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2014 berupa alokasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung BPP.

17. Integrasi Kurikulum Budi Pekerti dalam Semua Jenjang Pendidikan

Peningkatan kualitas kemampuan siswa dalam bentuk nilai prestasi belajar dan tingginya angka kelulusan perlu disertai dengan upaya peningkatan kualitas budi pekerti siswa. Kebijakan yang akan dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah dengan regulasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan muatan lokal tentang budi pekerti, pendidikan moral dan nilai-nilai luhur Pancasila.

B. Program Pembangunan Daerah

1) Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Pendidikan Luar Biasa
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2) Kesehatan

- a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- b. Program upaya kesehatan masyarakat
- c. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- d. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program pengembangan lingkungan sehat
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
- h. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- j. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- k. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- l. Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas pembantu dan jaringannya
- m. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit mata

3) Lingkungan Hidup

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- f. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4) Pekerjaan Umum

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan
- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c. Program pembangunan turap/talud/bronjong
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- f. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
- g. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
- h. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- i. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- j. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- k. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- l. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- m. Program pengembangan kinerja, pengelolaan air minum dan air limbah
- n. Program pengendalian banjir
- o. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- p. Program pembangunan infrastruktur pedesaan

5) Penataan Ruang

- a. Program perencanaan tata ruang
- b. Program pengendalian pemanfaatan ruang

6) Perencanaan Pembangunan

- a. Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan
- b. Program Perencanaan pembangunan daerah
- c. Program Perencanaan pembangunan ekonomi
- d. Program Perencanaan pembangunan sosial budaya
- e. Program Kerjasama pembangunan
- f. Program Pengembangan wilayah strategis
- g. Program Pengembangan wilayah perbatasan
- h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- j. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- k. Program Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

7) Perumahan

- a. Program pengembangan perumahan
- b. Program lingkungan sehat perumahan
- c. Program pemberdayaan komunitas perumahan

8) Pemuda dan Olahraga

- a. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- b. Program Peningkatan peran serta kepemudaan
- c. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda,
- d. Program Pencegahan penyalahgunaan narkoba
- e. Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
- f. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- g. Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

9) Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal
- d. Program Peningkatan Potensi Investasi dan Perijinan (KPPT)
- e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi dan Perijinan (KPPT)
- f. Program Pengaduan KPPT

10) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

11) Kependudukan Catatan Sipil

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

12) Ketenagakerjaan

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- b. Program peningkatan kesempatan kerja
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

13) Ketahanan Pangan

- a. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak melalui peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup,
- b. Program penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender dan anak, dengan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
- c. Program fasilitasi peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dalam upaya penengangan korban kekerasan dan perlindungan anak
- d. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- e. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Program keluarga berencana
- b. Program kesehatan reproduksi remaja
- c. Program pelayanan kontrasepsi
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok dan bina keluarga
- j. Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-PADU

16) Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan
- d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

17) Komunikasi dan informasi

- a. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
- c. Program Kerjasama informasi dan media massa
- d. Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika
- e. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

18) Pertanahan

- a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
- b. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- c. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- d. Program pengembangan sistem informasi pertanahan

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program pendidikan politik masyarakat
- b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- c. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- f. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- c. Program peningkatan Pendapatan Daerah, dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kota
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- j. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- k. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- n. Program Pendidikan Kedinasan
- o. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- p. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- q. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

21) Pemberdayaan masyarakat

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
- f. Program peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat

22) Sosial

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba)
- g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

23) Kebudayaan

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program pengelolaan keragaman budaya daerah
- d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

24) Statistik

- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

25) Kearsipan

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

26) Perpustakaan

- a. Program pengembangan budaya baca
- b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
- c. Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

27) Kelautan dan Perikanan

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- c. Program pengembangan budidaya perikanan
- d. Program pengembangan perikanan tangkap
- e. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- f. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

28) Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan petani
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- g. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- i. Program Pengembangan Pertanian Komersial

29) Kehutanan

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- c. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- d. Program pemanfaatan kawasan hutan industri
- e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- f. Program perencanaan dan pengembangan hutan

30) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

31) Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

32) Industri

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah
- d. Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- e. Program Penataan Struktur Industri
- f. Program pengembangan sentra-sentra Industri potensial

33) Perdagangan

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- e. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

34) Ketrasmigrasian

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- b. Program Transmigrasi lokal
- c. Program Transmigrasi regional

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

1. Indikasi Rencana Program Prioritas

Program-program prioritas yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial

a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

- 1) Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- 2) Perawatan secara berkala bagi Ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
- 3) Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.

b. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

- 1) Penyuluhan kesehatan anak balita
- 2) Imunisasi bagi anak balita

c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
- 2) Peningkatan kesehatan masyarakat
- 3) Penyediaan operasional dan pemeliharaan

d. Program perbaikan gizi masyarakat

- 1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- 2) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
- 3) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY) kurang vitamin A dan kekurangan gizi lainnya

e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- 1) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 2) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
- 3) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- 1) Pengembangan wilayah sehat

g. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- 1) Pembangunan puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, poskesdes (unit)
- 2) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu.

h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Peningkatan dan pembinaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
- 2) Peningkatan masyarakat untuk hidup sehat

i. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- 1) Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu.

j. Program Keluarga Berencana

- 1) Penyediaan pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin
- 2) Pembinaan Keluarga Berencana
- 3) Pengadaan sarana prasarana mobilitas tim KB keliling

k. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- 1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

l. Program Pelayanan Kontrasepsi

- 1) Pengadaan alat kontrasepsi
- 2) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
- 3) Pelayanan KB medis operasi

m. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

- 1) Penyuluhan kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
 - n. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**
 - 1) Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - o. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasana rumah sakit/rumah sakit/rumah sakit paru/rumah sakit mata**
 - 1) Pengembangan Tipe Rumah Sakit
 - p. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**
 - 1) Pemberdayaan WRSE
 - 2) Fasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
 - q. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
 - 1) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi
 - 2) Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak cacat, jalanan dan anak terlantar.
 - 3) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB
 - r. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak**
 - 1) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - s. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.**
 - 1) Pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
 - 2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
 - t. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan**
 - 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
 - 2) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - u. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**
 - 1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
 - v. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**
 - 1) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
 - w. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU**
 - 1.) Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
- 2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan berbasis kompetensi**
- a. Program PAUD**
 - 1) Pembangunan gedung sekolah PAUD
 - 2) Penyelenggaraan PAUD (gratis)
 - b. Program Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun**
 - 1) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
 - 2) Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
 - 3) Rehabilitasi sedang/berat sekolah Ruang Kelas SD/MI
 - 4) Penyediaan Beasiswa transisi
 - c. Program Pendidikan Menengah**
 - 1) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (orang)
 - 2) Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
 - 3) Pembangunan ruang kelas sekolah (unit)
 - 4) Pembangunan gedung sekolah (SMK Baru)
 - d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan**
 - 1) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah**
- a. Program Pengendalian pemanfaatan ruang**
 - 1) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 - 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
 - 2) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.
 - 3) Penyelenggaraan pameran investasi.
- c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
 - 1) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi.
 - 2) Pengembangan sistem informasi penanaman modal.
 - 3) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
- d. Program peningkatan potensi investasi dan perijinan**
 - 1) Penyusunan database investasi dan perijinan
- e. Program penataan peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan**
 - 1) Penyusunan materi Raperda tentang ketentuan perijinan gratis bagi investor dan tax holiday untuk 2 tahun pertama.
 - 2) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan
- f. Program pengelolaan kekayaan budaya**
 - 1) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno.
- g. Program Pengelolaan keragaman budaya daerah**
 - 1) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
- h. Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah**
 - 1) Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (untuk kawasan industri)
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - 1) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Intensifikasi dan Ekstensifikan sumber-sumber pendapatan asli daerah (intensifikasi PJU)
- j. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**
 - 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kegiatan kepala daerah (reviu laporan keuangan)
- k. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana BLK
- l. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**
 - 1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
 - 2) Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
- m. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**
 - 1) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
- n. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**
 - 1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- o. Program pengembangan kemitraan pariwisata**
 - 1) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan
 - 2) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
- p. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
 - 3) Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
- q. Program Penataan Administrasi Kependudukan**
 - 1) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
 - 2) Pengembangan data base kependudukan (termasuk catatan sipil)

- 3) Sosialisasi kebijakan kependudukan (termasuk catatan sipil)
 - 4) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil
 - r. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**
 - 1) Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan
 - s. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**
 - 1) Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
 - t. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan**
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
 - 2) Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan masyarakat
 - 3) Pengembangan model Posyandu terpadu
 - 4) Peningkatan peran dan fungsi kemasyarakatan desa dan kelurahan
 - u. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**
 - 1) Pelatihan aparatur desa dalam bidang pemerintahan desa
 - v. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**
 - 1) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
 - w. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**
 - 1) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
 - x. Program penataan peraturan perundang-undangan**
 - 1) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
 - 2) Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah
 - y. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah**
 - 1) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
 - z. Program pembinaan dan pengembangan aparatur**
 - 1) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
 - 2) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
- 4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**
- a. Program peningkatan kesejahteraan petani**
 - 1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
 - 2) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
 - 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani
 - 4) Peningkatan kapasitas pelaku usaha komoditas pertanian/perkebunan
 - 5) Peningkatan kapasitas pelaku usaha komoditas pertanian/perkebunan
 - 6) Pembinaan lingkungan sosial dan akses informasi produksi perkebunan
 - 7) Pelatihan pengendalian OPT tanaman terpadu
 - 8) Peningkatan kualitas nilai ekonomi hasil produksi perkebunan
 - b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**
 - 1) Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
 - 2) Pameran produk-produk unggulan perkebunan
 - c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**
 - 1) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
 - 2) Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
 - 3) Pengawasan kualitas sarana produksi pertanian/perkebunan
 - 4) Studi orientasi dan koordinasi sistem pengelolaan perkebunan
 - 5) Peningkatan kualitas bahan produksi tanaman perkebunan
 - 6) Pengamatan, identifikasi, inventarisasi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan
 - 7) Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian hama, penyakit tanaman, dan organisme pengganggu pertanian dan perkebunan
 - d. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**
 - 1) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.
 - 2) Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat.

- 3) Pengembangan Agribisnis Peternakan.
- e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**
 - 1) Pengembangan desa mandiri pangan
 - 2) Pengembangan lumbung pangan desa
- f. Program Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan**
 - 1) Pengembangan hutan tanaman
 - 2) Pengembangan hutan non Kayu
- g. Program rehabilitasi hutan dan lahan**
 - 1) Pembuatan benih / bibit tanaman kehutanan
 - 2) Pemeliharaan sarana prasarana rehabilitasi hutan dan lahan
 - 3) Pemeliharaan kawasan hutan mangrove
 - 4) Penanganan Kawasan sepadan pantai
 - 5) Penanganan Kanan Kiri Sungai
 - 6) Penanganan Kawasan mata air
 - 7) Fasilitas penyediaan bibit dan pembenihan tanaman
 - 8) Pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan
- h. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**
 - 1) Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan menengah
 - 2) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - 3) Perencanaan koordinasi dan pengembangan UKM
- i. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
 - 2) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
- j. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**
 - 1) Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
 - 2) Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
- k. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**
 - 1) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
 - 2) Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan
 - 3) Pelatihan keterampilan pengolahan makanan
 - 4) Pelatihan dan pembinaan perbengkelan dan elektronika
 - 5) Pelatihan dan pembinaan keterampilan IKM hasil hutan dan perkebunan
 - 6) Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin, dan perkerayaan.
- l. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**
 - 1) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
- m. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan**
 - 1) Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan badan usaha milik desa/usaha desa
- n. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**
 - 1) Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat
 - 2) Pembinaan penggunaan alokasi dana desa
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa
 - 4) Pembinaan partisipasi peran serta masyarakat
- o. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**
 - 1) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (unit)
 - 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan pasar
- p. Program pembinaan pedagang kaki lima dan Asongan**
 - 1) Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
 - 2) Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
- q. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**
 - 1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**
 - 1) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

- s. Program rehabilitasi hutan dan lahan**
 - 1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
 - t. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**
 - 1) Pengembangan percontohan (demplot) kolam air payau, laut dan air tawar (minapolitan)
 - u. Program pengembangan budidaya perikanan**
 - 1) Pembinaan dan pengembangan perikanan
 - 2) Pengembangan bibit ikan unggul
 - 3) Pelatihan budidaya perikanan
 - 4) Pengembangan rehabilitasi sarana prasarana budidaya perikanan
 - v. Program pengembangan perikanan tangkap**
 - 1) Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
 - 2) pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
 - 3) Penyediaan sarana perikanan tangkap
 - w. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (KLH)**
 - 1) Pemantauan kualitas lingkungan
 - 2) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - x. Program Peningkatan Pengendalian Polusi (KLH)**
 - 1) Pengujian polusi limbah padat dan limbah cair
 - 2) Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
- 5. Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di perdesaan**
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
 - 1) Pembangunan jalan (km)
 - b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**
 - 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (km)
 - c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
 - 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (km)
 - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan (buah)
 - d. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**
 - 1) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (rusak berat)
 - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (pemeliharaan untuk rusak ringan)
 - 3) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
 - e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**
 - 1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - f. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**
 - 1) Penyediaan sarana tenaga kelistrikan di luar daerah jangkauan PLN
 - g. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**
 - 1) Pembangunan/ peningkatan infrastruktur
 - h. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan**
 - 1) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
 - i. Program Pengembangan Perumahan**
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
 - 2) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
 - j. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**
 - 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal
 - k. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**
 - 1) Pembangunan Gedung Terminal (terminal angkutan pedesaan) : dilaksanakan tahun 2013.

6. Mengembangkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghormati

a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

- 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- 2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 4) Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan

b. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- 1) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

c. Program Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- 1) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

B. Kebutuhan Pendanaan Indikatif

Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, dibutuhkan alokasi dana program prioritas tersebut diatas. Kebutuhan dana untuk mencapai program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | 2011 | 2012 |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| I | Pendapatan Daerah | 1.139.605.953.000 | 1.177.511.828.074 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 74.784.376.000 | 77.590.250.000 |
| 2 | Dana Perimbangan | 779.721.384.000 | 819.721.384.000 |
| 3 | Lain- Lain Pendapatan yang sah | 285.100.193.000 | 280.200.194.074 |
| | | | |
| II | Belanja Daerah | 1.245.072.032.000 | 1.220.767.217.253 |
| | Belanja Tidak Langsung | 824.760.156.000 | 799.401.342.182 |
| A | Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap belanja daerah (%) | 66,24 | 65,48 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung yang wajib dan Mengikat | 775.347.243.000 | 782.058.322.220 |
| a | Belanja Pegawai | 726.042.143.000 | 733.867.146.910 |
| b | Belanja Bunga | 481.505.000 | 481.505.000 |
| c | Belanja bagi hasil kepada pemdes | 1.628.600.000 | 1.821.400.000 |
| d | Belanja bantuan keuangan kepada pemdes | 47.194.995.000 | 45.888.270.310 |
| 2 | Belanja Tidak Langsung yang tidak wajib dan Mengikat | 49.412.913.000 | 17.343.019.962 |
| a | Belanja Hibah | 17.465.713.000 | 6.040.800.000 |
| b | Belanja Bantuan Sosial | 30.780.714.000 | 10.302.219.962 |
| c | Belanja tidak terduga | 966.486.000 | 1.000.000.000 |
| d | belanja subsidi | 200.000.000 | 0 |
| | Belanja Langsung | 420.311.876.000 | 421.365.875.071 |
| B | Proporsi Belanja Langsung terhadap belanja daerah (%) | 33,76 | 34,52 |
| a | Rencana Alokasi Belanja Langsung Program Prioritas I (Pencapaian Visi Misi Bupati dan penyelesaian isu strategis utama). | 144.533.173.000 | 184.685.000.000 |
| b | Rencana Alokasi Belanja Program Prioritas II (Program seluruh SKPD). | 275.778.703.000 | 236.680.875.071 |
| | Surplus | -105.466.079.000 | -43.255.389.179 |
| | | | |
| III | Pembiayaan | | |
| A | Penerimaan Pembiayaan | 122.094.573.000 | 63.104.761.498 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 69.328.624.000 | 56.104.761.498 |
| 2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 47.265.949.000 | 3.500.000.000 |
| 3 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | 5.500.000.000 | 3.500.000.000 |
| 4 | Pencairan dana cadangan | 0 | 0 |
| B | Pengeluaran Pembiayaan | 16.628.494.000 | 19.849.372.319 |
| 1 | Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat | 488.494.000 | 8.057.372.319 |
| a | Pembentukan dana cadangan | 0 | 4.000.000.000 |
| b | Pembayaran pokok hutang | 488.494.000 | 4.057.372.319 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan yang tidak wajib dan mengikat | 16.140.000.000 | 11.792.000.000 |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| a | Penyertaan modal pemerintah daerah | 10.640.000.000 | 8.292.000.000 |
| b | Pemberian pinjaman daerah | 5.500.000.000 | 3.500.000.000 |
| | | | |
| | Pembiayaan Netto | 105.466.079.000 | 43.255.389.179 |
| | SILPA | 0 | 0 |
| | | 105.466.079.000 | 43.255.389.179 |

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.210.511.828.074 | 1.255.561.824.100 | 1.285.901.240.200 | 1.335.657.959.000 |
| 92.590.250.000 | 101.590.250.000 | 109.930.450.000 | 115.240.570.000 |
| 830.721.384.000 | 861.721.384.000 | 881.720.600.000 | 923.077.289.000 |
| 287.200.194.074 | 292.250.190.100 | 294.250.190.200 | 297.340.100.000 |
| | | | |
| 1.266.379.432.036 | 1.301.740.233.823 | 1.354.164.165.629 | 1.394.608.347.134 |
| 829.933.702.086 | 858.956.097.266 | 906.711.333.288 | 931.080.703.350 |
| 65,54 | 65,99 | 66,96 | 66,76 |
| | | | |
| 812.590.682.124 | 841.613.077.304 | 888.368.313.326 | 913.737.683.388 |
| 763.609.361.601 | 791.970.297.761 | 838.167.327.537 | 862.984.060.291 |
| 481.505.000 | 481.505.000 | 481.505.000 | 481.505.000 |
| 2.152.662.510 | 2.350.650.000 | 2.440.750.000 | 2.520.600.000 |
| 46.347.153.013 | 46.810.624.543 | 47.278.730.789 | 47.751.518.097 |
| | | | |
| 17.343.019.962 | 17.343.019.962 | 18.343.019.962 | 17.343.019.962 |
| 6.040.800.000 | 6.040.800.000 | 7.040.800.000 | 6.040.800.000 |
| 10.302.219.962 | 10.302.219.962 | 10.302.219.962 | 10.302.219.962 |
| 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436.445.729.950 | 442.784.136.557 | 447.452.832.341 | 463.527.643.784 |
| 34,46 | 34,01 | 33,04 | 33,24 |
| | | | |
| 197.294.000.000 | 173.480.000.000 | 156.330.000.000 | 177.576.700.000 |
| 239.151.729.950 | 269.304.136.557 | 291.122.832.341 | 285.950.943.784 |
| -55.867.603.962 | -46.178.409.723 | -68.262.925.429 | -58.950.388.134 |
| | | | |
| | | | |
| 71.724.009.608 | 61.364.815.369 | 80.449.331.075 | 75.136.793.780 |
| 38.542.624.229 | 27.294.137.711 | 17.421.805.647 | 17.708.948.838 |
| 29.181.385.379 | 30.070.677.658 | 42.527.525.428 | 52.927.844.942 |
| 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| 0 | 0 | 16.000.000.000 | 0 |
| 15.856.405.646 | 15.186.405.646 | 12.186.405.646 | 16.186.405.646 |
| | | | |
| 8.561.405.646 | 8.561.405.646 | 5.061.405.646 | 9.061.405.646 |
| 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 |
| 4.561.405.646 | 4.561.405.646 | 5.061.405.646 | 5.061.405.646 |
| | | | |
| 7.295.000.000 | 6.625.000.000 | 7.125.000.000 | 7.125.000.000 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.295.000.000 | 2.625.000.000 | 2.625.000.000 | 2.625.000.000 |
| 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| | | | |
| 55.867.603.962 | 46.178.409.723 | 68.262.925.429 | 58.950.388.134 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.867.603.962 | 46.178.409.723 | 68.262.925.429 | 58.950.388.134 |

4,05

3,71

5,83

2,96

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2011-2016 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja daerah. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Secara rinci target capaian indikator kinerja Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2016

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|---|--|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 1.1. | Pertumbuhan ekonomi | 4,94 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| 1.2. | Laju inflasi | 7,38 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 |
| 1.3. | PDRB per kapita | 2,5 juta | 2,6 juta | 2,7 juta | 2,8 juta | 2,9 juta | 3,0 juta | 3,1 juta |
| 1.4. | Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (%) | 20,99 | 19,88 | 18,83 | 17,83 | 16,89 | 15,99 | 15,14 |
| 1.5. | Angka kriminalitas yang tertangani (kasus) | 207 | 208 | 210 | 215 | 217 | 218 | 220 |
| 1.6. | IPM | 70,3 | 71,4 | 72,1 | 72,8 | 73,1 | 73,8 | 74,1 |
| 1.7. | IPG | 63 | 63,7 | 64,1 | 64,6 | 65 | 65,7 | 66 |
| 1.8. | IDG | 58 | 58,8 | 59 | 59,7 | 60,3 | 60,8 | 61 |
| Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.1. | Angka melek huruf | 87,80 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 99 |
| 1.2. | Angka rata-rata lama sekolah | 6,7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| 1.3. | Angka partisipasi kasar (%) | | | | | | | |
| | • SD/MI/Paket A | 120,77 | 120,8 | 120,6 | 118,8 | 115,5 | 111,7 | 110 |
| | • SMP/MTs/Paket B | 96,02 | 96,16 | 97,61 | 98,41 | 99,20 | 99,78 | 100 |
| | • SMA/SMK/MA/ Paket C | 55,22 | 59,16 | 63,12 | 67,08 | 71,04 | 73,91 | 75 |
| 1.4. | Angka pendidikan yang ditamatkan/ tingkat pendidikan | | | | | | | |
| | • Tamat SD dan SLTP | 39,74 | 40,04 | 40,34 | 40,64 | 40,94 | 41,24 | 41,54 |
| | • Tamat SLTA keatas | 8,19 | 8,49 | 8,79 | 9,09 | 9,39 | 9,69 | 9,99 |
| 1.5. | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1.5.1. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 |
| 1.5.2. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 75,28 | 76,20 | 77,12 | 78,11 | 79,06 | 79,78 | 80 |
| 1.5.3. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | 45,70 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 5,3 | 55 |
| 2. | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1. | Angka kelangsungan hidup bayi | | | | | | | |
| 2.2. | Angka usia harapan hidup | 67, 50 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 69,80 | 70,00 |
| 2.3. | Persentase balita gizi buruk | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 4.1. | Rasio penduduk yang bekerja (%) | 92 | 92,2 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 93 | 93,2 |
| Fokus Seni Budaya dan Olahraga | | | | | | | | |
| 1. | Kebudayaan | | | | | | | |
| 1.1. | Jumlah grup kesenian | 614 | 614 | 618 | 620 | 622 | 624 | 624 |
| 1.2. | Jumlah gedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Pemuda dan Olahraga | | | | | | | |
| 2.1. | Jumlah klub olahraga | 24 | 25,2 | 26,4 | 27,6 | 28,8 | 29,0 | 30 |
| 2.2. | Jumlah gedung olahraga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| Fokus Layanan Urusan Wajib | | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.1. | Pendidikan dasar: | | | | | | | |
| 1.1.1. | Angka partisipasi sekolah: | | | | | | | |
| | ▪ APM SD/MI/Paket A (%) | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 |
| | ▪ SMP/MTs/Paket B (%) | 75,28 | 76,20 | 77,12 | 78,11 | 79,06 | 79,78 | 80 |
| 1.1.2. | Rasio guru/murid | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:26 |
| 1.2. | Pendidikan menengah: | | | | | | | |
| 1.2.1. | Angka partisipasi sekolah (APM SMA/SMK/MA/Paket C) (%) | 45,70 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 5,3 | 55 |
| 1.2.2. | Rasio guru terhadap murid | 1:17 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| 1.2.3. | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (angka melek huruf (%)) | 88,22 | 88,69 | 89,16 | 89,63 | 90,1 | 90,57 | 91,04 |
| 1.3. | Fasilitas Pendidikan: | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|-------------|--|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1.3.1. | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 1.4. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): | | | | | | | |
| 1.4.1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 33,0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 1.5. | Angka Putus Sekolah: | | | | | | | |
| 1.5.1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,02 |
| 1.5.2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) | 0,78 | 0,68 | 0,58 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,22 |
| 1.5.3. | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,3 |
| 1.6. | Angka Kelulusan: | | | | | | | |
| 1.6.1. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) | 90,4 | 91,4 | 92,4 | 93,5 | 95 | 97 | 99 |
| 1.6.2. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) | 99,64 | 99,7 | 99,76 | 99,84 | 99 | 99,5 | 100 |
| 1.6.3. | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) | 99,04 | 99,2 | 99,4 | 99,55 | 99,7 | 99,85 | 100 |
| 1.6.4. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) | 94,41 | 95 | 95,5 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 1.6.5. | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) | 64,33 | 69,3 | 74,3 | 79,3 | 84,3 | 87,5 | 90 |
| 1.6.6. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) | 54,19 | 55,19 | 65,20 | 70,45 | 75,30 | 76,57 | 80 |
| 1.7. | Pendidikan Non Formal | | | | | | | |
| 1.7.1. | Dukungan terhadap capaian APK Dikdas (%) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| 1.7.2. | Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A (%) | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 |
| 1.7.3. | Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B (%) | 95 | 95,83 | 96,66 | 97,49 | 98,32 | 99,15 | 100 |
| 2. | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1. | Rasio posyandu per satuan balita | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2. | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | 1 |
| 2.3. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|-------|---|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 2.4. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | 91,62 | 93,3 | 94,9 | 96,6 | 98,3 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5. | Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) | 87 | 89,2 | 91,4 | 93,6 | 95,8 | 98 | 100,0 |
| 2.6. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) | 57,87 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 2.8. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.9. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10. | Cakupan kunjungan bayi (%) | 90 | 91,7 | 93,4 | 95,1 | 96,8 | 98,5 | 100 |
| 2.11. | Cakupan puskesmas (%) | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 2.12. | Cakupan pembantu puskesmas (%) | 0,3 | 0,8 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
| 2.13. | AKI per 100.000 KLH | 193 | 182 | 167 | 152 | 137 | 122 | 108 |
| 2.14. | AKB per 1.000 KLH | 12 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 9 | 8,5 |
| 2.15. | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%) | 80,46 | 83,06 | 85,66 | 88,26 | 90,86 | 93,46 | 96 |
| 2.16. | Cakupan pertolongan tenaga kesehatan (%) | 91,98 | 93,28 | 94,58 | 95,88 | 97,18 | 98,48 | 100 |
| 2.17. | Cakupan Pelayanan Nifas (%) | 87,4 | 89,5 | 91,6 | 93,7 | 95,8 | 97,9 | 100 |
| 2.18. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin (%) | 75 | 79,2 | 83,4 | 87,6 | 91,8 | 96 | 100 |
| 2.19. | Cakupan Desa Siaga Aktif (%) | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
| 2.20. | Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) | 65 | 70,8 | 76,6 | 82,4 | 88,2 | 94 | 100 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|-----------|--|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 2.21. | Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di Puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Pemalang (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.22. | Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.23. | Angka CDR - TB (%) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 2.24. | Angka kesembuhan TB Paru (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.25. | Angka penemuan Diare yang tertangani (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.26. | Cakupan penemuan HIV/AIDS tertangani (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.27. | CFR DBD (per 10.000 penduduk) | 4,4 | 3,1 | 3 | 2,5 | 2 | 1,7 | < 2 |
| 2.28. | Angka kesembuhan DBD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.29. | Sertifikasi Rumah Sakit (%) | Tipe C | Tipe C | Tipe C | Tipe B | Tipe B | Tipe B | Tipe B |
| 3. | Pekerjaan Umum | | | | | | | |
| 3.1. | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) | 38,71 | 40 | 65 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 3.2. | Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) | 63,77 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 80 |
| 3.3. | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) | 36 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 3.4. | Panjang jalan dilalui Roda 4 | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 | 651,97 |
| 3.5. | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) | 38,71 | 40 | 65 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 3.6. | Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%) | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 3.7. | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| 3.8. | Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%) | 45 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|-----------|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 3.9. | Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 |
| 3.10. | Lingkungan Pemukiman kumuh (%) | 9,19 | 8,31 | 7,43 | 6,55 | 5,67 | 4,76 | 3,88 |
| 4. | Perumahan | | | | | | | |
| 4.1. | Rumah tangga pengguna air bersih | 8,32 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 4.2. | Rumah tangga pengguna listrik | 64,49 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 4.3. | Rumah tangga ber-Sanitasi | 63,77 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 4.4. | Lingkungan pemukiman kumuh | 9,19 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4.5. | Rumah layak huni | 84,0 | 86 | 88 | 90 | 94 | 96 | 100 |
| 5. | Tata Ruang | | | | | | | |
| 5.1. | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 5.2. | Luas RTH Perkotaan | 4,82 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 5.3. | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) | 1,90 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 6. | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | |
| 6.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6.4. | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | 97,15 | 97,15 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| 7. | Perhubungan | | | | | | | |
| 7.1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7.2. | Rasio ijin trayek | 105 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7.3. | Jumlah uji kir angkutan umum | | 5.525 | 5.663 | 5.807 | 5.949 | 6.098 | 6.098 |
| 7.4. | Jumlah Terminal Bis Tipe A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.5. | Jumlah Terminal Tipe C (unit) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7.6. | Jumlah Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang (%) | 7,12 | 7,15 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|------------|--|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 8. | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 8.1. | Persentase penanganan sampah (%) | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 8.2. | Persentase Penduduk berakses air minum | 71,93 | 74 | 78 | 81 | 85 | 89 | 94 |
| 8.3. | Persentase Luas permukiman yang tertata | 72,12 | 73,43 | 74,74 | 76,05 | 77,36 | 78,67 | 80 |
| 8.4. | Pencemaran status mutu air | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 8.5. | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.6. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.7. | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| 8.8. | Penegakan hukum lingkungan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.9. | Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.10. | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.11. | Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.12. | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Pertanahan | | | | | | | |
| 9.1. | Persentase luas lahan bersertifikat (%) | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 |
| 9.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara (%) | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9.3. | Penyelesaian izin lokasi (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | |
| 10.1. | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) | 84,8 | 86,8 | 88,0 | 90,9 | 93,9 | 95,0 | 97,0 |
| 10.2. | Rasio bayi berakte kelahiran (%) | 84,5 | 86,4 | 88,7 | 90,8 | 92,5 | 94,0 | 95,0 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|------------|---|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 10.3. | Persentase Kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) | 84,80 | 86,84 | 88,88 | 90,92 | 92,96 | 95 | 100 |
| 10.4. | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%) | 59,81 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| 10.5. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | sudah | sudah | sudah | sudah | sudah | sudah | Sudah |
| 10.6. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | sudah | sudah | sudah | sudah | sudah | sudah | Sudah |
| 10.7. | Jumlah Tempat Perekam-an Data Kependu- dukan Kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10.8. | Persentase Kepemilik- an KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Pemalang (%) | 80 | 82,50 | 85,50 | 88,50 | 92,50 | 95,50 | 97,00 |
| 11. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 11.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 2,65 | 2,68 | 2,7 | 2,9 | 3,01 | 3,04 | 3,07 |
| 11.2. | Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11.3. | Rasio KDRT | 0,02 | (0,018) | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,010 |
| 11.4. | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) | 2,55 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 11.5. | Penyelesaian penga- duan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.6. | Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit) | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 |
| 11.7. | Jumlah pusat pelayan- an terpadu pember- dayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 |
| 11.8. | Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%) | 83,8 | 84,6 | 85,4 | 86,3 | 87,1 | 87,9 | 88,7 |
| 12. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | |
| 12.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang) | 2,81 | 2,74 | 2,67 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,39 |
| 12.2. | Cakupan peserta KB aktif (%) | 81,37 | 81,39 | 81,41 | 81,43 | 81,45 | 81,47 | 81,49 |
| 12.3. | Unmetneed | 14,2 | 14,09 | 12,95 | 11,72 | 10,61 | 9,51 | 9 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|------------|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 12.4. | Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%) | 50,59 | 55,09 | 60,59 | 65,08 | 70,59 | 75,09 | 80,59 |
| 12.5. | Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 12.6. | Persentase keluarga Pra Sejahtera/Sejahtera I (%) | 56,53 | 56,47 | 56,41 | 56,35 | 56,29 | 56,23 | 56,17 |
| 12.7. | Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%) | 2,55 | 2,54 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,5 | 2,5 |
| 13. | Sosial | | | | | | | |
| 13.1. | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 13.2. | PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 |
| 13.3. | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 |
| 14. | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 14.1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) | 0,1 | 0,1 | 0,97 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,82 |
| 14.2. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 53,93 | 55,0 | 56,27 | 58 | 60 | 61 | 62 |
| 14.3. | Pencari kerja yang ditempatkan (%) | 90,1 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 14.4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
| 14.5. | Keselamatan dan perlindungan (%) | 52,25 | 53 | 54,86 | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
| 14.6. | Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 85 |
| 14.7. | Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%) | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100 |
| 14.8. | Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%) | 30,36 | 35,3 | 40,24 | 45,18 | 50,12 | 55,06 | 60 |
| 14.9. | Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|------------|---|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 14.10. | Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) (%) | 39,0 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| 14.11. | Rasio UMK terhadap KHL (%) | 84,25 | 86,25 | 90,35 | 95,00 | 98,50 | 100 | 100 |
| 14.12. | Jumlah bursa tenaga kerja | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 15. | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| 15.1. | Persentase koperasi aktif (%) | 63,35 | 64,46 | 65,57 | 66,68 | 67,79 | 68,9 | 70,00 |
| 15.2. | Persentase koperasi sehat ▪ Kategori Sehat (%) ▪ Kategori Cukup Sehat (%) | 10,5 85,0 | 11 87 | 12 86 | 13 85 | 14 84 | 14,5 83,5 | 15 83 |
| 15.3. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UKM (%) | 2,4 | 2,7 | 3,00 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| 16. | Penanaman Modal | | | | | | | |
| 16.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah) | 120.641.0 24.027 | 125.641. 024.027 | 130.641. 024.027 | 135.641. 024.027 | 140.641.0 24.027 | 145.641.0 24.027 | 150.641.0 24.027 |
| 16.3. | Rasio daya serap tenaga kerja (orang) | 2.242 | 3.242 | 4.242 | 5.242 | 6.242 | 7.242 | 8.242 |
| 16.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%) | 3,89 | 4,14 | 3,98 | 3,83 | 3,69 | 3,56 | 3,43 |
| 17. | Kebudayaan | | | | | | | |
| 17.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17.2. | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17.3. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | 14,29 | 14,29 | 28 | 43 | 57 | 57 | 57 |
| 17.4. | Jumlah Grup Kesenian (kelompok) | 324 | 328 | 330 | 332 | 336 | 338 | 338 |
| 17.5. | Jumlah gedung kesenian (unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | |
| 18.1. | Jumlah organisasi pemuda (unit) | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 265 |
| 18.2. | Jumlah organisasi olahraga (klub) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|------------|--|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 18.3. | Jumlah kegiatan kepe- mudaan (kegiatan) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 18.4. | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18.5. | Lapangan olahraga | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 19. | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | | |
| 19.1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 20.1. | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 13.000 penduduk | 60 personil | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 personil |
| 20.2. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 7,79 | 7,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| 20.3. | Pertumbuhan ekonomi | 4,94 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| 20.4. | Kemiskinan | 20,99 | 19,88 | 18,83 | 17,83 | 16,89 | 15,99 | 15,14 |
| 20.5. | Penegakan PERDA | 45 | 42 | 39 | 36 | 30 | 27 | 23 |
| 20.6. | Cakupan patroli petugas Satpol PP | 10 | 10 | 14 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 20.7. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ke- tertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| 20.8. | Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten | 0,77 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 20.9. | Sistim Informasi Manajemen Pemda | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 20.10. | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 21. | Ketahanan Pangan | | | | | | | |
| 21.1. | Regulasi ketahanan pangan | belum ada | ada | ada | ada | ada | ada | Ada |
| 21.2. | Ketersediaan energi dan protein per Kapita a. energi (%) b. protein (%) | 108,62 97,53 | 110,79 98,02 | 113,01 98,51 | 115,27 99,01 | 117,57 99,50 | 119,92 99,99 | 122,32 100,48 |
| 21.3. | Penguatan cadangan pangan (%) | 18 | 27 | 35 | 44 | 52 | 60 | 69 |
| 21.4. | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|------------|--|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 21.5. | Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 21.6. | Skor pola pangan harapan (PPH) | 82,6 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 21.7. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 25 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 |
| 21.8. | Penanganan daerah rawan pangan (%) | 3 | 14 | 25 | 36 | 47 | 60 | 71 |
| 21.9. | Konsumsi energi (k.kal/hr) | 1767,80 | 1853,90 | 1940,00 | 2026,10 | 2112,20 | 2200,00 | 2286,10 |
| 21.10. | Konsumsi protein (gr/hr) | 846,30 | 850,45 | 854,61 | 858,80 | 863,01 | 867,24 | 871,49 |
| 22. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | |
| 22.1. | Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit) | 170 | 170 | 185 | 195 | 200 | 210 | 222 |
| 22.2. | Persentase PKK aktif (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 22.3. | Jumlah LSM aktif (unit) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 22.4. | PKK aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22.5. | Persentase Posyandu Aktif (%) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 22.6. | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
| 22.7. | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 22.8. | Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 23. | Statistik | | | | | | | |
| 23.1. | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 23.2. | Buku "PDRB kabupaten" | Ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 24. | Kearsipan | | | | | | | |
| 24.1. | Pengelolaan arsip secara baku (SKPD) | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Seluruh SKPD |
| 24.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 25.1. | Jumlah jaringan komunikasi | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 25.2. | Rasio wartel/warnet terhadap penduduk | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 25.3. | Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 25.4. | Jumlah penyiaran radio/TV lokal (10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 25.5. | Web site milik pemerintah daerah | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 25.6. | Pameran/expo | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 26. | Perpustakaan | | | | | | | |
| 26.1. | Jumlah perpustakaan | 482 | 500 | 520 | 570 | 590 | 610 | 625 |
| 26.2. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 26.3. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 60,2 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| Fokus Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | | |
| 1. | Pertanian | | | | | | | |
| 1.1. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 55,61 | 55,84 | 56,07 | 56,3 | 56,53 | 56,76 | 57,00 |
| 1.2. | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 25,42 | 25,51 | 25,6 | 25,69 | 25,78 | 25,87 | 26,00 |
| 1.3. | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | 17,56 | 18,29 | 19,02 | 19,75 | 20,48 | 21,21 | 18,00 |
| 1.4. | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 3,93 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 4,00 |
| 1.5. | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | | 5,0 | 5,40 | 5,80 | 6,20 | 6,60 | 7,00 |
| 1.6. | Cakupan bina kelompok petani | | | | | | | |
| | ▪ Kelompok Tani tanaman pangan (orang) | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| | ▪ Kelompok Tani Peternakan | 164,00 | 172,00 | 180,00 | 188,00 | 196,00 | 204,00 | 212,00 |
| 1.7. | Produksi pertanian tanaman pangan utama | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|-----------|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | - Padi Sawah | 487.733 | 512.120 | 537.725 | 564.610 | 592.840 | 622.480 | 622.480 |
| | - Jagung | 56.060,00 | 57.740 | 59.470 | 61.250 | 63.100 | 64.990 | 64.990 |
| 1.8. | Produksi pertanian tanaman hortikultura utama | | | | | | | |
| | - Kobis | 304 | 325 | 348 | 372 | 398 | 426 | 456 |
| | - Kacang Panjang | 140 | 150 | 160 | 172 | 184 | 196 | 210 |
| | - Kentang | 304 | 325 | 348 | 372 | 398 | 426 | 456 |
| | - Buncis | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| | - Timun | 240 | 257 | 275 | 294 | 315 | 337 | 360 |
| | - Terong | 199 | 213 | 228 | 244 | 261 | 279 | 299 |
| | - Bawang merah | 497 | 532 | 569 | 609 | 651 | 697 | 746 |
| | - Cabe besar | 352 | 377 | 403 | 431 | 461 | 494 | 528 |
| | - Nanas | 938.898 | 1.032.788 | 1.136.067 | 1.249.673 | 1.374.641 | 1.512.105 | 1.663.315 |
| | - Mangga | 94.998 | 104.498 | 114.948 | 126.442 | 139.087 | 152.995 | 168.295 |
| | - Rambutan | 4.320 | 4.752 | 5.227 | 5.750 | 6.325 | 6.957 | 7.653 |
| | - Durian | 8.781 | 9.659 | 10.625 | 11.688 | 12.856 | 14.142 | 15.556 |
| | - Pepaya | 10.521 | 11.573 | 12.730 | 14.003 | 15.404 | 16.944 | 18.639 |
| 1.9. | Populasi produksi komoditas perkebunan utama | | | | | | | |
| | - Cengkeh | 1.202,49 | 1.204,89 | 1.207,30 | 1.209,72 | 1.212,56 | 1.214,56 | 1.216,99 |
| | - Tebu | 14.694,72 | 14.767,74 | 14.841,58 | 14.915,79 | 14.990,37 | 15.065,32 | 15.140,65 |
| | - Teh | 927,53 | 929,39 | 931,24 | 933,11 | 934,97 | 936,84 | 938,72 |
| | - Kopi Arabika | 67,74 | 67,88 | 68,01 | 68,15 | 68,28 | 68,42 | 68,56 |
| | - Kopi Robusta | 282,43 | 282,99 | 283,56 | 284,13 | 284,70 | 285,27 | 285,84 |
| | - Nilam | 6.304,33 | 6.316,94 | 6.329,57 | 6.342,23 | 6.354,92 | 6.367,63 | 6.380,36 |
| | - Tembakau rakyat | 1.617,99 | 1.621,23 | 1.624,47 | 1.627,72 | 1.630,97 | 1.634,23 | 1.637,50 |
| | - Kapas | 16,26 | 16,29 | 16,33 | 16,36 | 16,39 | 16,42 | 16,42 |
| | - Kelapa Dalam | 4.500,74 | 4.509,74 | 4.518,76 | 4.527,80 | 4.536,85 | 4.545,93 | 4.555,02 |
| 1.10. | Populasi produksi komoditas peternakan utama | | | | | | | |
| | - Sapi potong | 9.268 | 9.277 | 9.287 | 9.296 | 9.305 | 9.314 | 9.324 |
| | - Kerbau | 6.744 | 6.746 | 6.748 | 6.750 | 6.752 | 6.754 | 6.756 |
| | - Kambing | 137.142 | 137.238 | 137.334 | 137.430 | 137.526 | 137.623 | 137.719 |
| | - Domba | 33.654 | 33.674 | 33.694 | 33.715 | 33.735 | 33.755 | 33.775 |
| 1.11. | Meningkatnya produksi daging (kg) | | | | | | | |
| | - Sapi potong | 621.660 | 646.526 | 672.387 | 699.283 | 727.254 | 756.344 | 786.598 |
| | - Kerbau | 393.920 | 409.677 | 426.064 | 443.106 | 460.831 | 479.264 | 498.434 |
| | - Kambing | 397.365 | 413.260 | 429.790 | 446.982 | 464.861 | 483.455 | 502.793 |
| | - Domba | 178.875 | 186.030 | 193.471 | 201.210 | 209.258 | 217.629 | 226.334 |
| 1.12. | Angka Kesakitan Ternak (Morbiditas) | | | | | | | |
| | - ternak besar (%) | 2,96 | 2,92 | 2,88 | 2,84 | 2,80 | 2,75 | 2,71 |
| | - ternak kecil (%) | 4,83 | 4,66 | 4,49 | 4,32 | 4,15 | 4 | 3,83 |
| | - ternak unggas (%) | 14,17 | 13,34 | 12,51 | 11,68 | 10,85 | 10 | 9,17 |
| 2. | Kehutanan | | | | | | | |
| 2.1. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) | 25,92 | 38,26 | 50,6 | 62,94 | 75,28 | 87,62 | 100 |
| 2.2. | Kerusakan Kawasan Hutan (%) | 1,81 | 1,51 | 1,21 | 0,91 | 0,61 | 0,31 | 0 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|-----------|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 2.3. | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.4. | Luas hutan rakyat (ha) | 18.829,25 | 18.829,25 | 18.829,25 | 18.829,25 | 18.829,25 | 18.829,25 | 18.829,25 |
| 3. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | |
| 3.1. | Pertambangan tanpa ijin | 0,62 | 3,6 | 3,59 | 3,57 | 3,43 | 3,28 | 3,28 |
| 3.2. | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | 1,13 | 2,01 | 2,03 | 2,12 | 2,33 | 2,37 | 2,37 |
| 4. | Pariwisata | | | | | | | |
| 4.1. | Kunjungan wisata | 564.835 | 590.000 | 605.000 | 612.500 | 625.000 | 650.000 | 700.000 |
| 4.2. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| 5. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | |
| 5.1. | Produksi perikanan | | | | | | | |
| | a. Perikanan Tangkap | 13.828.869 | 14.105.446 | 14.387.555 | 14.675.306 | 14.968.813 | 15.268.189 | 15.573.552 |
| | b. Perikanan Budidaya | 3.146.700 | 4.027.776 | 5.195.831 | 6.702.622 | 8.646.382 | 10.635.050 | 13.081.112 |
| 5.2. | Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) | 12,34 | 12,78 | 13,22 | 13,66 | 14,1 | 14,54 | 15 |
| 5.3. | Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 5.4. | Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok) | 38 | 49 | 60 | 71 | 82 | 93 | 104 |
| 5.5. | Rata-rata pendapatan nelayan (rupiah/bulan) | 420.833 | 456.000 | 492.000 | 528.000 | 564.000 | 600.000 | 635.000 |
| 5.6. | Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (rupiah/bulan) | 174.599 | 203.000 | 232.000 | 261.000 | 290.000 | 320.000 | 349.000 |
| 5.7. | Jumlah usaha pengolahan ikan (unit) | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 |
| 5.8. | Luas Kawasan Mangrove (ha) | 120,39 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| 5.9. | Luas Abrasi yang tertangani (ha) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 6. | Perdagangan | | | | | | | |
| 6.1. | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 28,42 | 28,66 | 28,9 | 29,14 | 29,38 | 29,62 | 29,86 |
| 6.2. | Nilai Ekspor perdagangan (ribu US\$) | 17.500 | 17.850 | 18.200 | 18.550 | 18.900 | 19.250 | 19.600 |
| 6.3. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal (%) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 7. | Perindustrian | | | | | | | |
| 7.1. | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 22,59 | 22,83 | 23,07 | 23,31 | 23,55 | 23,79 | 24,00 |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|---|--|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 7.2. | Pertumbuhan Industri (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.3. | Cakupan bina kelompok pengrajin (%) | 11,63 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8. | Ketransmigrasian | | | | | | | |
| 8.1. | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 8.2. | Jumlah calon transmigran (KK) | 132 | 137 | 142 | 147 | 155 | 160 | 165 |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | |
| Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur | | | | | | | | |
| 1. | Perhubungan | | | | | | | |
| 1.1. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (000) | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.3. | Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun (000) | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2. | Penataan Ruang | | | | | | | |
| 2.1. | Ketaatan terhadap RTRW (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.2. | Luas wilayah produktif (Ha) | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 2.3. | Luas wilayah industri (Ha) | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 2.4. | Luas wilayah banjir (Ha) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5. | Luas wilayah kekeringan (Ha) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.6. | Luas wilayah perkotaan (Ha) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 3.1. | Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 4. | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 4.1. | Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih | 74,42 | 75,42 | 76,42 | 77,42 | 78,42 | 79,42 | 80,42 |
| 5. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 5.1. | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik | 64,49 | 65,41 | 66,33 | 67,25 | 68,17 | 69,09 | 70,00 |
| Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2010) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 1.1. | Angka kriminalitas | 245 | 220 | 205 | 185 | 165 | 145 | 125 |
| 1.2. | Jumlah demonstrasi | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 1.3. | Lama proses perijinan (hari) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 1.4. | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.5. | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Fokus Sumber Daya Manusia | | | | | | | | |
| 1. | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 1.1. | Rasio lulusan S1/S2/S3 | 1,46 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | 1,86 | 1,96 | 2,96 |
| 1.2. | Rasio ketergantungan | 44,0 | 43,9 | 43,8 | 43,7 | 43,6 | 43,5 | 43,4 |

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

A. Pedoman Transisi

Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih memiliki masa Jabatan selama 5 (lima) tahun yang akan diemban sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 23 Januari 2016. Dengan demikian *time frame* RPJMD dimaksud sama dengan masa jabatan pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 ini setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk dokumen RKPD, meliputi RKPD 2012, RKPD 2013, RKPD 2014, RKPD 2015 dan RKPD 2016. Dokumen RKPD 2016 yang memiliki *timeframe* 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh dua pasangan Bupati-Wakil Bupati yaitu pasangan Bupati-Wakil Bupati 2011-2016, yang akan melaksanakan sisa tanggungjawabnya selama 23 hari atau sampai dengan 23 Januari 2016, dan pasangan Bupati-Wakil Bupati 2016-2021 yang akan melanjutkan pembangunan Kabupaten Pemalang di tahun 2016 sejak tanggal 24 Januari 2016.

B. Kaidah Pelaksanaan

RPJM-D ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan tata kala yang sama yaitu 2011-2016. Disamping itu RPJM-D ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun anggaran. Penyusunan RPJM-D ini melalui tahap konsultasi publik yaitu melalui forum musrenbang, dengan harapan program-program yang ada di dalam RPJM-D ini sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RPJM-D ini nantinya juga akan menjadi dasar bagi Bupati-Wakil Bupati dalam menyusun LKPJ dan LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Bupati-Wakil Bupati dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan penilaian. RPJM-D ini merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap stakeholder di Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016.

Mengingat dokumen RPJMD ini memiliki tata kala selama 5 tahun, ditengah waktu pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid term evaluation*) untuk mengetahui sejauhman terjadi ketidaksesuaian atau distorsi. Jika hal semacam ini terjadi maka perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dokumen RPJMD yang ada.

Penyusunan dan perumusan program dan indikator kinerja dalam RPJM-D ini mengacu sejumlah program yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJM-Nasional Indonesia 2009-2014, RPJM-D Provinsi Jawa Tengah 2008-2013, dan RPJP-D Kabupaten Pemalang 2005-2025 (Perda Nomor 28 Tahun 2008) serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dalam hal ini yang dimaksud adalah RTRW Kabupaten Pemalang, Masterplan Pendidikan, Masterplan Kesehatan, dan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kabupaten Pemalang.

Idealnya dalam menyusun dokumen RPJM-D ini dapat memuat seluruh program-program atau rencana kerja seluruh tugas Bupati - Wakil Bupati meliputi tugas-tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas pemerintahan umum. Namun demikian dalam menjalankan peran sebagai wakil

pemerintah pusat yaitu dalam menjalankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan program tidak bisa direncanakan oleh daerah sejak awal, namun program tersebut lebih banyak merupakan program yang telah disusun oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten tinggal melaksanakannya. Dengan demikian tidak dapat direncanakan sejak awal.

BUPATI PEMALANG

H. JUNAEDI

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--|--------------|
| BAB I | PENDAHULUAN | I-1 |
| | A. Latar Belakang | I-1 |
| | B. Landasan Hukum | I-2 |
| | C. Hubungan RPJMD Kabupaten Pemalang Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-4 |
| | D. Maksud dan Tujuan | I-5 |
| | E. Sistematika | I-5 |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-1 |
| | A. Aspek Geografi dan Demografi..... | II-1 |
| | 1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah | II-1 |
| | 2. Potensi Pengembangan Wilayah | II-2 |
| | 3. Wilayah Rawan Bencana | II-5 |
| | 4. Kondisi Demografi | II-6 |
| | B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-7 |
| | 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | II-7 |
| | 2. Fokus Kesejahteraan Sosial | II-12 |
| | C. Aspek Pelayanan Umum | II-13 |
| | 1. Pelayanan Urusan Wajib | II-13 |
| | 2. Pelayanan Urusan Pilihan | II-62 |
| | D. Aspek Daya Saing Daerah..... | II-76 |
| | 1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | II-76 |
| | 2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | II-77 |
| | 3. Fokus Iklim Berinvestasi | II-77 |
| | 4. Fokus Sumber Daya Manusia | II-78 |
| BAB III | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN..... | III-1 |
| | A. Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-1 |
| | 1. Kinerja Pelaksanaan APBD | III-1 |
| | 2. Neraca Daerah | III-3 |
| | B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... | III-6 |
| | 1. Proporsi Pengguna Anggaran | III-6 |
| | 2. Analisis Pembiayaan | III-10 |
| | C. Kerangka Pendanaan | III-12 |
| BAB IV | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS..... | IV-1 |
| | A. Permasalahan Pembangunan | IV-1 |
| | 1. Urusan Kewenangan Wajib | IV-1 |
| | 2. Urusan Kewenangan Pilihan | IV-8 |
| | B. Isu-Isu Strategis | IV-10 |
| BAB V | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN..... | V-1 |
| | A. Visi | V-1 |
| | B. Misi | V-1 |
| | C. Tujuan dan Sasaran | V-2 |
| BAB VI | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | VI-1 |
| | A. Strategi..... | VI-1 |
| | B. Arah Kebijakan | VI-3 |
| BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VII-1 |
| | A. Kebijakan Umum | VII-1 |
| | B. Program Pembangunan Daerah..... | VII-3 |

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| BAB VIII | INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI | |
| | KEBUTUHAN PENDANAAN | VIII-1 |
| | A. Indikasi Rencana Program Prioritas | VIII-1 |
| | B. Kebutuhan Pendanaan Indikatif | VIII-7 |
| BAB IX | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | IX-1 |
| BAB X | PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN | X-1 |
| | A. Pedoman Transisi | X-1 |
| | B. Kaidah Pelaksanaan | X-1 |

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

| | | |
|-------------|--|-------|
| Tabel 2.1. | Keadaan Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 | II-6 |
| Tabel 2.2. | PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 | II-7 |
| Tabel 2.3. | Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2009 | II-9 |
| Tabel 2.4. | Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten/Kota sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009 | II-10 |
| Tabel 2.5. | Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pemalang Dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2006 – 2009 | II-10 |
| Tabel 2.6. | Perbandingan Angka IPG Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008 | II-11 |
| Tabel 2.7. | Perbandingan Angka IDG Kabupaten Pemalang dengan kabupaten/kota sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008 | II-11 |
| Tabel 2.8. | Perbandingan Pembentuk IPM Kabupaten Pemalang dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2007 – 2009 | II-12 |
| Tabel 2.9. | Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010..... | II-12 |
| Tabel 2.10. | Jumlah Angkatan Kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2009..... | II-13 |
| Tabel 2.11. | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang Dengan Kabupaten/Kota sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2009 | II-13 |
| Tabel 2.12. | Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Pemalang Tahun 2010..... | II-14 |
| Tabel 2.13. | Pertumbuhan Jumlah TK, Murid TK dan Guru TK Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010..... | II-15 |
| Tabel 2.14. | Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid TK Tahun 2005 – 2010..... | II-15 |
| Tabel 2.15. | Pertumbuhan Jumlah SD/MI, Murid SD/MI dan Guru SD/MI Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010 | II-16 |
| Tabel 2.16. | Pertumbuhan Jumlah SMP/MTs, Murid SMP/MTs dan Guru SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010 | II-16 |
| Tabel 2.17. | Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010 | II-16 |
| Tabel 2.18. | Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010..... | II-17 |
| Tabel 2.19. | Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010 (%) | II-17 |
| Tabel 2.20. | Angka Kelulusan UASBN SD/MI dan UN SMP/MTs Kabupaten Pemalang 2005 – 2010 | II-18 |
| Tabel 2.21. | Pertumbuhan Jumlah, Murid dan Guru SMA/MA/SMK Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2009 (Orang) | II-18 |
| Tabel 2.22. | Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid SMA/MA/SMK Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010 | II-18 |
| Tabel 2.23. | Perkembangan APK SMA/SMK/MA Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010 | II-19 |
| Tabel 2.24. | Perkembangan Sarana dan Prasana Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2010 (unit)..... | II-21 |
| Tabel 2.25. | Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2010 | II-22 |
| Tabel 2.26. | Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2007 – 2010 | II-22 |

| | |
|---|-------|
| Tabel 2.27. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2010..... | II-23 |
| Tabel 2.28. Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2010 | II-23 |
| Tabel 2.29. Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010..... | II-24 |
| Tabel 2.30. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2010 | II-25 |
| Tabel 2.31. Persentase Komposisi Sampah Di kabupaten Pemalang Tahun 2007-2010 (%)..... | II-25 |
| Tabel 2.32. Panjang drainase Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2010 (meter)..... | II-25 |
| Tabel 2.33. Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Primer Tahun 2008-2010 (meter) | II-27 |
| Tabel 2.34. Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Sekunder Tahun 2006-2010 (meter) | II-27 |
| Tabel 2.35. Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Tersier Tahun 2006-2010 (km) | II-27 |
| Tabel 2.36. Persentase Kondisi Dam Di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (%) | II-28 |
| Tabel 2.37. Jumlah dan Kondisi Embung Di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (buah) | II-28 |
| Tabel 2.38. Rumah Berdasarkan Kondisi Fisik Bangunan Di Kabupaten Pemalang tahun 2006-2010 (Unit)..... | II-29 |
| Tabel 2.39. Status Kepemilikan Rumah, Penyediaan Rumah, Kebutuhan Rumah Tahun 2006-2010 | II-29 |
| Tabel 2.40. Jumlah Rumah Ber-IMB di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 | II-30 |
| Tabel 2.41. Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (Unit)..... | II-32 |
| Tabel 2.42. Data Timbulan Sampah 2006 – 2010.. | II-33 |
| Tabel 2.43. Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambient di Kabupaten Pemalang Tahun 2010 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)..... | II-34 |
| Tabel 2.44. Mata Air di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pemalang | II-35 |
| Tabel 2.45. Jumlah Petak Yang Bersertifikat di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 | II-36 |
| Tabel 2.46. Jumlah Kepala Keluarga, Penduduk Wajib KTP, Kepemilikan KTP, Pemohon Akta Kelahiran dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2005-2009..... | II-37 |
| Tabel 2.47. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang Tahun 2004 – 2008 | II-38 |
| Tabel 2.48. Indeks Pemberdayaan Gender IDG Kabupaten Pemalang Tahun 2004 – 2008 | II-38 |
| Tabel 2.49. Jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 | II-41 |
| Tabel 2.50. Kelembagaan Sosial di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010..... | II-41 |
| Tabel 2.51. Jumlah Angkatan Kerja, Pengangguran, TPAK dan TPT di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 | II-42 |
| Tabel 2.52. Upaya Peningkatan SDM Tenaga Kerja di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010..... | II-43 |
| Tabel 2.53. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2005-2010..... | II-43 |
| Tabel 2.54. Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 | II-44 |
| Tabel 2.55. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010..... | II-45 |
| Tabel 2.56. Perkembangan Jenis Koperasi di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 | II-45 |
| Tabel 2.57. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor UMKM Tahun 2010..... | II-46 |
| Tabel 2.58. Besarnya Alokasi Kredit Melalui Bank Umum dan BPR dan Penggunaannya di Kabupaten Pemalang..... | II-47 |

| | |
|---|-------|
| Tabel 2.59. Investasi PMDN dan Tenaga Kerja Yang Terserap Di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2009 | II-47 |
| Tabel 2.60. Benda Cagar Budaya di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010 | II-48 |
| Tabel 2.61. Perkembangan Kesenian Tradisional di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010 (buah)..... | II-48 |
| Tabel 2.62. Perkembangan Kesenian Modern di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010 (buah) | II-49 |
| Tabel 2.63. Kejadian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (Kasus)..... | II-51 |
| Tabel 2.64. Angka Kriminalitas Kabupaten Pemalang 2010 (Kasus)..... | II-51 |
| Tabel 2.65. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2009 | II-52 |
| Tabel 2.66. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang 2006–2010 (ribu Rp) | II-54 |
| Tabel 2.67. Jumlah PNS Dirinci Menurut Golongan Kabupaten Pemalang Tahun 2005 –2010 | II-55 |
| Tabel 2.68. Jumlah PNS Dirinci Menurut Eselon Kabupaten Pemalang Tahun 2004 –2009 | II-55 |
| Tabel 2.69. Jumlah PNS Dirinci Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Pemalang 2006 –2010 (orang)..... | II-56 |
| Tabel 2.70. Neraca Bahan Pangan di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010..... | II-56 |
| Tabel 2.71. Persebaran Lokasi PNPM di Kabupaten Pemalang Tahun 2010 | II-59 |
| Tabel 2.72. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (ton)..... | II-62 |
| Tabel 2.73. Produksi Sayur-sayuran Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (ton)..... | II-63 |
| Tabel 2.74. Produksi Buah-buahan Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (Ton)..... | II-63 |
| Tabel 2.75. Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010..... | II-63 |
| Tabel 2.76. Populasi Ternak di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 (dalam ekor)..... | II-64 |
| Tabel 2.77. Produksi Daging di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010 (dalam kg) | II-64 |
| Tabel 2.78. Produksi Telur di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2009 (dalam kg) | II-65 |
| Tabel 2.79. Populasi dan Carrying Capacity Ternak di Kabupaten Pemalang Tahun 2010..... | II-65 |
| Tabel 2.80. Perkembangan Luas Hutan di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2010..... | II-66 |
| Tabel 2.81. Produksi Hasil Hutan di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2009(M ³)..... | II-66 |
| Tabel 2.82. Luas Lahan Kritis, Lahan Reboisasi, Lahan Penghijauan dan Kebakaran Hutan di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 (Ha)..... | II-67 |
| Tabel 2.83. Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Pemalang | II-68 |
| Tabel 2.84. Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung Wisata dan Jumlah Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata | II-69 |
| Tabel 2.85. Produksi Perikanan Tangkap di Laut Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 | II-70 |
| Tabel 2.86. Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010..... | II-70 |
| Tabel 2.87. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010..... | II-71 |
| Tabel 2.88. Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010..... | II-71 |
| Tabel 2.89. Jumlah Nelayan di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 (Orang)..... | II-71 |
| Tabel 2.90. Jumlah Kapal di Kabupaten Pemalang Tahun 2007 – 2010 | II-72 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Tabel 2.91. | Jumlah sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010..... | II-72 |
| Tabel 2.92. | Jumlah Usaha Perdagangan dan Tenaga kerja yang terserap Kabupaten pemalang Tahun 2006 – 2010 | II-73 |
| Tabel 2.93. | Data Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Pemalang..... | II-74 |
| Tabel 2.94. | Perkembangan Industri di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010..... | II-74 |
| Tabel 2.95. | Perkembangan Transmigrasi di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 | II-75 |
| Tabel 2.96. | Perkembangan Kasus Kriminalitas, Demonstrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 | II-77 |
| Tabel 2.97. | Lama Proses Perijinan Usaha, Jumlah Macam Pajak/Retribusi dan Perda yang Mendukung Investasi di Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2009..... | II-78 |
| Tabel 2.98. | Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2009..... | II-78 |
| Tabel 3.1 | Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010..... | III-2 |
| Tabel 3.2 | Ringkasan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 dan 2010 | III-4 |
| Tabel 3.3 | Laporan Realisasi Belanja Kabupaten Pemalang Tahun 2006 s.d Tahun 2009..... | III-8 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010..... | III-11 |
| Tabel 3.5 | Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pemalang tahun 2006-2009 | III-12 |
| Tabel 3.6 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016..... | III-14 |
| Tabel 8.1 | Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016..... | VIII-8 |
| Tabel 9.1 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 | IX-1 |
| Grafik 2.1. | Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010 | II-6 |
| Grafik 2.2. | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 | II-7 |
| Grafik 2.3. | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2010 | II-8 |
| Grafik 2.4. | Laju Inflasi di Kabupaten Pemalang 2006-2010..... | II-8 |
| Grafik 2.5. | PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Berlaku Tahun 2005 – 2009..... | II-9 |
| Grafik 2.6. | Cakupan kunjungan ibu Hamil K4, Cakupan Persalinan oleh Nakes dan Cakupan Kunjungan Nifas Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010..... | II-20 |
| Grafik 2.7. | Cakupan Kunjungan Bayi dan Kunjungan Neonatus Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2010 | II-20 |
| Grafik 2.8. | Jumlah Usaha Ekonomi Dengan dan Tanpa TTG di Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2009 | II-58 |
| Grafik 2.9. | Jumlah posyandu di kabupaten pemalang tahun 2005-2010 | II-59 |
| Grafik 3.1 | Proporsi Pendapatan Asli daerah Realisasi APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2009..... | III-3 |
| Grafik 3.2 | Perbandingan Proporsi Masing-masing Unsur Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2010..... | III-9 |
| Grafik 3.3 | Perbandingan Masing-masing Unsur Belanja Langsung Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010..... | III-9 |